

# **PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG**

**(Studi Penelitian pada Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur  
Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang)**



## **T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana  
Universitas Diponegoro**

**Disusun oleh:**

**ADHI PUTRA WICAKSONO  
NIM. D4B006038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2009**

## ABSTRACT

Voters is subject of participation and not the object of mobilization so that they have independence in developing awareness, formulating and express their choice. In reality, Local Elections (including Governor's election) appearing a phenomenon that is consequence from legal aspect demand and pragmatic approaches from the candidates. A candidate is an identity of political institution which put on the market to the voters. Voters are prefer to evaluate a candidate based on theirs personal traits than theirs policy. If individual doesn't have comprehensive perception about issue and candidate / party performance, so the role of party ID will be dominant. Campaign is process of message forwarding that have purpose to change attitude, opinion, and voter behavior. Campaign event can created momentum for candidate and cause public opinion fluctuation. The research problem is "how to raise election outcome in Semarang City"

The sampling method that used in this research is two stage random sampling. We selected 380 samples from 1.087.077 population; consist of male and female, various age group, education level and religion. Before analyzing data, the research instrument must be tested and fulfill some assumptions. The normality data of Multiple Discriminant Analysis (MDA) with three independent variables are unfulfilled. So that we did the multinominal logistic regression analysis and used SPSS as the tool.

The result of this research shows that in partial or simultaneous candidate image variable, party ID, and campaign effectiveness didn't have significant influences on voting behavior. Cross tabulation analysis indicate that sex, age group, education level, and religion didn't have association with voter preference.

Keywords: voting behavior, candidate image, party ID, and campaign effectiveness

## ABSTRAKSI

Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya. Dalam realitas pelaksanaan, Pilkada (termasuk di dalamnya Pilgub) memunculkan suatu fenomena yang terbentuk akibat tuntutan aspek legal dan pendekatan pragmatik yang ditempuh para kandidat. Seorang kandidat adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih cenderung lebih suka untuk mengevaluasi seorang kandidat berdasar pada karakteristik pribadi mereka daripada posisi kebijakannya. Apabila individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan sangat kuat. Kampanye merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih. *Event* kampanye dapat menciptakan momentum bagi kandidat dan menyebabkan fluktuasi opini publik. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah “bagaimana meningkatkan perolehan suara di daerah pemilihan Kota Semarang”.

Metode sampling yang digunakan adalah *twostage random sampling*, dari 1.087.077 responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbagai usia, tingkat pendidikan dan agama dipilih 380 orang sebagai sampel. Sebelum analisis data, instrumen diuji terlebih dahulu dan asumsi-asumsi yang berlaku harus dipenuhi. Analisis diskriminan berganda dengan tiga variabel bebasnya tidak terpenuhi asumsi normalitasnya. Sehingga kemudian dilakukan dengan analisis *multinomial logistic regression* terhadap model yang ada menggunakan SPSS sebagai alatnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun bersama-sama, variabel citra kandidat, tingkat identifikasi partai dan efektivitas kampanye tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih. Secara deskriptif (tabulasi silang), jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan agama yang dianut tidak memiliki asosiasi dengan pilihan pemilih.

Kata kunci: perilaku pemilih, citra kandidat, identifikasi partai, dan efektivitas kampanye

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah Pemilu 2004, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung pula sejak 2005. Pada tahun 2008, akan digelar pemilihan gubernur (Pilgub) di 12 (dua belas) provinsi dan 4 (empat) di antaranya di Pulau Jawa dan Bali.<sup>1</sup> Masa jabatan kepala daerah Jawa Tengah akan berakhir tanggal 23 Agustus 2008. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 telah dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan terpilih pasangan H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dengan perolehan suara sebesar 6.084.261 (43,44%).

Pilgub adalah sebagai gerbang demokrasi rakyat, bukan untuk memilih pemimpin partai politik atau pemimpin komunitas masyarakat tertentu, tetapi memilih pemimpin seluruh masyarakat sekaligus pemimpin pemerintahan di provinsi yang mampu menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya sesuai kebutuhan wilayah dan masyarakatnya.<sup>2</sup> Pilgub juga menjadi momentum bersejarah, karena untuk kali pertama masyarakat Jawa Tengah akan memilih langsung gubernurnya. Sudah sepantasnya jika harapan besar tertumpu pada momen itu untuk menjadi media efektif dalam memilih pemimpin yang bertakwa dalam keberagamannya, adil dan amanah dalam mengemban

---

1 Pradhanawati, 2007, *Pemilihan Gubernur Gerbang Demokrasi Rakyat*, hal. 5

2 Mardiyanto dalam Pradhanawati, *op.cit*, hal.xxviii

kepemimpinannya.<sup>3</sup>

Paradigma lama memenangkan pertarungan kekuasaan politik, terutama pemilu selama orde baru dengan pola represif sudah ketinggalan zaman. Perubahan sistem politik membuka peluang hadirnya cukup banyak partai politik. Jumlah partai yang beragam, secara langsung berimplikasi pada taktik dan strategi untuk memenangkan perebutan kekuasaan politik. Partai politik yang mengandalkan kekuatan dan represif sudah tidak akan dilirik oleh pemilih. Hal yang sama terjadi dalam persaingan antar kandidat politik, baik itu dalam pemilihan presiden / wakil presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah.

Adapun hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Perolehan Suara Sah Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur**  
**Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang**

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	H. Bambang Sadono, SH, MH - Drs H. Muhammad Adnan, MA	P.Golkar	103.325	17,14
2	H. Agus Soeyitno - Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si	PKB	32.031	5,31
3	H. Sukawi Sutarip, SH, SE - Dr. H. Sudharto, MA	PKS - PD	209.344	34,73
4	H. Bibit Waluyo - Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si	PDIP	200.017	33,18
5	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT - Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM	PAN - PPP	58.086	9,64
			602.803	100

Sumber: KPU Kota Semarang (2008)

<sup>3</sup> Lihat tulisan Nuridin, *Kritik atas "Kampanye" Pilgub*, Harian Suara Merdeka, 2008

Pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pasangan Sukawi Sutarip - Sudharto memimpin perolehan suara sebesar 209.344 (34,73%) disusul dengan cukup ketat oleh pasangan Bibit Waluyo - Rustriningsih sebesar 200.017 (33,18%), pasangan Bambang Sadono - Muhammad Adnan 103.325 (17,14%), pasangan Muhammad Tamzil - Abdul Rozaq Rais 58.086 (9,64%), dan terakhir pasangan Agus Soeyitno - Abdul Kholiq Arif 32.031 (5,31%).

Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, kontestan membutuhkan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. Perlu suatu strategi untuk dapat memenangkan persaingan politik. Agar suatu kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan dapat dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih.<sup>4</sup>

Dalam persaingan politik modern, ketika pragmatisme menjadi permasalahan, maka merebut hati masyarakat dan memuaskan kebutuhan mereka menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh para kandidat.<sup>5</sup>

Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya. Dalam bahasa

---

4 Firmanzah, 2007, *Marketing Politik*, hal. 21

5 Lihat tulisan Pitaloka, *Jitukah Iklan Politik?*, Harian Suara Merdeka, 2008

yang lain para pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, kalkulasi, rasionalitas, dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial, dan irasional, serta berbeda dari *swingers voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya.<sup>6</sup>

Berikut dapat dilihat beberapa permasalahan yang terkait dengan perilaku pemilih dalam Pilgub Jateng:

**Tabel 1.2**  
**Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**

No	Sumber	Permasalahan
1	<a href="http://www.promojateng-bikk.com">www.promojateng-bikk.com</a> Senin, 22 Oktober 2007	<b>Mayoritas Pemilih Belum Tentukan Nama Gubernur Jateng</b> "Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2007 mengungkapkan bahwa sebagian besar pemilih di Jawa Tengah belum menentukan siapa yang bakal dipilih menjadi gubernur pada Pemilihan Gubernur Jateng 2008. ... 78,9 persen responden menyatakan belum tahu siapa yang dipilih sebagai Gubernur Jateng mendatang. ..."
2	Suara Merdeka Kamis, 27 Maret 2008 hal. 16	<b>56% Pemilih di Jateng Mau Terima Uang</b> <b>"Pemilih Jateng rupanya tidak alergi dengan politik uang. Mereka menganggap wajar dan mau menerima pembagian uang dari calon yang maju dalam Pilgub 22 Juni nanti. ..."</b>
3	Seputar Indonesia Senin, 19 Mei 2008 hal. 15	<b>Pemilih Pragmatis Masih Menjadi Penentu</b> " ... kelompok ketiga yang menjadi penentu kemenangan dalam Pilgub adalah kelompok pragmatis, yang persentasenya bisa mencapai 65%. Pemilih model ini tidak akan melihat visi, misi, program, atau <i>track record</i> calon yang akan diusung. ..."
4	Suara Merdeka Rabu, 2 Juli 2008 hal. 16	<b>Partisipasi Pilgub Mengkhawatirkan</b> " ... Dari 25.855.542 pemilih, yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 10.739.152 orang (41,54%), sementara total suara tidak sah mencapai 1.109.348 orang (7,34%). ..."

<sup>6</sup> Lihat Riyanto, *Iklan Politik, Era Image, dan Kekuasaan Media*, Jurnal Nirmana Vol.6 No.2, 2004, hal. 154

Tabel 1.2 di atas bukan untuk merepresentasikan seluruh permasalahan yang terkait dengan perilaku pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah. Namun setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai pemilih itu sendiri sebagai obyek dalam penelitian ini. Keputusan pemilih berdasarkan tabel 1.2 adalah tidak berpartisipasi atau berpartisipasi dengan proses pengambilan keputusan yang singkat, tidak melihat visi dan misi maupun dengan alasan asal mendapat uang.

Adapun hasil jajak pendapat mengenai sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan atau tidak menjadi pertimbangan selain yang terdapat pada tabel 1.2 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Hasil Jajak Pendapat Litbang Harian Seputar Indonesia dan Pusat**  
**Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis)**

Apakah sejumlah faktor di bawah ini menjadi pertimbangan atau tidak menjadi pertimbangan, dalam menentukan pilihan Anda pada Pilgub Jateng?				
No	Faktor Pertimbangan	(dalam persen)		
		Ya	Tidak	Tidak Menjawab
1	Popularitas / figur calon	92,02	6,97	1,01
2	Pengalaman calon	90,76	3,02	6,21
3	Kemampuan / kompetensi calon	90,18	7,39	2,43
4	Pasangan (wakil gubernur/bupati/walikota)	89,00	8,98	2,02
5	<i>Track record</i> / jejak rekam calon	89,00	7,98	3,02
6	Latar belakang profesi	86,06	10,92	3,02
7	Dukungan dari tokoh agama	80,02	17,04	2,94
8	Dukungan dari tokoh masyarakat	72,46	19,98	7,56
9	Asal partai yang mencalonkan	58,94	26,03	15,03
10	Asal daerah calon (kabupaten, kecamatan, desa)	51,05	42,91	6,05

Sumber: Seputar Indonesia (2008)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan terbesar dalam menentukan pilihan pada Pilgub Jateng adalah popularitas / figur calon (92,02%) kemudian disusul oleh pengalaman calon (90,76%),

kemampuan / kompetensi calon (90,18%), pasangan (89%), *track record* (89%), latar belakang profesi (86,06%), dukungan dari tokoh agama (80,02%), dukungan dari tokoh masyarakat (72,46%), asal partai yang mencalonkan (58,94%), dan asal daerah calon (51,05%).

Selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu<sup>7</sup>, yaitu: *Pertama*, identitas partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya. *Kedua*, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai *status quo* biasanya menjual isu-isu keamanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut biasanya dianggap “bersih” terutama dari nuansa *money politics*. *Ketiga*, penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat.

Dalam realitas pelaksanaannya, Pilkada (termasuk di dalamnya Pilgub) memunculkan suatu fenomena yang patut digaris bawahi, terbentuk akibat tuntutan aspek legal dan pendekatan pragmatik yang ditempuh para kandidat.<sup>8</sup> Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berhak melakukan seleksi dan perekrutan calon pasangan kepala daerah adalah partai politik (parpol). Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pilgub Jawa Tengah masih berdasarkan UU Nomor 32

---

7 Malian dalam Kushartono, 2006, *Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun 2005 di Kecamatan Pelabuhanratu, Cisaat dan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi*, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tahun 2004 yang belum diubah oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 karena ketentuan tersebut tidak berlaku surut.<sup>9</sup>

Ketentuan yang berlaku memberikan kewenangan yang sangat besar kepada parpol untuk memberi warna kepada kepala daerah terpilih, apakah kepala daerah itu berkualitas ataukah tidak. Dengan syarat, sebagaimana ditentukan UU tersebut, parpol melakukan perekrutan kandidat melalui mekanisme internal yang demokratis dan transparan. Namun demikian, dalam realitasnya perekrutan kandidat itu umumnya berlangsung dalam mekanisme demokrasi yang semu (*pseudo democracy*) dan tidak transparan. Hal ini disebabkan mekanisme itu terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan pragmatik elite parpol, sehingga kualifikasi kandidat yang berkaitan dengan kompetensi, kredibilitas, dan akuntabilitas calon tenggelam oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek elite parpol.<sup>10</sup>

Dalam rekrutmen tersebut banyak terjadi negoisasi menyangkut kontribusi calon terhadap partai. Akibatnya calon yang dimunculkan adalah yang berhasil memenangkan negoisasi itu, dengan tolok ukur utamanya berupa materi (baca: dana atau "gizi").<sup>11</sup>

Kandidat - kandidat yang diajukan parpol dalam Pilgub Jawa Tengah juga tidak luput dari pragmatisme yang terjadi. Berikut dapat dilihat beberapa permasalahan yang terkait dengan kandidat dalam Pilgub Jawa Tengah.

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Bisri, 2006, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, hal.20

<sup>9</sup> UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 56 ayat (2) diubah, yang berakibat pada usulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. UU tersebut ditetapkan

**Tabel 1.4**  
**Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Kandidat dalam**  
**Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**

No	Sumber	Permasalahan
1	Meteor Sabtu, 26 April 2008 hal.3	<b>Rekam Jejak Cagub Harus Transparan (Sejumlah Cagub-Cawagub Terbelit Kasus Hukum)</b> “ ... Ada yang berstatus sebagai terlapor dugaan korupsi (Rustriningsih), ada yang terlibat korupsi karena perintah dan jabatannya berdasarkan penyelidikan kejar (M. Tamzil), dan bahkan ada yang sudah berstatus sebagai tersangka korupsi (Sukawi Sutarip). ...”
2	<a href="http://www.republika.co.id">www.republika.co.id</a> Selasa, 6 Mei 2008	<b>PKS Tetap Dukung Sukawi meski Kini Jadi Tersangka</b> “Meskipun Sukawi Sutarip, calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jateng sebagai tersangka, PKS tetap memberi dukungan kepadanya. ...”
3	Radar Semarang (Jawa Pos) Sabtu, 21 Juni 2008 hal.1	<b>KPI: Tolak Kandidat Terindikasi Korupsi</b> “Aksi LSM terkait pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng berlanjut. Kemarin, puluhan pemuda yang mengatasnamakan diri Komite Pemuda Indonesia (KPI) Jateng menggelar demonstrasi di halaman RRI Semarang. Dalam aksi damai tersebut, mereka mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih pasangan cagub-cawagub yang terindikasi korupsi. ...”

Tabel 1.4 di atas tidak merepresentasikan seluruh pemberitaan yang ada di media massa, namun hanya sebagai sampel atas permasalahan yang terkait dengan kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Selain pemberitaan tersebut, masih ada pemberitaan lain seperti: Tiga Unjuk Rasa Goyang Calon (Jawa Pos, 17 Juni 2008), Kampanye Anti-Politisi Busuk (Jawa Pos, 18 Juni 2008), dan lain sebagainya. Adapun beberapa suara masyarakat terkait dengan Pilgub Jateng dapat dilihat, misalnya, pada Kolom SMS Pilgub (Meteor) dan

---

pada tanggal 28 April 2008 ketika proses Pemilihan Gubernur Jawa Tengah telah berjalan.

10 *ibid*

11 *ibid*

Kolom Gubernur Idamanku (Jawa Pos). Permasalahan yang terkait dengan kandidat terutama mengenai indikasi korupsi dan status hukumnya.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub dan cawagub) sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (2) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik pengusung cagub dan cawagub juga tidak luput dari berbagai permasalahan. Calon-calon kepala daerah yang diajukan oleh Partai Golkar mengalami kekalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilanda konflik internal yang membuat partai terpecah menjadi 2 (dua) kubu berbeda dari tingkat pusat hingga daerah.

Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), persepsi umum atas partai politik menunjukkan bahwa publik Indonesia bersikap skeptis terhadap partai politik. Sebagian besar (58,3%) publik kurang atau tidak puas dengan kerja partai politik selama ini. Hanya 25,5% saja yang mengatakan sangat atau cukup puas. Beberapa alasan kurang puas atau tidak puas adalah: (1) partai tidak memperjuangkan kepentingan rakyat; (2) kerja partai tidak dirasakan oleh masyarakat; (3) fungsi partai tidak berjalan.<sup>12</sup>

Adapun beberapa permasalahan partai politik dalam pilgub Jateng dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini.

---

12 Lingkaran Survei Indonesia (Kajian Bulanan Edisi 06 – Oktober 2007)

**Tabel 1.5**  
**Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Partai Politik dalam**  
**Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**

No	Sumber	Permasalahan
1	Suara Merdeka Rabu, 4 Juni 2008	<b>Dua Versi PKB Berbeda Dukungan</b> “Dualisme kepemimpinan dalam tubuh PKB membawa imbas pada Pilgub Jateng. Bila PKB di bawah kepemimpinan Ali Masykur Musa menyatakan tidak akan meninjau ulang pengusungan Agus Soeyitno-Kholiq Arief, justru PKB dengan pimpinan Muhaimin Iskandar nyata-nyata mendukung pencalonan Bambang Sadono-M.Adnan. ...”
2	<a href="http://www.kr.co.id">www.kr.co.id</a> Rabu, 18 Juni 2008	<b>Kecewa Justru Dukung Tamzil-Rozaq; Mega Tanggapi Serius Sikap 'Naga Merah'</b> “Menjelang pemilihan Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah yang tinggal beberapa hari lagi, justru diwarnai aksi pembentukan pasukan Naga Merah (NM) yang dilakukan sejumlah kader PDIP. Mereka kecewa atas rekomendasi DPP untuk cagub Bibit, yang seharusnya jatuh ke Ketua DPD PDIP Jateng, Murdoko. ...”
3	Kompas Rabu, 18 Juni 2008	<b>Menakar Kekuatan Parpol</b> “... Perubahan konstelasi politik pada Pemilu 2004 menggambarkan pergeseran preferensi politik masyarakat Jateng. Simbol-simbol politik lama, seperti ideologi dan figur pemimpin partai, mulai diabaikan. Masyarakat mulai tertarik dengan simbol-simbol politik baru berupa pencitraan dan popularitas. ...”
4	Kompas Selasa, 24 Juni 2008	<b>Komunikasi Antarelite Buruk; Kalla Evaluasi Kekalahan Golkar</b> “Kekalahan calon dari Partai Golkar dalam beberapa pemilihan kepala daerah di provinsi utama terjadi akibat tidak berjalannya mesin politik yang mereka miliki. Kondisi ini terjadi akibat buruknya komunikasi di antara elite Partai Golkar dan munculnya ketidakpercayaan atas kepemimpinan di tingkat pusat. ...”

Dalam Pilgub Jateng, kondisi yang telah ada diperburuk oleh adanya konflik internal partai di tingkat daerah terjadi pada PDI-P dengan “Naga Merah” dan PKB yang memiliki 2 (dua) kubu yang berbeda sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.5 di atas. Permasalahan internal partai juga masih menjadi kendala yang utama seperti yang terjadi pada Partai Golkar.

Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah mengenai kampanye yang dilakukan oleh masing-masing tim pemenangan dari pasangan cagub dan cawagub. Rentang waktu yang digunakan untuk kampanye tidak hanya pada saat jadwal kampanye yang telah ditetapkan. Salah satu cagub bahkan telah berkampanye sejak awal tahun 2007 namun di lain pihak ada cagub dan cawagub yang baru berkampanye beberapa saat sebelum pendaftaran cagub dan cawagub ke KPU.

Mudah dijumpai baliho dan spanduk berisi ajakan atau sekedar mohon doa restu untuk mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur di sudut kota, terlebih di pusat keramaian yang strategis. Bahkan *sticker* dan *leaflet* banyak bertebaran sampai ke desa-desa. Fenomena tersebut menuai kritik dengan berbagai alasan, di antaranya adalah (1) pesan kampanye yang verbalistik dan kurang menyentuh akar permasalahan di Jateng; (2) lemahnya totalitas ekspose atas *personality* dan *self confident* para calon; (3) menyampaikan secara transparan sumber dana untuk proses pencalonan.<sup>13</sup>

Hal yang berbeda terjadi ketika memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan. Kampanye di lapangan terbuka, dengan melakukan mobilisasi massa, kini bukan lagi menjadi pilihan utama bagi masing-masing pasangan calon. Demikian pula dengan pilihan kampanye tertutup, dimana pasangan calon sekadar melakukan konsolidasi anggota di daerah-daerah. Sebaliknya, pasangan calon justru lebih sering melakukan kampanye di pasar-pasar, rumah sakit-rumah sakit, perkampungan nelayan, bahkan juga berdialog langsung dengan para

---

<sup>13</sup> Lihat tulisan Nuridin, *loc.cit*

petani.<sup>14</sup>

Redefinisi mengenai kampanye politik, yaitu (1) jangka dan batas waktunya panjang dan terus menerus; (2) tujuannya adalah *image* politik; (3) strateginya ialah membangun dan membentuk reputasi politik *Pull-Marketing*; (4) komunikasi politiknya merupakan interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat; (5) sifat hubungan antara kandidat dan pemilih adalah relasional; (6) produk politiknya merupakan pengungkapan masalah dan solusi, ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai; (7) program kerja bersifat konsisten dengan sistem nilai partai; (8) retensi memori kolektif tidak mudah hilang dalam ingatan; (9) bersifat laten dan menarik simpati masyarakat serta bersikap kritis.<sup>15</sup>

Bila melihat redefinisi tersebut di atas, maka kampanye yang dilakukan dalam Pilgub Jateng cenderung merupakan kampanye pemilu. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: (1) jangka waktunya relatif singkat dan tidak terus menerus, karena berhenti ketika penetapan pasangan calon; (2) *image* politik yang dibangun bukan yang utama karena cenderung lebih untuk menggiring pemilih ke bilik suara; (3) reputasi politik dibentuk sementara, lebih mementingkan mencari dukungan; (4) komunikasi politiknya lebih banyak satu arah, pemahaman dan pencarian solusi tidak banyak dilakukan; (5) sifat hubungan dengan pemilih adalah pragmatis / transaksi; (6) produk politiknya janji, harapan, figur, dan program kerja; (7) sifat program kerja *market-oriented*; (8)

---

14 Lihat tulisan Nugroho, *Evaluasi Kampanye Pilgub Jateng*, Harian Suara Merdeka, 2008

15 Firmanzah, *op.cit*, hal. 273

retensi memori kolektif cenderung mudah hilang; (9) bersifat jelas dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya.<sup>16</sup>

Adapun beberapa permasalahan terkait dengan kampanye para cagub dan cawagub dalam Pilgub Jateng dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:

**Tabel 1.6**  
**Beberapa Permasalahan yang Terkait dengan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**

No	Sumber	Permasalahan
1	Suara Merdeka Rabu, 16 Januari 2008 hal. B	<b>Reklame Pilgub Diduga “Ngemplang”</b> “Alat peraga kampanye Pilgub yang kini banyak terpasang di Jateng dipertanyakan oleh kalangan akademisi. ...” <b>Kinerja Dinas Pertamanan Dipertanyakan</b> “BALAIKOTA- Komisi C DPRD Kota Semarang mempersoalkan maraknya reklame kandidat gubernur / wagub di sejumlah ruas jalan. Pemasangan reklame kampanye di berbagai tempat itu, dinilai mengabaikan estetika kota. ...”
2	Suara Merdeka Senin, 4 Februari 2008	<b>Ada “Kampanye” di Harlah NU Jateng</b> “Peringatan Hari Kelahiran (Harlah) ke-82 Nahdatul Ulama (NU) tingkat Jawa Tengah diwarnai “kampanye” bakal calon gubernur / wakil gubernur Jateng. Hal itu terlihat dalam agenda sambutan sampai dengan doa penutup, diselingi imbauan agar mendukung Ketua PWNU Jateng, Muhammad Adnan, yang berpasangan dengan Ketua DPD Partai Golkar, Bambang Sadono. ...”
3	Suara Merdeka Kamis, 12 Juni 2008	<b>Lagi, Bibit Sasaran Kampanye Hitam</b> “...Petugas juga berhasil menyita stiker, satu unit sepeda motor, dan sebuah telepon genggam. Mereka menyebarkan stiker yang isinya mendiskreditkan cagub nomor 4 Bibit Waluyo. Stiker yang berwarna dasar merah itu bertuliskan “Tolak BBM, Tolak Bibit. Bibit Waluyo Dukung Kenaikan Harga BBM. Belum Jadi Gubernur Sudah Bikin Susah Rakyat Jateng”...
4	Jawa Pos Kamis, 12 Juni 2008	<b>Semua Calon Melakukan Pelanggaran</b> “ ... Salah satu indikasi pelanggaran yang dicatat panwas adalah kampanye Bambang-Adnan di Kota Semarang kemarin. Bambang dinilai melanggar karena melakukan kampanye di sejumlah instansi pemerintah. ...”

<sup>16</sup> *Ibid*

Permasalahan terbanyak dalam kampanye Pilgub Jateng berkaitan dengan iklan, reklame, spanduk maupun atribut-atribut kampanye lainnya. Selain yang ada dalam tabel 6 tersebut di atas, masih ada permasalahan lain yang terkait, misalnya: Reklame Cagub Liar Akan Dicabut (Suara Merdeka, 7 Desember 2007), Sukawi Berurusan dengan Biro Reklame (Suara Merdeka, 17 Januari 2008), Berharap Poster di Pohon Dicotot (Jawa Pos, 22 April 2008), dan lainnya. Sedangkan permasalahan lain terkait dengan *event*, kemungkinan keterlibatan aparat pemerintah dan tempat kampanye. Adapun untuk permasalahan kampanye hitam hanya dialami oleh pasangan Bibit - Rustri.

Terkait dengan kampanye adalah dana yang digunakan. Kampanye tidaklah murah dan mudah karena memerlukan beberapa proses terkait seperti: pendanaan, media kampanye, proses penciptaan *image* kandidat, penyampaian isu kebijakan, dan lain sebagainya. Apabila melihat sumbangan dana kampanye pasangan kandidat, akan muncul pertanyaan mengenai keefektifan kampanye dalam mendukung perolehan suara, pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dipertanyakan dalam acara debat kandidat atau setidaknya dapat meningkatkan partisipasi pemilih karena tingginya *golput* pada pemilihan kemarin. Berikut dapat dilihat besarnya sumbangan dana kampanye masing-masing pasangan kandidat.

**Tabel 1.7**  
**Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan**  
**Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**  
**Sebelum dan Sesudah Masa Kampanye**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUMBANGAN DANA (dalam rupiah)	
		SEBELUM MASA KAMPANYE	SESUDAH MASA KAMPANYE
1	H. Bambang Sadono, SH, MH dan Drs H. Muhammad Adnan, MA	1.902.755.384	4.411.504.237
2	H. Agus Soeyitno dan Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si	2.640.500.000	7.240.825.000
3	H. Sukawi Sutarip, SH, SE dan Dr. H. Sudharto, MA	4.310.032.327	11.860.000.000
4	H. Bibit Waluyo dan Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si	5.475.645.960	6.300.645.960
5	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT dan Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM	317.092.892	1.572.092.896
	T O T A L	14.646.026.563	31.385.068.093

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah (2008)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sumbangan dana kampanye terbesar diperoleh pasangan Sukawi Sutarip - Sudharto, yaitu Rp 11.860.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan yang terkecil diperoleh pasangan M. Tamzil - A. Rozaq Rais yang “hanya” mendapat Rp 1.572.092.896,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berbagai masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan uraian latar belakang di atas, antara lain:

- a. Berkenaan dengan perilaku pemilih, yaitu cenderung pragmatis, mau menerima *money politics*, kurang partisipatif, dan ragu atau menentukan pilihan di saat-saat terakhir
- b. Berkenaan dengan kandidat, yaitu penetapannya oleh partai politik, terdapat kandidat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, demo dugaan kasus korupsi kandidat dan kurang transparannya *track record* calon
- c. Berkenaan dengan identifikasi partai, yaitu konflik internal partai yang terjadi secara nasional maupun di tingkat Jawa Tengah, kekalahan partai besar di beberapa Pilkada sebelumnya, ketidakpuasan simpatisan dan kader terhadap partainya (misal: fenomena Naga Merah)
- d. Berkenaan dengan kampanye, yaitu iklan politik yang dilakukan oleh kandidat mengabaikan estetika kota, pesan yang disampaikan kurang menyentuh akar permasalahan, adanya kampanye hitam dan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye serta besarnya dana kampanye pasangan kandidat

Variabel citra kandidat, tingkat identifikasi partai, efektivitas kampanye, dan perilaku pemilih merupakan fenomena yang cukup mendapat perhatian masyarakat, media, partai dan kandidat, maupun analis dalam Pilgub ini. Meskipun demikian, bagaimana variabel-variabel

populer tersebut dapat menjelaskan sebab dan arah perilaku pemilih, perlu dibuktikan melalui penelitian ini. Dari uraian singkat latar belakang dan identifikasi permasalahan, selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Adapun rumusan masalah yang didapat dari uraian di atas adalah “bagaimana meningkatkan perolehan suara di daerah pemilihan Kota Semarang”.

Pemilihan Kota Semarang sebagai lokus penelitian terkait dengan penurunan dukungan terhadap salah satu kandidat, yaitu Sukawi. Pada pemilihan Walikota tahun 2005, kandidat ini masih didukung 468.003 pemilih dan turun secara signifikan hanya mendapat 209.344 suara pada Pilgub ini. Selain itu, masyarakat kota yang heterogen dengan tingkat individualitas yang relatif tinggi dibandingkan masyarakat desa, merupakan kajian yang cukup menarik karena belum banyak dilakukan. Apabila Gaffar (1992) dan Kristiadi (1993) melakukan studi perilaku pemilih di era Orde Baru pada tingkat pemilihan umum untuk memilih partai yang berkuasa dimana kekuasaan pemerintah dan partai cukup kuat, kebebasan pers serta kehidupan berpolitik dibatasi, maka penelitian ini mencoba mencari temuan di era orde reformasi. Sebagaimana diketahui, pasca reformasi terjadi banyak perubahan di bidang politik yang cukup signifikan dan terjadi pula fenomena-fenomena politik yang sebelumnya tidak pernah ada, misal: adanya pemilihan secara langsung baik presiden / wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah.

Beberapa pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada pengaruh citra kandidat terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang?
- b. Apakah ada pengaruh tingkat identifikasi partai terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang?
- c. Apakah ada pengaruh efektivitas kampanye terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang?
- d. Apakah ada pengaruh citra kandidat, tingkat identifikasi partai dan efektivitas kampanye secara simultan terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh citra kandidat terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat identifikasi partai terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas kampanye terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah

Tahun 2008 di Kota Semarang

- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh citra kandidat, tingkat identifikasi partai dan efektivitas kampanye secara simultan terhadap perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian perilaku pemilih, sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang, seperti: tim sukses (tim pemenangan kandidat), partai politik, mahasiswa, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur merupakan amanat Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 4 sebagai berikut:

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.<sup>1</sup>

Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun beberapa pasal-pasalnyanya menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup>

---

1 Perubahan kedua

2 Bagian Keempat, Pemerintahan Daerah, Paragraf Kesatu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 24

Secara umum dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah (1) UUD 1945; (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008; (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005; dan (4) peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan-aturan pelaksana lainnya, baik yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat) maupun yang di daerah, KPUD Jawa Tengah.

Adapun sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung adalah sebagai berikut:

#### A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Dalam perspektif teoretis, dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu sistem yang selalu memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung; (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.<sup>3</sup>

Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (*secondary system*) atau sub-sub sistem (*subsystems*). Bagian-bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral*

---

3 Easton dalam Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, hal. 200

*regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah terukur (*measurable*). Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah.<sup>4</sup>

Adapun dalam perspektif praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalensi tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Aktor utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; (3) penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan suara; dan (6) penetapan calon terpilih. Pilkada merupakan implementasi demokrasi partisipatoris dengan nilai-nilai demokrasinya menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui azas-azas pilkada yang terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>5</sup>

---

4 Prihatmoko, *op.cit*, hal. 202

5 *Ibid*

## B. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pilkada berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 memenuhi syarat disebut sebagai pilkada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.<sup>6</sup>

Kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan, sebagaimana dikatakan dalam pasal 65 ayat (1)<sup>7</sup>. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau

Dalam kegiatan masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS serta memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik melalui lembaga-lembaga tersebut. Selanjutnya tahap pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Prihatmoko, *op.cit*, hal. 210

<sup>7</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004

terdiri dari 6 (enam) kegiatan sesuai pasal 65 ayat (3)<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah / wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah / wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan

### **2.1.2 Perilaku Pemilih**

Dalam memahami perilaku pemilih, para peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Salah satu pendapat bahwa ada tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan ekonomis<sup>9</sup>. Uraian singkat mengenai ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis dipelopori oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Columbia (*Columbia's University Bureau of Applied Social Science*) atau lebih dikenal dengan Kelompok Columbia. Kelompok ini mengawali penelitiannya tentang voting dengan menerbitkan dua karya, yakni *The People's Choice* (1948) dan *Voting* (1952). Di dalam karya tersebut diungkapkan, bahwa perilaku politik seseorang terhadap partai politik tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Kristiadi, 1993, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih (Disertasi)*, hal. 23

lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain (Lazarsfeld, et.al, dalam Dreyer dan Rossenbaum, 1976). Inti dari pendekatan sosiologis adalah menggunakan variabel-variabel pengelompokan sosial untuk menjelaskan perbedaan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Studi ini dipelopori oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*). Hasil karya kelompok Michigan yang penting adalah *The Voter's Decide* (1954) dan *The American Voter* (1960). Pendekatan ini sekurang-kurangnya menurut Campbell (1954) dimaksudkan untuk melengkapi pendekatan sosiologis yang kadang-kadang dari segi metodologis agak sulit menentukan kriteria pengelompokan masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas tertentu terhadap partai politik tertentu tidak lagi mutlak.

Pendekatan psikologis yang awalnya dikembangkan di Amerika Serikat memusatkan pada tiga aspek, yakni keterikatan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang kepada calon presiden maupun anggota parlemen, dan orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Misalnya, kalau seseorang mempunyai kecenderungan mengidentifikasi diri dengan Partai Demokrat, dan kemudian terpicat isu-isu dan kandidat, maka dalam pemilu akan memilih Partai Demokrat (Campbell, et.al, 1960).

Inti pendekatan psikologis adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih. Secara panjang lebar Campbell (1960) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah "*Funnel of Causality*". Pengandaian itu dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena voting yang di dalam model terletak paling atas dari "*funnel*" (cerobong). Digambarkan bahwa di dalam cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah latar belakang sosial (agama, ras, etnik, daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua. Semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dari proses tersebut. Pada tahap selanjutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik. Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun titik berat studi Kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik pada calon, dan bukan latar

belakang sosial atau budayanya. Proses di atas pada dasarnya dapat dibagi dua, yakni faktor jangka panjang berupa identifikasi kepartaian seseorang, dan faktor jangka pendek berupa isu-isu politik para calon.

Secara ringkas perbedaan esensial antara pendekatan sosiologis dan psikologis adalah Kelompok Columbia lebih melihat perilaku politik dari sudut luar kedirian seseorang dan kemudian mengkaitkannya dengan perilaku pemilih. Sementara Kelompok Michigan lebih melihat perilaku politik dari persepsi seseorang mengenai masalah-masalah politik. Kelompok yang terakhir ini menganggap perasaan, pengalaman, dan interpretasi dari kejadian-kejadian politik secara signifikan mempengaruhi perilaku politik.

c. Pendekatan Ekonomis

Pendekatan ini sering disebut pula sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan rasional antara lain Downs dengan karyanya "*An Economic Theory of Democracy*" (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul "*A Theory of the Calculus Voting*" (1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon presiden maupun anggota parlemen.

Pendapat yang berbeda untuk melihat perilaku pemilih ada 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia);

(2) pendekatan psikologis (Mazhab Michigan); (3) pendekatan rasional; dan (4) pendekatan domain kognitif (Pendekatan Marketing).<sup>10</sup>

Penjelasan singkat untuk 2 (dua) pendekatan yang berbeda dari uraian sebelumnya yaitu pendekatan rasional dan pendekatan domain kognitif adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan rasional

Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan pendekatan ekonomis namun menambahkan beberapa penelitian dan penjelasan. Pendekatan rasional yang dimaksud berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah — dari partai yang berkuasa kelak — dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partai. Penelitian Kavanagh (Inggris) mengemukakan bahwa: (1) menurunnya jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan partai-partai; (2) loyalis kelas melemah dan kelas pekerja berkurang jumlahnya; dan (3) terjadi perubahan sosial, yang antara lain ditandai dengan perubahan pekerjaan dan pemukiman. Penelitian Pomper (Amerika) juga menghasilkan kesimpulan yang mirip, yaitu: (1) hubungan antara variabel-variabel sosial-ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah; (2) posisi isu-isu politik dalam menentukan perilaku politik meningkat tajam; dan (3) terjadi penurunan identifikasi

---

10 Nursal, *op.cit*, hal. 54

partai terhadap pilihan pemilih.<sup>11</sup>

Dalam khasanah teori *voting behaviour*, penjelasan pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat di atas juga dikenal sebagai teori spasial. Teori ini mengasumsikan bahwa para pemilih memilih kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kandidat yang dapat memaksimalkan suara mereka. Di samping itu, dalam kaitannya dengan isu-isu politik, teori spasial juga mengasumsikan bahwa isu-isu politik dapat direpresentasikan seperangkat posisi kebijakan yang benar-benar nyata. Sebab itu, ketika seseorang menanggapi terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang suatu isu dalam suatu penelitian (*survey*), mereka diharapkan menyatakan posisi kebijakannya dalam kaitannya dengan isu-isu tersebut. Pada sisi lain, isu juga merepresentasikan simbol. Oleh karena itu, respon seseorang terhadap suatu pertanyaan yang berhubungan dengan suatu isu dianggap untuk menyatakan apakah mereka mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap simbol tersebut, yang dapat ditunjukkan dengan pertanyaan: seberapa dekat perasaan mereka terhadap suatu isu.<sup>12</sup>

Dalam terminologi Hucfeldt dan Carmines (1996), penjelasan perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan kepentingan diri di atas disebut sebagai tradisi ekonomi politik (*political economy tradition*).<sup>13</sup>

---

11 *Ibid*

12 Iversen (1994) dalam Asfar, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, hal. 148

13 Asfar, *op.cit*, hal.148

b. Pendekatan domain kognitif (pendekatan *marketing*)

Newman dan Sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan *marketing*. Dalam pengembangan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut, dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.<sup>14</sup>

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh 7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah<sup>15</sup>, sebagai berikut:

- 1) Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), yaitu mempresentasikan kebijakan atau program (*platform*) yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat jika menang
- 2) Citra sosial (*social imagery*), yaitu menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor antara lain demografi, sosial ekonomi, kultur dan etnik, serta politis-ideologis
- 3) Perasaan emosional (*emotional feelings*), yaitu dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan

---

14 Nursal, *op.cit*, hal. 69

15 *Ibid*

- 4) Citra kandidat (*candidate personality*), yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat
- 5) Peristiwa mutakhir (*current events*), yaitu mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye
- 6) Peristiwa personal (*personal events*), yaitu mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang, dan sebagainya
- 7) Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*), yaitu adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru

Pola perilaku pemilih pada masa Orde Baru tidak mencerminkan perilaku demokratis. Akan tetapi, pola perilaku politik masa silam—dengan catatan seperlunya—masih cukup berguna, terlebih dengan masih terbatasnya hasil penelitian tentang perilaku pemilih pada era reformasi. Beberapa hasil studi dan catatan tentang perilaku pemilih Indonesia dapat disimpulkan adanya beberapa faktor penting sebagai berikut: (1) orientasi agama; (2) faktor kelas sosial dan kelompok sosial lainnya; (3) faktor kepemimpinan dan ketokohan; (4) faktor identifikasi; (5) orientasi isu; (6) orientasi kandidat; (7) kaitan dengan peristiwa; dan (8) rekonfigurasi papan catur politik.<sup>16</sup> Preferensi pemilih seringkali terbentuk oleh lebih dari

---

<sup>16</sup> Nursal, *op.cit*, hal. 80-101

satu faktor yang satu sama lain saling meneguhkan. Kombinasi beberapa faktor tersebut dapat membentuk citra tertentu dalam benak pemilih.<sup>17</sup> Beberapa alasan yang mendasari para pemilih (*voters*) dalam menggunakan hak pilihnya antara lain: (1) tidak suka, sehingga memilih lawannya; (2) mengikuti orang lain; (3) popularitas tokoh; (4) mengikuti pemimpin; (5) ideologi (agama Islam); dan (6) tradisi keluarga.<sup>18</sup>

Carpini dan Keeter (1996) menyatakan bahwa pembahasan mengenai perilaku pemilih mengalami peningkatan dalam beberapa dekade ini pada permasalahan dimana kebanyakan dari pemilih hanya memiliki informasi yang terbatas untuk membuat keputusan dan hal tersebut mulai dapat diterima oleh ahli. Sebelumnya pendapat Lau dan Sears (1986) menjelaskan bahwa pemilih adalah orang yang secara kognitif “kikir” ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk mengevaluasi seorang kandidat, dimana mereka sangat tidak mau mendayagunakan sumber-sumber daya yang signifikan dalam mengumpulkan informasi menyeluruh. Kemudian ditambahkan oleh Lau dan Redlawsk (1997), mengingat reaksi-reaksi awal atas temuan-temuan tersebut patut untuk menjadi pertimbangan, namun yang terjadi berikutnya adalah para ilmuwan-ilmuwan politik telah “berpindah” pada pendapat yang menyatakan bahwa pemilih dapat melakukan suatu usaha yang baik dalam memilih secara “tepat” meskipun pada saat mereka hanya memiliki informasi yang sangat terbatas.<sup>19</sup>

---

17 Nursal, *loc.cit*

18 Gaffar, 1992, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party*, hal.191

19 King and Matland, 2003, *Sex And The Grand Old Party (An Experimental Investigation of the Effect of Candidate Sex on Support for a Republican Candidate)*, hal. 596

Analisis perilaku pemilih sebagaimana dikatakan Campbell, et.al. (1960) sering membuat suatu perbedaan antara kekuatan “jangka panjang” dan “jangka pendek” yang mempengaruhi keputusan memilih dalam pemilihan presiden. Kekuatan jangka panjang merefleksikan pertimbangan-pertimbangan dan informasi yang tersedia untuk pemilih sebelum kampanye presiden dimulai. Kekuatan jangka panjang biasanya mengacu pada sikap politik, (misal: identifikasi partai dan pilihan ideologi) dan faktor demografis (misal: ras, keanggotaan religius / agama, dan keanggotaan serikat pekerja) yang kesemuanya relatif stabil dalam perjalanannya. Kekuatan jangka panjang termasuk juga catatan (*record*) masing-masing kandidat yang sebelumnya pernah duduk dalam pemerintahan, misal: anggota kongres, gubernur, atau presiden yang sedang berusaha untuk terpilih kembali. Periode ketika duduk dalam pemerintahan disebut sebagai “*long campaign*”, untuk menunjukkan arti penting dalam pemilihan berikutnya (Box-Steffensmeier and Franklin, 1995). Kekuatan jangka panjang ini menentukan keputusan pemilih dan sering mengarahkan pemilih untuk mengembangkan sebuah pola kebiasaan dalam memilih partai yang sama setiap empat tahun.<sup>20</sup>

Sebaliknya, kekuatan jangka pendek merujuk secara spesifik pada kampanye dan peristiwa-peristiwa terkini, dan tidak menyukai partai yang sama setiap pemilihan. Secara tradisional, sikap atas kandidat dan posisi isu sentral menjadi pertimbangan kekuatan jangka pendek dalam keputusan memilih karena kandidat dan isu-isu yang menonjol berubah

---

<sup>20</sup> Box-Steffensmeier, Janet M., and Kimball, David, 1999, *The Timing of Voting Decisions in Presidential Campaigns*, hal. 1

dari pemilihan ke pemilihan berikutnya. Faktor-faktor jangka pendek lainnya meliputi diskusi dengan anggota keluarga atau rekan kerja pada masa kampanye, penelaahan atas iklan kampanye, atau media media kampanye lainnya.<sup>21</sup>

Pilihan adalah mengenai komitmen, memilih antara dua atau lebih kandidat, dan sering terbawa bersamanya (baik sadar / tidak sadar) suatu pertimbangan tentang mengapa salah satu terpilih di antara yang lain. Dalam hal ini, pilihan adalah suatu pengambilan tindakan, yaitu memutuskan. Pertimbangan, di lain pihak, tidak menyiratkan tindakan di dalamnya ataupun menyarankan suatu kebutuhan untuk membenarkan satu pilihan atas pilihan yang lain. Pertimbangan lebih sederhana daripada pilihan. Pertimbangan adalah bagaimana mengevaluasi suatu objek dalam beberapa skala. Dapat ditunjukkan bahwa beberapa keputusan sering dibuat tanpa banyak pertimbangan. Keputusan secara mendadak, sebagai contoh, atau *standing decisions* (misal: memilih berdasarkan partisan) tidak memerlukan evaluasi yang sebenarnya sebelum dibuat.<sup>22</sup>

### **2.1.3 Beberapa Variabel Penjelas tentang Perilaku Pemilih**

Penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis dan domain kognitif. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan latar belakang dan permasalahan penelitian ini. Asumsi awal yang mendasari penelitian ini di antaranya adalah (1) apabila pemilih mempunyai penilaian yang baik mengenai citra kandidat, maka

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Lau, Richard R., and Redlawsk, David P., 2006, *How Voters Decide: Information Processing during Election Campaigns*, p.160

preferensi pemilih akan jatuh pada kandidat yang memiliki citra terbaik; (2) apabila pemilih tidak memiliki penilaian yang utuh, maka mereka akan menggunakan ikatan emosionalnya dengan partai dan memilih kandidat yang dicalonkan partai; dan (3) apabila pemilih tidak memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi kandidat maka kampanye sebagai sarana untuk mempengaruhi pemilih akan berperan untuk mengarahkan preferensi pemilih. Adapun uraian beberapa variabel penjelas tentang perilaku pemilih yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Citra Kandidat**

*Policy* yang sesuai dengan aspirasi pemilih tidak otomatis membentuk makna politis yang menjadi referensi pemilih dalam menetapkan pilihannya. Siapa yang berada di balik *policy* tersebut sangat menentukan pembentukan makna politis. Bahkan *person* atau figur kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan dibandingkan dengan *policy*. Hal ini berkaitan proses pembentukan keyakinan para pemilih, bahwa para pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur manusia. Orang lebih mudah terinformasi oleh fakta mengenai manusia dibandingkan *policy*.<sup>23</sup>

Berikut ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum mengenai kandidat politik dan keterkaitan citra kandidat tersebut dengan perilaku pemilih:

---

23 Nursal, *op.cit*, hal. 206

## 1) Kandidat Politik

Seorang kandidat adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan menilai dan menimbang kandidat mana yang kiranya akan berpihak dan mewakili suara mereka.<sup>24</sup>

Politikus selalu memasarkan dan dipasarkan. Mereka ingin masuk berita utama, mencium bayi, menghadiri pesta, dan menyewa biro iklan untuk membentuk citra. Dewasa ini, pemasar politik memberikan saran pada para kandidat tentang apa yang harus dikenakan, dimana harus berbicara, apa yang boleh (dan tidak boleh) diucapkan, siapa yang harus dikunjungi, dan sebagainya. Tindakan kandidat di muka umum selalu direncanakan terlebih dahulu, mirip posisi rak dan kemasan produk yang dirancang sebaik mungkin. Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah bahwa pemilihan akan dimenangi oleh partai yang memiliki anggaran pemasaran yang lebih besar, dan bukan kandidat yang lebih baik.<sup>25</sup>

Kualitas kandidat dapat dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut: (1) kualitas instrumental, yaitu kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial, berkaitan dengan kemampuan untuk menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian, dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran objektif tertentu, dan kompetensi fungsional, terkait dengan keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas; (2) faktor simbolis, yang meliputi prinsip-prinsip hidup maupun nilai-nilai dasar yang dianut oleh seorang kandidat, aura emosional, aura inspirasional, dan aura sosial; (3) fenotipe optis, yakni

---

24 Bohnet, et.al dalam Firmanzah, *op.cit*, hal. 206

25 Kotler, 2006, *According to Kotler*, hal.203

penampakan visual seorang kandidat yang terdiri dari faktor pesona fisik, faktor kesehatan, dan gaya penampilan.<sup>26</sup>

## 2) Citra Kandidat dan Perilaku Pemilih

Terdapat bukti bahwa kandidat secara signifikan mendapatkan suara pemilih. Walaupun tingkatan dukungan terhadap partai mungkin tinggi di dalam korelasi antar pemilihan, namun ditemukan sedikit pertanda dari beberapa pola “*uniform swing*” (Gallagher, 1990, 1993).<sup>27</sup>

Namun terdapat suatu literatur yang signifikan dan berkembang yang menyatakan bahwa kandidat-kandidat itu sendiri adalah sumber yang penting untuk mendapatkan suara di beberapa Negara dan beberapa pemilihan yang signifikan. Kandidat-kandidat dapat menarik dukungan untuk ‘siapakah mereka’, atau ‘apa yang telah mereka lakukan’, atau ‘apa yang akan mereka lakukan’, bukan hanya atas pertimbangan partai yang mengusung mereka. Ada beberapa pertimbangan yang bagus untuk itu. Di bawah sistem pemilihan tertentu, kandidat secara individu memiliki dorongan yang kuat untuk membedakan diri mereka sendiri dari yang lain dalam partai mereka dan berguna untuk mengembangkan “*personal following*”. Dalam suatu kutipan artikel, Carey dan Shugart (1995) menjelaskan bagaimana stimulus ini akan lebih tinggi dimana suara berdasarkan kandidat bukan partai dan dimana suara secara signifikan berpengaruh tidak hanya kepada partai pemenang kursi namun diikuti oleh pengaruh kandidat (lihat Katz, 1986; Marsh, 1985b).<sup>28</sup>

---

26 Nursal, 2004, *op.cit*, hal. 207

27 Marsh, Michael, 1999, *Candidate Centred but Party Wrapped: Campaigning in Ireland under STV*, p.3

28 Marsh, 2005, *Candidate or Parties? Objects of electoral choice in Ireland*, p.3

Newman (1999) dalam bukunya yang lain, *The Mass Marketing of Politics, Democracy in Age of Manufacture Image*, menegaskan bahwa setiap individu dalam perannya sebagai pemilih, selalu berusaha untuk melihat secara utuh sang kandidat.<sup>29</sup>

Menggambarkan perbedaan antara individu dan kualitas strategis bukan berarti keduanya tidak terkait, keduanya mungkin berkontribusi secara langsung pada prospek pemilihan dari kandidat yang potensial dan *incumbents* (Stone et.al, 2006; Stone dan Maisel, 2003). Mereka seharusnya saling berhubungan juga. Jika para pemilih memperhatikan kualitas personal dari kandidat untuk menjabat, maka para penyokong dana dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya kandidat perlu untuk menawarkan suatu kampanye yang efektif. Jadi, kualitas strategi dari kemampuan untuk menggalang dana barangkali bergantung pada kualitas individu, misal: integritas, karena integritas harus meningkatkan kemampuan potensial kandidat untuk menarik dukungan dari para penyokong dana.<sup>30</sup>

Citra kandidat (*candidate personality*) dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Nursal (2004) yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Pada Pemilu Amerika tahun 1980, misalnya, Reagan memiliki citra sebagai “pemimpin yang kuat”, sementara John Glen pada tahun 1984 mencoba mengembangkan citra sebagai “seorang pahlawan”. Beberapa sifat yang

---

29 Sugiono, 2005, *Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Perspektif Political Marketing*, hal. 7

30 Stone, et.al, 2006, *Candidate Quality and Voter Response in U.S. House Elections*, hal.3

juga merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, welas-asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Popkin dan Dimock (2000, 1999) mempertunjukkan bahwa jenis informasi “pintas” yang digunakan pemilih adalah sangat dependen atas tingkat pengetahuan politis yang dimiliki sebelumnya. Riset empiris Popkin dan Dimock’s (2000) menemukan bahwa semakin sedikit tingkat pengetahuan seseorang, semakin mungkin mereka merasa jika isu kebijakan sebagai sesuatu yang mengancam. Selanjutnya, para pemilih yang memiliki sedikit informasi ini, akan lebih sulit dalam menempatkan isu-isu kebijakan asing di dalam konteks politis yang lebih luas. Temuan lain dari Popkin dan Dimock (1999) bahwa para pemilih yang memiliki lebih sedikit informasi politik cenderung lebih suka untuk mengevaluasi seorang kandidat berdasar pada karakteristik pribadi mereka daripada posisi kebijakannya.

## **B. Tingkat Identifikasi Partai**

Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seazas, sehaluan, dan setuju terutama di bidang politik.<sup>32</sup> Partai politik telah menjadi ciri penting politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun. Dalam hal ini, partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan sistem kepartaian akan sangat mempengaruhi batas-batas sampai dimana partisipasi tersebut

---

31 *Op.cit*, hal. 71

32 Marbun, BN, 2003, *Kamus Politik*, hal. 402

dapat diperluas.<sup>33</sup>

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Partai-partai politik dapat menjalankan berbagai fungsi (Bartolini dan Mair, 2001). Mereka diperlukan untuk membangun dan mengumpulkan dukungan diantara koalisi yang besar dari berbagai organisasi masyarakat dan kelompok kepentingan; untuk mengintegrasikan berbagai konflik tuntutan ke dalam program-program kebijakan terpadu; untuk menyeleksi dan melatih para kandidat legislatif dan pemimpin politik; untuk memberikan para pemilih pada berbagai pilihan di antara banyak *governing team* dan kebijakan; dan jika terpilih dalam jabatan, untuk mengorganisir proses pemerintahan dan berdiri bersama bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam pemilihan berikutnya. Demokrasi perwakilan adalah mustahil tanpa kompetisi multipartai. Partai-partai politik tersebut berfungsi secara unik dan membuat suatu landasan untuk masyarakat demokratis. Daftar panjang fungsi-fungsi potensial partai politik dapat diringkas sebagaimana berikut: (1) pengintegrasian dan mobilisasi warga negara; (2) artikulasi dan

---

33 Huntington dalam Winarno, Budi, 2007, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, hal. 97

34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

agregasi kepentingan; (3) formulasi kebijakan publik; (4) rekrutmen atas pimpinan politik; (5) organisasi parlemen dan pemerintah.<sup>35</sup>

Berikut ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum mengenai identifikasi partai dan keterkaitan identifikasi partai tersebut dengan perilaku pemilih:

### **1) Identifikasi Partai**

Identifikasi kepartaian adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologis tanpa pengakuan formal atau dinyatakan dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk mendukung suatu partai. Identifikasi partai telah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa dewasa.<sup>36</sup>

Menurut Campbell (1960), identifikasi kepartaian adalah ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu secara terus menerus tanpa perlu pengakuan legal atau bukti-bukti formal. Bahkan, tanpa diperlukan suatu catatan bahwa orang-orang tersebut secara konsisten mendukung partai tertentu. Identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu memerlukan waktu yang lama melalui proses sosialisasi politik berupa transformasi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus. Dalam masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai kepatuhan kepada atasan, orang tua, dan lain-lain, maka ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu tidak

---

35 Norris, Pippa, 2005, *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Development in Party Communications*, p.3

36 Gaffar, Afan, 1992, *op.cit*

dapat dilepaskan dari pengaruh sikap pimpinan masyarakat terhadap partai politik tersebut.<sup>37</sup>

## **2) Tingkat Identifikasi Partai dan Perilaku Pemilih**

Peranan identifikasi partai mungkin menurun atau kurang signifikan untuk menjelaskan perilaku pemilih apabila faktor isu dan kandidat lebih dominan. Tetapi apabila individu tidak memiliki persepsi yang utuh tentang isu dan prestasi partai atau kandidat, maka peranan identifikasi partai akan sangat kuat.<sup>38</sup>

Pengaruh partai politik yang menurun dibenarkan oleh banyak pengamat terutama di Barat.<sup>39</sup> Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, menurut Duverger (1954), antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagipula banyak masalah baru, seperti lingkungan dan hak perempuan, yang kurang mendapat perhatian. Kritik yang dilontarkan ialah bahwa anggota-anggotanya sering korup, cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, dan mengejar / mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat kekuasaan.<sup>40</sup>

Sejarah identifikasi partai telah menjadi suatu konsep ekstensif

---

37 Kristiadi, *op.cit*, hal. 57

38 *Ibid*

39 Budiarto, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal.420

40 *Ibid*.

yang digunakan dalam hubungannya dengan pilihan pemilih (Belknap dan Campbell, 1952). Dasar pemikiran untuk itu telah dianggap stabil, menjadi penyebab utama pemilih untuk memilih (Campbell, 1960), dan kemampuannya untuk meramalkan secara lebih baik mengenai hasil pemilihan (Campbell and Stokes, 1959).<sup>41</sup>

Platform yang lemah mengindikasikan bahwa hubungan antara partai-partai dan para pemilih mengendur dan kurang mengakarnya partai dalam masyarakat. Dalam suatu survei nasional, Asia Foundation menemukan bahwa sebagian besar hubungan antara para pemilih dan partai-partai adalah berdasarkan 'emosional' dan bukan atas dasar pengetahuan yang berarti mengenai platform spesifik dari partai-partai. Tidak meratanya penyebaran pilihan-pilihan partai, selain daripada yang berdasar atas identifikasi emosional, sebagian besar dapat dijelaskan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia tidak mengetahui perbedaan-perbedaan di antar partai-partai politik yang ada. Dua pertiga pemilih (66%) mengatakan bahwa mereka tidak tahu perbedaan-perbedaan yang ada di antara partai-partai atau bahkan mereka tidak tahu sama sekali (Asia Foundation, 2003:100). Setelah pemilu, pemilih di Indonesia sulit untuk tertarik pada kerja partai sehari-hari dan secara umum salah informasi dalam isu kebijakan. Kampanye kekurangan "isi". Sebagian besar pemilih tidak memilih berdasarkan atas platform partai.<sup>42</sup>

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh identifikasi

---

41 Hinkle, James R., 2004, *Causes of Voter Choice: An Analysis of the 2004 Presidential Election and the Choice of American Voters to re-elect George W. Bush to the Office of President*, hal. 7

42 Ufen, Andreas, 2006, *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinisation'*, hal. 24

partai di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah meskipun dunia barat sudah mulai meragukan “kekuatannya” sebagaimana pernyataan berikut ini:

*Consequently, there is no clear expectation about the strength of the relationship between party identification and party and leader ratings, and there is no clear standard by which to assess the traditional and new measures of party identification. There is an expectation, however, about the shape of that relationship: the more strongly one identifies with a party, the more positive the rating of the party and of its leader. In other words, the relationship should be monotonic (see Petrocik, 1974; Keith et al., 1986).<sup>43</sup>*

### **C. Efektivitas Kampanye**

Berikut ini akan dikemukakan mengenai gambaran umum mengenai kampanye politik dan keterkaitan efektivitas kampanye tersebut dengan perilaku pemilih:

#### **1) Kampanye Politik**

Sebagian besar literatur dalam marketing politik membahas cara sebuah institusi politik dalam melakukan promosi (*promotion*) ide, *platform* partai dan ideologi selama kampanye Pemilu.<sup>44</sup> Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi.<sup>45</sup>

Kampanye merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih. Perubahan ini ingin dicapai melalui himbauan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik untuk menjatuhkan pilihan

---

43 Blais, et.al, 2001, *Measuring Party Identification: Britain, Canada and the United States*, p. 13

44 Firmanzah, *op.cit*, hal. 206

45 Nimmo dalam Setiyono, Budi, dkk, 2008, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum*, hal.52

politiknya pada partai tertentu. Kampanye Pemilu dapat pula merupakan komunikasi politik dari bawah ke atas bila isi kampanye tersebut mengadakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk dukungan maupun kritikan. Namun demikian, kampanye juga bisa merupakan arus komunikasi dari atas ke bawah apabila yang menjadi juru kampanye adalah pendukung pemerintah. Kampanye juga dapat pula merupakan arus komunikasi antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan birokrat. Cara-cara penyampaian pesan ajakan dan himbauan juga memainkan peranan penting. Apabila penyampaiannya tidak menarik, sebuah pesan sulit menghasilkan perubahan, namun sebaliknya bila isi pesan itu sendiri kurang menarik akan tetapi disampaikan dengan minat dan selera massa, ada kemungkinan bahwa pesan tersebut menghasilkan perubahan yang diinginkan.<sup>46</sup>

Kampanye dianggap sebagai sarana pendidikan politik warga negara yang mempunyai fungsi memberikan informasi tentang isu-isu politik yang menonjol, menawarkan gagasan alternatif untuk diambil sebagai kebijakan nasional, dan sekaligus menawarkan calon-calon yang siap melaksanakan kebijakan tersebut seandainya terpilih. Dalam kerangka pemikiran Campbell (1954), kampanye merupakan periode atau proses yang sangat dekat dengan pemilih untuk menentukan calon atau partai politik yang dipilih.<sup>47</sup>

---

46 Rauf dalam Kamaruddin, 2004, *Pengaruh Kampanye terhadap Pilihan Politik dan Perilaku Pemilih Birokrasi*, hal.13-14

47 Rosenbaum dalam Kristiadi, Josef, 1993, hal. 68

## 2) Efektivitas Kampanye dan Perilaku Pemilih

*Event* kampanye dapat menciptakan momentum bagi kandidat (Bartels, 1988) dan menyebabkan fluktuasi opini publik selama pemilihan umum (Holbrook, 1996).<sup>48</sup>

Di masa lalu, informasi diberikan kepada pemilih sebagian besar melalui partai-partai politik dan banyak dari informasi ini mempunyai suatu *partisan spin*. Namun sekarang, informasi sebagian besar datang secara langsung dari para kandidat kepada para pemilih dalam bentuk iklan-iklan televisi. Sementara bentuk lain dari kontak langsung dengan para pemilih telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tidak dapat disangsikan lagi bahwa suatu peningkatan porsi informasi yang disajikan oleh para kandidat kepada pemilih melalui iklan televisi (Iyengar and Ansolabehere, 1995).<sup>49</sup>

Semenjak para pemilih cenderung untuk tidak mengambil resiko dan tidak menyukai untuk mendukung para kandidat yang tidak dikenal (lihat Alvarez dan Franklin, 1994; Bartels, 1986), informasi menjadi sebuah komoditas kampanye. Dengan dikenal diharapkan akan disukai, dan kampanye menghasilkan banyak cara untuk “dikenal” dalam bermacam-macam persoalan seperti latar belakang keluarga, dinas militer, dan rincian mengenai proposal kebijakan. Ketika kampanye telah berkembang ke dalam urusan media, fungsi informasi dari kampanye telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Presentasi-presentasi media mengenai kandidat, terutama kepercayaan mereka pada *the thirty second*

---

48 Hinkle, James R., *op.cit.*, hal.5

49 Alvarez, R.Michael, and Roberts, Reginald, 1996, *Campaign Advertising and Candidate Strategy*, hal.1

*televised advertisement*, memperlihatkan bahwa semuanya terlalu “dangkal” sehingga diduga hal ini (kampanye yang “dangkal”) akan melahirkan para pemilih yang “dangkal” pula.<sup>50</sup>

Kecenderungan seorang pemilih dalam kampanye tingkat nasional atau kampanye negara bagian utama adalah suatu fungsi dari banyak variabel, termasuk banyak faktor-faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan yang secara tidak langsung mempengaruhi kecenderungan pemilih. Disebutkan dengan istilah sederhana  $V = f(E, P, ID, i)$  dimana kecenderungan pemilih  $V$  adalah suatu fungsi dari lingkungan ( $E$ ) yang umumnya tidak dapat dikendalikan, landasan dukungan yang diberikan oleh partai dan landasan organisasi sang kandidat ( $P$ ) identitas dan pengenalan sang kandidat di antara para pemilih ( $ID$ ), dan orientasinya terhadap masalah ( $i$ ), yaitu pandangan pemilih tentang sang kandidat yang menghubungkannya dengan posisi-posisi tertentu mengenai sejumlah masalah-masalah.<sup>51</sup>

Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kampanye pemilu melalui aktivitas pengiklanan dan debat publik di televisi meningkatkan partisipasi pemilih (Franklin, 1991). Penelitian yang dilakukan Huckfeldt *et al.* (2000), menunjukkan bahwa kampanye pemilu meningkatkan keterjangkauan, kepastian, dan akurasi pesan politik yang disampaikan kontestan kepada pemilih.<sup>52</sup>

Kampanye merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

---

50 Iyengar, S., and Simon, A., 1999, *New Perspectives and Evidence on Political Communication and Campaign Effects*, hal.3

51 Steinberg, Arnold, 1981, *Kampanye Politik dalam Praktek*, hal.373

52 Firmanzah, 2007, *op.cit.*, hal. 269

peluang kandidat untuk menang pemilu di Eropa. Berdasarkan peringkat, faktor-faktor tersebut adalah: (1) *personality / image*; (2) kemampuan berkomunikasi melalui media; (3) penampilan di media, khususnya televisi; (4) pesan sentral kampanye; (5) kualitas kepemimpinan; (6) kompetensi isu; (7) kemampuan retorika / bicara; (8) penyatuan dukungan partai; (9) *looks and personal habits*; (10) profesionalitas konsultan media dan televisi; dan (11) pengalaman politik.<sup>53</sup>

Efektivitas kampanye merupakan konsep '*relative*' yang turut mempengaruhi pemilih bersama faktor-faktor lain sebagaimana pernyataan berikut ini:

*Social psychological models of attitude strength posit that how an attitude is used is moderated by how strong (i.e. accessible, salient, or stable) it is (Petty and Krosnick 1995). Unlike, Alvarez's uncertainty theory, attitude strength is often a relative concept. That is, when determining what attitudes to rely on when evaluating something, a person is more likely to use the ones that are strong than those that are weak. While the campaign is likely to increase the policy attitude's strength, it may not do so to the same degree as other, competing considerations such as the personality traits. For instance, Johnston, Blais, Brady, and Crête's (1992) examination of the 1988 Canadian election find that party, policy, and personality are altered by the content of the campaign. As one is primed, it increases in importance.*<sup>54</sup>

## **2.2 Pengembangan Model Penelitian**

### **2.2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mereplikasikan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. Adapun secara ringkas beberapa hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

---

<sup>53</sup> Nursal, *op.cit*, hal. 75

<sup>54</sup> Peterson, 1999, *Campaign Timing and Vote Determinants*, p.5

**Tabel 2.1**  
**Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu (Bagian Pertama)**

No	Judul dan Peneliti	Hasil
1	<p><b>Does the Local Candidate Matter?</b> (Blais, et.al, 2002)</p>	<p><i>We show that 44 percent of Canadian voters formed a preference for a local candidate and that this preference had an effect on vote choice independent of how people felt about the parties and the leaders. Although preference for a local candidate had a similar effect on urban and rural voters, as well as on voters of varying degrees of sophistication, the findings revealed that rural voters and more sophisticated voters were more likely to have formed a preference for a local candidate. As a consequence, the local candidate was more likely to be a decisive consideration for more sophisticated rural voters.</i></p>
2	<p><b>Candidate Quality and Voter Response in U.S. House Elections</b> (Stone, et.al, 2006)</p>	<p><i>We find that awareness tends to be responsive to candidates' strategic quality, and that incumbent evaluation is remarkably responsive to variation in personal quality, even taking into account the quality of challenger emergence. These and other findings appear to support a more positive view of citizen capacity than is common in the congressional elections literature, especially in light of the electoral security of House incumbents.</i></p>
3	<p><b>Leadership, Party And Religion: Explaining Voting Behavior In Indonesia</b> (Liddle, and Mujani, 2007)</p>	<p><i>Analysis of survey data for four Indonesian elections demonstrates that leadership and party ID are the most important determinants of the vote for parties in the legislative elections and for candidates in the presidential elections.</i></p>
4	<p><b>Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum 1971 – 1987</b> (Kristiadi, 1993)</p>	<p>Pertama, interaksi sosial antara pimpinan dan anggota masyarakat masih paternalistik. Kedua, identifikasi kepartaian masyarakat cenderung mengikuti identifikasi kepartaian tokoh panutannya. Ketiga, struktur sosial dan media massa tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku memilih seseorang. Oleh karena itu, panutan dan identifikasi kepartaian adalah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku memilih seseorang.</p>

**Tabel 2.2**  
**Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu (Bagian Kedua)**

<b>No</b>	<b>Judul dan Peneliti</b>	<b>Hasil</b>
5	<p style="text-align: center;"><b>Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System</b></p> <p style="text-align: center;">(Gaffar, 1992)</p>	<p><i>The santri people will prefer to vote for an Islamic party, while the abangan are inclined to vote for a party that does not advocate and promote Islamic beliefs. For the PDI voters, socio-religious orientation gave relatively more contribution than other variables, followed by leadership, party ID and partisan choice. The least discriminatory variable for the PDI voters is class. Among the Golkar voters, leadership is the strongest discriminant. The socio-religious orientation variable is also quite strong, especially compared to party ID / partisan choice and class. For the Islamic party voters, it is the socio-religious that the strongest discriminant, followed by party ID and partisan choice, while class discriminant least.</i></p>
6	<p style="text-align: center;"><b>Candidates or Parties? Objects of electoral choice in Ireland</b></p> <p style="text-align: center;">(Marsh, 2005)</p>	<p><i>While aggregate evidence from election results has pointed to the primary importance of party, survey data has suggested that close to a majority of voters are primarily candidate-centred. This article uses an extensive set of instruments contained in the 2002 Irish election study to explore the extent to which voters decide on candidate-centred factors as opposed to party-centred ones. It shows that a substantial minority do decide on the basis of candidate factors, and typical models of Irish electoral behaviour have not accommodated the heterogeneity that results from this mix of motives.</i></p>

**Tabel 2.3**  
**Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu (Bagian Ketiga)**

No	Judul dan Peneliti	Hasil
7	<p><b>Kampanye dan Perilaku Pemilih dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta</b></p> <p style="text-align: right;">(LSI, 2007)</p>	<p>Pertama, pemilih golput masih banyak. Kedua, alasan memilih. Pemilih memilih gubernur DKI karena kemampuan kandidat (28,5%), kepribadian kandidat (19,5%), program yang ditawarkan (18,1%), didukung parpol pilihan saya (6,9%), dan kesamaan suku dan agama (7,5%). Ketiga, pemilih loyalis parpol sesuai pilihan Pileg 2004. Pemilih PKS ternyata lebih loyal ketimbang pemilih partai non-PKS. Keempat, pemilih mengenal dan suka namun belum tentu mendukung kandidat. Kelima, ada pemilih yang kurang rasional dan mudah memaklumi akibat strategi jitu <i>incumbent</i>. Keenam, waktu pemilih menetapkan pilihan. Sebanyak 44.2% pemilih menetapkan pilihan jauh sebelum kampanye. Ketujuh, pemilih kurang terpengaruh kampanye. Kedelapan, media kampanye yang mudah diakses pemilih.</p>
8	<p><b>Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun 2005 di Kecamatan Pelabuhanratu, Cisaat dan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi)</b></p> <p style="text-align: right;">(Kushartono, 2006)</p>	<p>Pertama, identifikasi partai politik hanya berperan pada saat pencalonan Bupati / Wakil Bupati, setelahnya partai politik pengaruhnya tidak begitu besar. Kedua, kandidat berinteraksi langsung dengan pemilih. Ketiga, isu yang diusung pasangan calon menjadi hal yang cukup penting. Keempat, pemilih dengan kondisi sosial ekonomi yang mapan akan melihat figur kandidat dan isu yang ditawarkan. Sebaliknya, pemilih dengan kondisi sosial ekonomi rendah, melihat kepada "keuntungan" sesaat yang diperoleh.</p>

### 2.2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>55</sup> Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 4 (empat) pernyataan, yaitu:

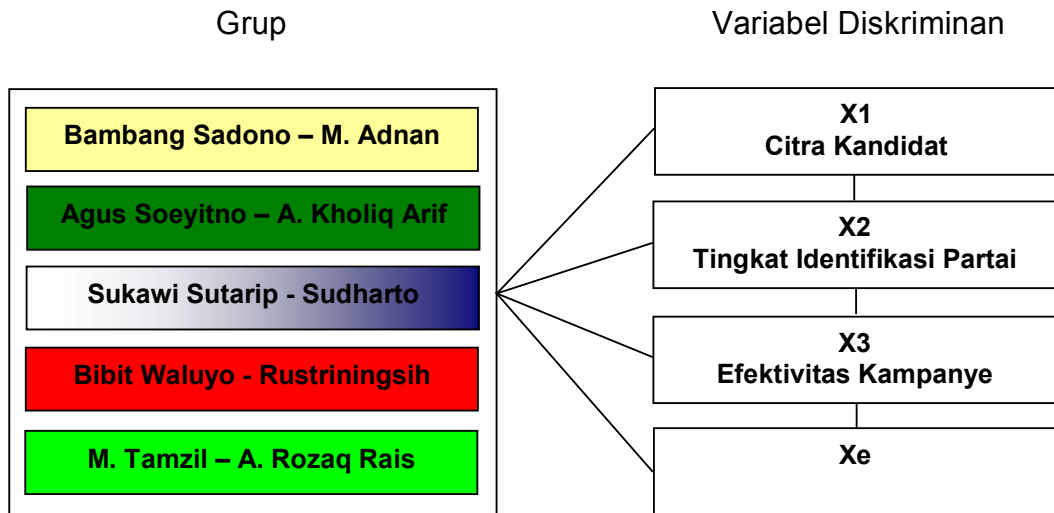
<sup>55</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 64

- H<sub>1</sub> : *Citra kandidat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih,*  
yaitu semakin baik citra kandidat maka semakin banyak pula pemilih yang memberikan suaranya kepada pasangan kandidat tersebut
- H<sub>2</sub> : *Tingkat identifikasi partai berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih,*  
yaitu semakin tinggi tingkat identifikasi pemilih pada suatu partai maka semakin banyak pula pemilih yang memberikan suaranya pada pasangan kandidat yang diusung partai tersebut.
- H<sub>3</sub> : *Efektivitas kampanye berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih,*  
yaitu semakin efektif kampanye yang dilakukan maka semakin banyak pula pemilih yang memberikan suaranya kepada pasangan kandidat tertentu.
- H<sub>4</sub> : *Citra kandidat, tingkat identifikasi partai, dan efektivitas kampanye secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih,*  
yaitu ketiga variabel yang digunakan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemilih

### **2.2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis**

Gambaran dari kerangka pemikiran teoretis penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoretis**



#### 2.2.4 Definisi Konsep dan Operasional Variabel

##### A. Definisi Konsep Variabel

Definisi konsep dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku pemilih adalah pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Variabel ini merupakan variabel diskriminan dimana pemilih telah menetapkan keputusannya pada salah satu pasangan calon.
- b. Citra kandidat adalah sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat oleh pemilih.
- c. Tingkat identifikasi partai adalah besarnya ikatan emosional individu dengan suatu partai tertentu.
- d. Efektivitas kampanye adalah keberhasilan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih.

## **B. Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel yang diteliti perlu didefinisikan secara operasional untuk mempermudah dan membatasinya. Adapun definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku pemilih, yaitu apakah responden memberikan suaranya pada (a) Bambang Sadono - M. Adnan; atau (b) Agus Soeyitno - A. Kholif Arif; atau (c) Sukawi Sutarip - Sudharto; atau (d) Bibit Waluyo - Rustriningsih; atau (e) M. Tamzil - A. Rozaq Rais. Variabel ini menggunakan skala nominal, merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, atau kelompok dari suatu subyek.
- b. Variabel citra kandidat menggunakan beberapa dimensinya, yaitu kepercayaan, kepedulian, kejujuran, kecerdasan, ketulusan, dan terpenuhinya persyaratan. Variabel ini diukur dalam skala pengukuran 1 sampai dengan 5 dengan menggunakan kuesioner sebagai berikut:  
(1) STS / Sangat Tidak Setuju; (2) TS / Tidak Setuju; (3) N / Netral; (4) S / Setuju; (5) SS / Sangat Setuju
- c. Variabel tingkat identifikasi partai diukur dengan tiga pertanyaan sebagai berikut: apakah ada partai yang dirasa dekat oleh Anda? Jika YA, partai manakah itu? Seberapa dekatkah Anda dengan partai tersebut? Sangat dekat, cukup dekat, kurang dekat? Pada pertanyaan keempat dan seterusnya merupakan pertanyaan eksperimen, yaitu apakah Anda merasa lebih dekat pada suatu partai dibandingkan dengan partai lainnya? Jika YA, partai manakah itu? Pengukuran yang

digunakan adalah pengukuran pada masa sekarang sebagaimana digunakan Gallup dan *experimental questions* dari Blais, et.al (2001)

- d. Variabel efektifitas kampanye juga diukur dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5 sebagaimana variabel citra kandidat. Adapun beberapa dimensi yang digunakan adalah kepercayaan, ketertarikan pemilih, informatif, perancangan, mudah diikuti, dan mendapat perhatian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: <sup>1</sup>

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
- 2) Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS dan jumlah responden.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah suatu kelompok yang memiliki karakteristik serupa.<sup>2</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kota Semarang yang telah terdaftar sebagai pemilih, yaitu sebanyak 1.087.077 orang yang terbagi dalam 16 (enam belas) kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup> Umar, Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, hal. 64

<sup>2</sup> Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, hal. 22

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS dalam Pemilihan**  
**Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**  
**di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS RIIL
		L	P	JML	
1	2	3	4	5	6
1	Semarang Barat	55.696	59.554	115.250	258
2	Mijen	18.345	18.672	37.017	85
3	Gunungpati	25.758	25.755	51.513	123
4	Tugu	10.953	11.576	22.529	50
5	Semarang Utara	44.609	47.814	92.423	229
6	Semarang Tengah	27.079	29.442	56.521	127
7	Candisari	28.367	30.365	58.732	128
8	Ngaliyan	41.513	41.894	83.407	217
9	Gajahmungkur	20.744	22.023	42.767	101
10	Semarang Selatan	27.767	29.394	57.161	131
11	Banyumanik	42.500	45.364	87.864	237
12	Genuk	28.990	29.518	58.508	127
13	Semarang Timur	29.556	32.426	61.982	133
14	Gayamsari	24.632	25.735	50.367	124
15	Tembalang	47.288	48.291	95.579	257
16	Pedurungan	57.257	58.200	115.457	274
	<b>J U M L A H</b>	<b>531.054</b>	<b>556.023</b>	<b>1.087.077</b>	<b>2.601</b>

Sumber: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, 2008

Berdasarkan data dari Sekretariat KPU Kota Semarang TPS yang disediakan untuk pemilih sebanyak 2.601 termasuk 17 TPS khusus di 12 kelurahan. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data dari 17 TPS tersebut sehingga jumlah TPS yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2.584 TPS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Populasi *Primary Sampling Unit* (PSU)**  
**Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS RIIL	JUMLAH TPS KHUSUS	POPULASI (TPS)
1	2	3	4	5
1	Semarang Barat	258	1	257
2	Mijen	85	-	85
3	Gunungpati	123	-	123
4	Tugu	50	-	50
5	Semarang Utara	229	-	229
6	Semarang Tengah	127	3	124
7	Candisari	128	-	128
8	Ngaliyan	217	4	213
9	Gajahmungkur	101	1	100
10	Semarang Selatan	131	3	128
11	Banyumanik	237	1	236
12	Genuk	127	2	125
13	Semarang Timur	133	-	133
14	Gayamsari	124	-	124
15	Tembalang	257	2	255
16	Pedurungan	274	-	274
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.601</b>	<b>17</b>	<b>2.584</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi TPS terbesar berada di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Hal tersebut secara otomatis berarti proporsi TPS yang diambil sebagai sampel juga besar / banyak. Pada sub bab berikutnya mengenai sampel penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut.

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>3</sup> Untuk menentukan sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dapat menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

<sup>3</sup> Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, hal. 91

### a. Menentukan Jumlah Sampel Pemilih

Untuk menentukan jumlah sampel pemilih yang akan digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus / persamaan berikut <sup>4</sup>:

$$N = (p \times q) \cdot \frac{Z^2}{E^2}$$

Tabel notasi dan keterangan persamaan di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Notasi dan Keterangan Persamaan Rumus Menentukan Jumlah Sampel Pemilih**

Notasi	Keterangan
Z	Mengacu pada tingkat kepercayaan. Jika tingkat kepercayaan yang dipakai 90%, maka nilai z adalah 1.65. Untuk tingkat kepercayaan 95%, nilai z adalah sebesar 1.96
(p × q)	Variasi proporsi populasi. Proporsi dibagi dalam dua bagian dengan total 100 % (atau 1), yaitu proporsi memilih dan proporsi tidak memilih. Proporsi yang digunakan adalah pada saat keragaman tertinggi terjadi dimana p = 55% atau 0,55 dan q = 45% atau 0,45.
E	Kesalahan sampling yang dikehendaki ( <i>sampling error</i> ), yaitu 5% atau 0,05
N	Jumlah populasi

Hasil perhitungan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$$= (0,55 \times 0,45) \cdot \frac{1,96^2}{0,05^2}$$

$$= 380,31 \approx 380 \text{ responden}$$

---

4 Eriyanto, 1999, *Metodologi Polling: Memberdayakan Suara Rakyat*, hal.126

## b. Menentukan Jumlah Sampel TPS

Ukuran PSU yang kecil menjamin keragaman PSU dalam Kota Semarang tercakup dalam penelitian ini. Adapun ukuran PSU yang digunakan adalah 4 orang / responden di tiap TPS sehingga jumlah sampel TPS-nya  $380 : 4 = 95$  TPS

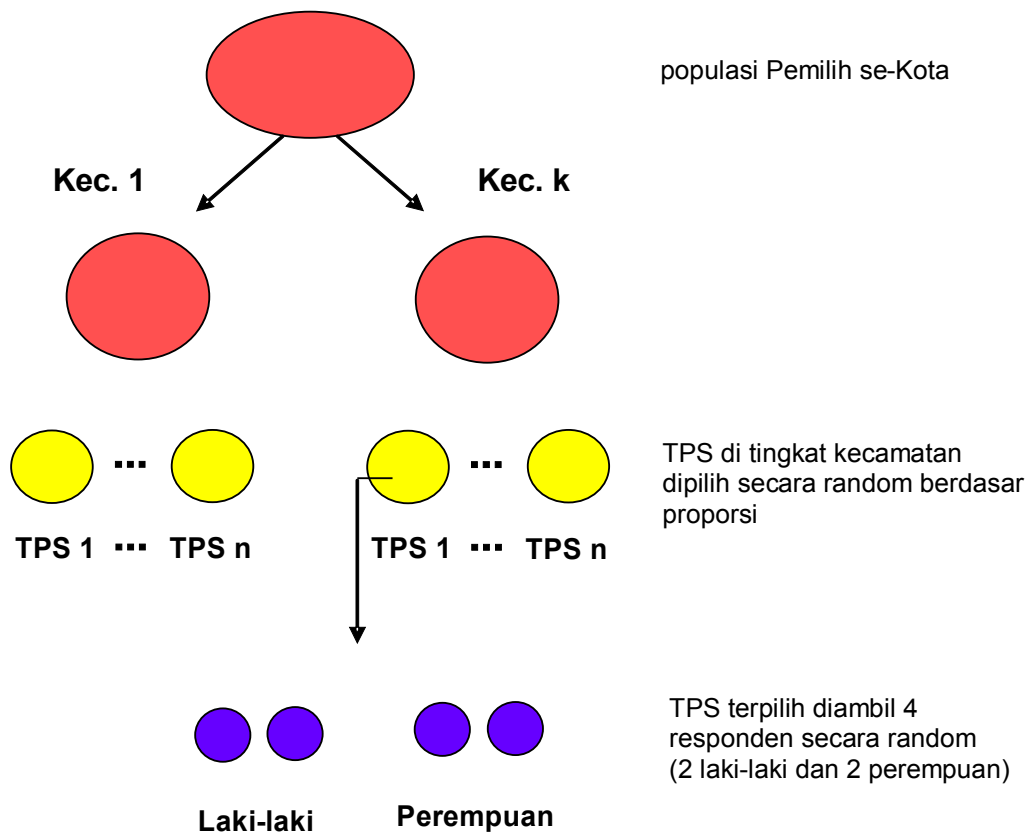
**Tabel 3.4**  
**Rekapitulasi Sampel *Primary Sampling Unit* (PSU)**  
**Tempat Pemungutan Suara (TPS)**

NO	KECAMATAN	POPULASI (TPS)	SAMPEL (TPS)	HASIL RANDOM *)
1	2	3	4	5
1	Semarang Barat	257	9	59,162, 168, 255, 161, 186, 127,194, 25
2	Mijen	85	3	16, 80, 37
3	Gunungpati	123	5	61, 94, 84, 32, 91
4	Tugu	50	2	29, 47
5	Semarang Utara	229	8	97, 228, 198, 218, 12, 202, 42, 45
6	Semarang Tengah	124	5	56, 81, 78, 29, 24
7	Candisari	128	5	114, 6, 54, 102, 95
8	Ngaliyan	213	8	13, 186, 189, 24, 17, 194, 91, 165
9	Gajahmungkur	100	4	82, 97, 57, 46
10	Semarang Selatan	128	5	39, 87, 110, 27, 23
11	Banyumanik	236	8	208, 59, 113, 130, 141, 159, 134, 162
12	Genuk	125	5	63, 11, 21, 16, 100
13	Semarang Timur	133	5	130, 75, 126, 79, 111
14	Gayamsari	124	5	46, 63, 88, 121, 82
15	Tembalang	255	9	80, 139, 254, 226, 93, 41, 171, 217, 153
16	Pedurungan	274	9	119, 57, 145, 270, 246, 55, 242, 247, 272
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.584</b>	<b>95</b>	

\*) Hasil randomisasi menggunakan program Microsoft Excel 2003

Teknik pengambilan sampel secara *twostage random sampling* dipilih dalam penelitian ini. Ilustrasi teknik sampling dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:

**Gambar 3.1**  
**Flow Chart: Twostage Random Sampling**



Adapun untuk distribusi sampel TPS dan jumlah responden di tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Jumlah Responden di masing-masing Kecamatan**

NO	KECAMATAN	PERHITUNGAN			RESPONDEN	
		L	P	TPS		
1	2	3	4	5	6	
1	Semarang Barat	2	2	9	36	
2	Mijen	2	2	3	12	
3	Gunungpati	2	2	5	20	
4	Tugu	2	2	2	8	
5	Semarang Utara	2	2	8	32	
6	Semarang Tengah	2	2	5	20	
7	Candisari	2	2	5	20	
8	Ngaliyan	2	2	8	32	
9	Gajahmungkur	2	2	4	16	
10	Semarang Selatan	2	2	5	20	
11	Banyumanik	2	2	8	32	
12	Genuk	2	2	5	20	
13	Semarang Timur	2	2	5	20	
14	Gayamsari	2	2	5	20	
15	Tembalang	2	2	9	36	
16	Pedurungan	2	2	9	36	
		<b>J U M L A H</b>			<b>95</b>	<b>380</b>

Berdasarkan tabel di atas, sampel terbesar berada di Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan, yaitu sebanyak 36 responden dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Tugu, yaitu hanya 8 responden.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam metode pengumpulan data, yaitu:

## **A. Kuesioner**

Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu warga Kota Semarang yang telah memiliki hak pilih. Dalam hal ini, peneliti mengirimkan kuesioner kepada responden secara tidak langsung melalui perorangan yang telah ditunjuk. Pertanyaan dalam kuesioner bersifat terbuka dan tertutup yang digunakan untuk mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini.

## **B. Studi Pustaka**

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari jurnal-jurnal, literatur-literatur, serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan bahan masukan untuk mendukung penelitian.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

#### **3.4.1 Analisis Deskriptif**

Pada populasi maupun sampel, data-data statistik yang ada dianalisis untuk mengetahui gambaran data secara umum. Analisis deskriptif penelitian ini dapat menggunakan statistik deskriptif, analisis univariate maupun statistik inferensial, bergantung kepada data yang diperoleh.

### 3.4.2 Pengujian Instrumen

#### A. Uji Validitas

Uji validitas atau kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur mampu melakukan fungsi. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor pernyataan dan skor keseluruhan pernyataan responden terhadap informasi dalam kuesioner.<sup>5</sup> Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.<sup>6</sup>

#### B. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.<sup>7</sup> Dalam pengujian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien alpha (*cronbach alpha*). Perhitungan koefisien alpha memanfaatkan bantuan SPSS dan batas kritis untuk nilai alpha untuk mengindikasikan kuesioner yang reliabel adalah 0,60 sebagaimana dikatakan oleh Nunnally (1967) bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60.<sup>8</sup>

---

5 Budi, 2006, *SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik*, hal. 247

6 Ghozali, *op.cit*, hal.46

7 Ibid, hal. 41

8 Lihat Ghozali, *op.cit*, hal.42

Adapun tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha dirinci dalam tabel berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 6.6**  
**Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Alpha**

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 s.d 0,20	Kurang reliabel
> 0,20 s.d 0,40	Agak reliabel
> 0,40 s.d 0,60	Cukup reliabel
> 0,60 s.d 0,80	Reliabel
> 0,80 s.d 1,00	Sangat reliabel

### 3.4.3 Pengujian Hipotesis

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multiple Discriminant Analysis* (MDA) karena variabel dependennya 5 (lima) grup. Adapun beberapa asumsi yang harus terpenuhi dalam MDA ini<sup>10</sup> adalah:

- a. Data berasal dari *multivariate normal distribution*
- b. Matrik kovarians dari semua variabel independen seharusnya sama (*equal*), yaitu dengan melihat uji asumsi tersebut pada Box's M.
- c. Tidak ada korelasi antar variabel independen
- d. Tidak adanya data yang sangat ekstrim (*outlier*) pada variabel independen yang dapat diketahui dengan *data screening*. Data yang dideteksi outliernya adalah data yang sudah *discreening* normalitasnya.

<sup>9</sup> Budi, *op.cit*, hal. 248

<sup>10</sup> Klecka dalam Gaffar (1992), Ghozali (2006) dan Santoso (2006)

Apabila asumsi normalitas data tersebut tidak dapat terpenuhi maka selanjutnya menggunakan alat analisis *multinomial logistic regression*. Analisis ini merupakan perluasan dari *logistic regression* dengan variabel dependennya adalah kategori yang lebih dari dua. Adapun *logistic regression* itu sendiri adalah alat analisis yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> lihat Ghozali, 2006, *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*, hal. 71

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Demografi**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2007, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.454.594 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2007 sebesar 1,41%. Sekitar 73,96% penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64 tahun). Angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 35,20 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 35 orang penduduk usia tidak produktif. Dalam kurun waktu 5 tahun (2003-2007), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Kecamatan Semarang Selatan tercatat sebagai wilayah terpadat sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah.

Adapun secara terperinci, penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kota Semarang**

KELOMPOK USIA	BANYAKNYA PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4
0 - 4	25.874	24.847	50.721
5 - 9	59.372	56.700	116.072
10 - 14	60.551	58.647	119.198
15 - 19	58.626	56.615	115.241
20 - 24	61.626	59.992	121.618
25 - 29	78.093	77.228	155.321
30 - 34	72.612	73.843	146.455
35 - 39	70.036	71.698	141.734
40 - 44	58.912	61.964	120.876
45 - 49	50.905	53.136	104.041
50 - 54	41.808	39.964	81.772
55 - 59	27.648	26.237	53.921
60 - 64	16.151	18.755	34.906
65 +	39.776	52.942	92.718
<b>JUMLAH</b>			
2007	722.026	732.568	1.454.594
2006	705.627	713.851	1.419.478
2005	695.676	703.457	1.399.133
2004	684.705	693.488	1.378.193
2003	671.032	678.973	1.350.005

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Semarang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik yang berasal dari kelahiran maupun perpindahan penduduk dari daerah lain. Data kependudukan dari BPS ini perlu kiranya mendapat perhatian terkait dengan keadaan pemilih. Adanya pertumbuhan penduduk berarti juga penambahan jumlah pemilih. Berikut akan disajikan rekapitulasi jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianutnya.

**Tabel 4.2 (a)**  
**Banyaknya Penduduk menurut Agama di Kota Semarang**

TAHUN	PEMELUK AGAMA					
	ISLAM	%	KRISTEN KATHOLIK	%	KRISTEN PROTESTAN	%
2007	1.207.614	83,02	110.655	7,60	105.472	7,25
2006	1.176.653	81,94	122.682	8,54	108.419	7,55
2005	1.177.593	82,90	110.242	7,76	104.097	7,32
2004	1.172.369	83,79	100.075	7,15	97.824	6,99
2003	1.154.109	83,74	98.858	7,17	96.596	7,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

**Tabel 4.2 (b)**  
**Banyaknya Penduduk menurut Agama di Kota Semarang**

TAHUN	PEMELUK AGAMA						
	BUDHA	%	HINDU	%	LAINNYA	%	JUMLAH
2007	18.334	1,26	10.356	0,71	2.163	0,14	1.454.594
2006	18.383	1,28	7.888	0,54	1.868	0,13	1.435.893
2005	17.894	1,25	9.079	0,63	1.573	0,11	1.420.478
2004	18.428	1,31	6.866	0,49	1.571	0,11	1.399.133
2003	18.330	1,33	6.786	0,49	1.514	0,10	1.378.193

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

Berdasarkan dua tabel di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam, yaitu berkisar antara 81,94% - 83,79%. Jumlah pemeluk agama Islam mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana pemeluk agama lainnya. Pada urutan berikutnya, penduduk agama Kristen Katolik jumlahnya berkisar antara 7,15% - 8,54% dan pemeluk Kristen Protestan yang jumlahnya berkisar antara 6,99% - 7,55%. Sedangkan pemeluk agama Budha, Hindu, dan agama lainnya jumlahnya kurang dari 2%.

Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai Bukan Angkatan Kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat). Untuk tahun 2006, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 65,78 %. Sedangkan tingkat kesempatan kerja, yaitu perbandingan antara penduduk kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2006 adalah sebesar 42,35 %.

Berikut akan disajikan rekapitulasi mata pencaharian penduduk Kota Semarang:

**Tabel 4.3 (a)**  
**Mata Pencaharian Penduduk di Kota Semarang**

TAHUN	PETANI SENDIRI	%	BURUH TANI	%	NELAYAN	%	PENGUSAHA	%
2007	26.494	4,30	18.992	3,08	2.506	0,40	51.304	8,33
2006	28.185	3,24	22.409	2,58	2.256	0,26	24.580	2,83
2005	30.440	3,53	17.271	2,00	2.468	0,28	15.771	1,83
2004	24.815	2,91	21.699	2,54	2.301	0,26	18.819	2,20
2003	24.259	2,80	21.310	2,46	2.227	0,25	18.587	2,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

**Tabel 4.3 (b)**  
**Mata Pencaharian Penduduk di Kota Semarang**

TAHUN	BURUH INDUSTRI	%	BURUH BANGUNAN	%	PEDAGANG	%
2007	152.557	24,79	71.328	11,59	73.431	11,93
2006	192.473	22,18	106.217	12,24	75.951	8,75
2005	185.604	21,56	131.453	15,27	76.672	8,90
2004	191.818	22,49	139.157	16,32	77.603	9,10
2003	188.598	21,77	136.796	15,79	75.826	8,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

**Tabel 4.3 (c)**  
**Mata Pencaharian Penduduk di Kota Semarang**

TAHUN	ANGKUTAN	%	PNS & ABRI	%	PENSIUN-AN	%	LAIN-NYA	%
2007	22.187	3,60	89.918	14,61	32.855	5,34	76.657	12,45
2006	30.144	3,47	88.486	10,19	38.101	4,39	258.815	29,83
2005	26.614	3,09	93.707	10,88	34.208	3,97	255.717	29,71
2004	28.197	3,30	92.559	10,85	35.728	4,19	236.925	27,78
2003	27.763	3,20	91.135	10,52	35.258	4,07	234.017	27,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2007 sebanyak 615.229 orang, tahun 2006 sebanyak 867.617 orang, tahun 2005 sebanyak 860.626, tahun 2004 sebanyak 852.653 orang, dan tahun 2003 sebesar 866.243 orang. Sekilas terlihat bahwa ada penurunan jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2007 dibanding tahun 2006. Dari data yang ada, mata pencaharian penduduk yang utama pada tahun 2007 berturut-turut adalah buruh industri (24,79%), PNS & ABRI (14,61%), pedagang (11,93%), buruh bangunan (11,59%), pengusaha (8,33%), pensiunan (5,34%), dan lainnya.

Adapun penduduk Kota Semarang usia 5 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 (a)**  
**Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang**

TAHUN	TIDAK SEKOLAH	%	BELUM TAMAT	%	TIDAK TAMAT	%
2007	91.786	6,53	158.024	11,25	128.038	9,12
2006	84.287	6,53	145.113	11,25	117.577	9,12
2005	76.072	5,88	143.666	11,11	129.812	10,04
2004	75.148	5,95	140.694	11,15	127.026	10,07
2003	74.030	5,95	139.547	11,22	124.475	10,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

**Tabel 4.4 (b)**  
**Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang**

TAHUN	TAMAT SD	%	TAMAT SMTP	%	TAMAT SMTA	%
2007	320.900	22,85	284.640	20,27	296.169	21,09
2006	294.682	22,85	261.385	20,27	271.972	21,09
2005	302.675	23,42	262.309	20,29	275.488	21,31
2004	298.781	23,68	255.923	20,28	268.295	21,26
2003	294.435	23,68	252.079	20,27	264.314	21,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

**Tabel 4.4 (c)**  
**Penduduk Usia 5 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Semarang**

TAHUN	TAMAT AKADEMI / D III	%	TAMAT UNIVERSITAS	%	JUMLAH
2007	61.005	4,34	63.311	4,50	1.403.873
2006	56.021	4,34	58.138	4,50	1.289.175
2005	48.873	3,78	49.399	3,82	1.292.304
2004	47.530	3,76	48.003	3,80	1.261.400
2003	46.894	3,77	47.315	3,80	1.243.089

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2008)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa cukup banyak penduduk Kota Semarang yang telah menyelesaikan pendidikan dasarnya, yaitu 50,20% pada tahun 2007 atau sebanyak 704.744 orang. Dari jumlah tersebut 8,84% telah menyelesaikan pendidikannya setingkat akademi dan universitas, lebih banyak dari rata-rata nasional yang kurang dari 5%. Bahkan angka tersebut mengalami beberapa peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat di tahun 2003 terdapat 3,77% lulusan akademi dan 3,80% lulusan universitas meningkat di tahun 2007 menjadi 4,34% untuk yang telah tamat akademi dan 4,50% untuk yang telah tamat universitas.

#### **4.1.2 Pemilihan Umum Tahun 2004**

Pada pemilihan umum tahun 2004, masyarakat memilih anggota DPR RI, DPRD Jawa Tengah, dan DPRD Kota Semarang yang tergabung dalam 24 (dua puluh empat) Partai Politik serta anggota DPD Jawa Tengah. Selain untuk memilih anggota legislatif dan DPD, masyarakat juga melaksanakan pemilihan presiden di tahun 2004 tersebut. Pada bagian ini akan digambarkan keadaan pemilihan umum dan pemilihnya di Kota Semarang, yang diantaranya adalah partai politik peserta pemilu, jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat partisipasi, perolehan suara, dan data lain-lain yang terkait.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik. Adapun partai-partai politik tersebut adalah:

**Tabel 4.5**  
**Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004**

NO. URUT	NAMA PARTAI	NO. URUT	NAMA PARTAI
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	13	Partai Amanat Nasional
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	14	Partai Karya Peduli Bangsa
3	Partai Bulan Bintang	15	Partai Kebangkitan Bangsa
4	Partai Merdeka	16	Partai Keadilan Sejahtera
5	Partai Persatuan Pembangunan	17	Partai Bintang Reformasi
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	19	Partai Damai Sejahtera
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	20	Partai Golongan Karya
9	Partai Demokrat	21	Partai Patriot Pancasila
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	22	Partai Sarikat Indonesia
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	23	Partai Persatuan Daerah
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	24	Partai Pelopor

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuh partai besar nasional mendapat nomor urut 5 (Partai Persatuan Pembangunan), 9 (Partai Demokrat), 13 (Partai Amanat Nasional), 15 (Partai Kebangkitan Bangsa), 16 (Partai Keadilan Sejahtera), 18 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan 20 (Partai Golongan Karya). Nomor urut tersebut tidak berlaku untuk Pemilu periode berikutnya, berbeda dengan Pemilu di masa Orde Baru (Orba). Konsekuensinya adalah partai-partai harus bekerja keras untuk mensosialisasikannya kepada pemilih baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Adapun jumlah pemilih di Kota Semarang pada pemilihan umum tahun 2004 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH
1	Semarang Barat	147.351	109.688
2	Semarang Selatan	74.165	59.448
3	Semarang Timur	78.398	60.756
4	Semarang Utara	117.073	87.566
5	Semarang Tengah	64.323	51.661
6	Gayamsari	66.002	49.213
7	Pedurungan	152.153	107.406
8	Genuk	73.202	50.214
9	Tembalang	128.298	90.660
10	Candisari	76.266	57.507
11	Gunungpati	68.273	52.126
12	Banyumanik	116.728	85.349
13	Gajahmungkur	57.885	43.986
14	Mijen	42.376	30.960
15	Ngaliyan	102.624	74.560
16	Tugu	27.622	20.292
JUMLAH		1.392.739	1.031.392

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Kecamatan Semarang Barat merupakan wilayah yang memiliki jumlah pemilih yang terbesar, yaitu 109.688 pemilih meskipun dari sisi jumlah penduduk wilayah tersebut bukan yang terbanyak penduduknya. Kecamatan Pedurungan yang memiliki jumlah penduduk terbesar, jumlah pemilihnya masih di bawah Kecamatan Semarang Barat. Sebagaimana diketahui, Kecamatan Pedurungan merupakan wilayah pengembangan pemukiman sedangkan Kecamatan Semarang Barat lebih banyak

pemukiman lama dan sebagian kawasan perdagangan maupun industri. Hal tersebut berpengaruh pada komposisi penduduk, dimana wilayah pengembangan lebih banyak penduduk usia anak-anak dan remaja dibandingkan wilayah yang bukan pengembangan pemukiman.

Adapun jumlah TPS pada Pemilu Tahun 2004 di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum**  
**Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS
1	Semarang Barat	415
2	Semarang Selatan	236
3	Semarang Timur	246
4	Semarang Utara	330
5	Semarang Tengah	193
6	Gayamsari	187
7	Pedurungan	419
8	Genuk	204
9	Tembalang	322
10	Candisari	201
11	Gunungpati	201
12	Banyumanik	317
13	Gajahmungkur	162
14	Mijen	117
15	Ngaliyan	290
16	Tugu	79
	JUMLAH	3.919

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Pedurungan memiliki jumlah TPS terbanyak dibandingkan Kecamatan Semarang Barat maupun kecamatan lainnya. Hal tersebut terjadi karena dalam penentuan jumlah

pemilih yang ada dalam satu TPS berdasarkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam satu RT / RW tidak ada standar jumlah maksimal ataupun minimal warga yang ikut di dalamnya karena struktur di tingkat bawah ini merupakan struktur non formal berdasarkan kesepakatan warganya.

#### A. Pemilu Anggota DPR Dapil Jawa Tengah - 1 di Kota Semarang

Partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan Pemilu bagi beberapa pihak, baik di jajaran pemerintahan maupun akademisi. Pendapat yang berbeda menyatakan hal tersebut tidak mutlak berlaku karena tidak menggunakan hak pilih juga merupakan salah satu pilihan. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota DPR Tahun 2004 di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2004 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA UNTUK DPR		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	841.132	81,55%	Sah	780.647	92,81%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	190.260	18,45%	Tidak Sah	60.485	7,19%
Jumlah pemilih	1.031.392	100%	Jumlah	841.132	100%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel tersebut, partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPR cukup besar, yaitu 81,55% dengan suara sah 92,81% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut. Adapun

perolehan suara masing-masing partai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR**  
**Tahun 2004 Daerah Pemilihan Jawa Tengah - 1**  
**(Kota Semarang)**

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2.530
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	3.056
3	Partai Bulan Bintang	9.353
4	Partai Merdeka	5.455
<b>5</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>37.153</b>
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.465
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.558
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	5.244
<b>9</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>138.768</b>
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.995
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.122
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	2.946
<b>13</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>54.420</b>
14	Partai Karya Peduli Bangsa	6.832
<b>15</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>65.343</b>
<b>16</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>59.546</b>
17	Partai Bintang Reformasi	7.865
<b>18</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>210.324</b>
<b>19</b>	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	<b>43.466</b>
<b>20</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>104.556</b>
21	Partai Patriot Pancasila	4.861
22	Partai Sarikat Indonesia	1.722
23	Partai Persatuan Daerah	2.083
24	Partai Pelopor	1.994
	JUMLAH	<b>780.647</b>

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Dapat dilihat pada tabel di atas, perolehan suara di Kota Semarang sedikit berbeda dengan perolehan suara di tingkat nasional dimana ada

tujuh partai besar yang cukup berpengaruh, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perbedaannya adalah perolehan Partai Damai Sejahtera (PDS) menduduki peringkat ketujuh, berada di atas perolehan suara PPP.

## B. Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang

Partisipasi pemilih pada Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah sedikit berbeda dengan Pemilu anggota DPR. Selanjutnya akan disajikan data partisipasi pemilih pada Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah Tahun 2004 di Kota Semarang sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA UNTUK DPRD JAWA TENGAH		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	839.896	81,43%	Sah	775.710	92,36%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	191.496	18,57%	Tidak Sah	64.186	7,64%
Jumlah pemilih	1.031.392	100%	Jumlah	839.896	100%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah sedikit menurun, yaitu 81,43% dengan

suara sah 92,36% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Adapun perolehan suara masing-masing partai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Daerah Pemilihan Jawa Tengah - 1**  
**(Kota Semarang)**

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	2.614
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	2.854
3	Partai Bulan Bintang	8.371
4	Partai Merdeka	5.014
<b>5</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>37.573</b>
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.338
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.470
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	4.850
<b>9</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>137.138</b>
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.664
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	5.743
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	2.964
<b>13</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>54.953</b>
14	Partai Karya Peduli Bangsa	6.846
<b>15</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>66.931</b>
<b>16</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>57.305</b>
17	Partai Bintang Reformasi	7.891
<b>18</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>207.027</b>
<b>19</b>	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	<b>44.541</b>
<b>20</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>105.156</b>
21	Partai Patriot Pancasila	5.048
22	Partai Sarikat Indonesia	2.054
23	Partai Persatuan Daerah	2.079
24	Partai Pelopor	2.289
	JUMLAH	<b>775.710</b>

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perubahan peringkat perolehan suara dibandingkan dengan Pemilu Anggota DPR. Terdapat

sedikit perbedaan jumlah suara, namun secara umum delapan partai masih berada di peringkat teratas. Beberapa perbedaan tersebut adalah:

- perolehan suara PDIP pada Pemilu anggota DPR 210.324 turun menjadi 207.027 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PD pada Pemilu anggota DPR 138.768 turun menjadi 137.138 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara Golkar pada Pemilu anggota DPR 104.556 naik menjadi 105.156 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PKB pada Pemilu anggota DPR 65.343 naik menjadi 66.931 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PKS pada Pemilu anggota DPR 59.546 turun menjadi 57.305 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PAN pada Pemilu anggota DPR 54.420 naik menjadi 54.953 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PDS pada Pemilu anggota DPR 43.466 turun menjadi 44.541 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah
- perolehan suara PPP pada Pemilu anggota DPR 37.153 naik menjadi 37.573 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah

Perbedaan jumlah perolehan suara di tingkat Pemilu anggota DPR dengan Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah, tidak mengubah peringkat delapan besar partai yang dipilih oleh pemilih di Kota Semarang.

### C. Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang

Pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang, partisipasi pemilih juga berbeda dengan Pemilu anggota DPR maupun Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2004**

HAK PILIH			TOTAL SUARA UNTUK DPRD KOTA SEMARANG		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	858.995	83,29%	Sah	780.251	90,83%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	172.397	16,71%	Tidak Sah	78.744	9,17%
Jumlah pemilih	1.031.392	100%	Jumlah	858.995	100%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Semarang sedikit menaik, yaitu menjadi 83,29% dengan suara sah 90,83% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut. Namun surat suara yang tidak sah juga bertambah apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi maupun dengan Pemilu sebelumnya. Suara yang “terbuang” sebanyak 78.744 pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang lebih banyak daripada Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah, yaitu 64.186 dan Pemilu anggota DPR, yaitu 60.485. Adapun perolehan suara masing-masing partai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD**  
**Kota Semarang Tahun 2004**

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	3.073	19
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	3.188	18
3	Partai Bulan Bintang	9.160	9
4	Partai Merdeka	6.763	11
<b>5</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>38.304</b>	<b>8</b>
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.496	24
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1.889	22
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	6.593	12
<b>9</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>130.845</b>	<b>2</b>
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.081	16
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	6.390	14
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	3.298	17
<b>13</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>53.776</b>	<b>5</b>
14	Partai Karya Peduli Bangsa	6.484	13
<b>15</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>66.337</b>	<b>4</b>
<b>16</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>56.325</b>	<b>6</b>
17	Partai Bintang Reformasi	8.808	10
<b>18</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>208.254</b>	<b>1</b>
<b>19</b>	<b>Partai Damai Sejahtera</b>	<b>43.812</b>	<b>7</b>
<b>20</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>108.795</b>	<b>3</b>
21	Partai Patriot Pancasila	5.926	15
22	Partai Sarikat Indonesia	1.801	23
23	Partai Persatuan Daerah	2.654	20
24	Partai Pelopor	2.199	21
	JUMLAH	<b>780.251</b>	

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel di atas, ternyata perolehan suara delapan partai teratas juga berbeda dengan Pemilu anggota DPR dan Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah. Perolehan suara pada Pemilu anggota DPR dan

anggota DPRD Jawa Tengah masih harus dijumlahkan dengan Provinsi maupun Kabupaten / Kota lain untuk menghitung jumlah kursi yang diperoleh. Pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang ini, hasilnya bersifat final yang berarti perolehan suara tersebut juga merupakan perolehan kursi. Adapun jumlah perolehan kursi anggota DPRD Kota Semarang tahun 2004 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu**  
**Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2004**

NO	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH KURSI
1	Partai Persatuan Pembangunan	38.304	2
2	Partai Demokrat	130.845	7
3	Partai Amanat Nasional	53.776	6
4	Partai Kebangkitan Bangsa	66.337	4
5	Partai Keadilan Sejahtera	56.325	5
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	208.254	12
7	Partai Damai Sejahtera	43.812	3
8	Partai Golongan Karya	108.795	6
			45

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pada tabel di atas terlihat bahwa perolehan kursi terbanyak pada PDIP, yaitu 12 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan. Jika melihat perolehan suaranya, PD mengalami penurunan terbesar dan Partai Golkar

mengalami kenaikan terbesar. Perolehan suara PD pada Pemilu anggota DPR 138.768 turun menjadi 137.138 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah dan turun lagi menjadi 130.845 pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang. Perolehan suara Golkar pada Pemilu anggota DPR 104.556 naik menjadi 105.156 pada Pemilu Anggota DPRD Jawa Tengah dan naik lagi menjadi 108.795 pada Pemilu anggota DPRD Kota Semarang.

#### D. Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang

Berbeda dengan pemilihan utusan daerah di masa Orba, dimana Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur secara otomatis mewakili provinsinya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pasca reformasi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung dalam Pemilu oleh rakyat. Berikut dapat dilihat tingkat partisipasi pemilih di Kota Semarang dalam Pemilu anggota DPD Jawa Tengah.

**Tabel 4.15**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Anggota DPD Tahun 2004 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA UNTUK DPD JAWA TENGAH		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	841.132	68,49%	Sah	706.383	83,98%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	190.260	31,51%	Tidak Sah	134.749	16,02%
Jumlah pemilih	1.031.392	100%	Jumlah	841.132	100%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Tabel di atas menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu anggota DPD Jawa Tengah dibandingkan dengan Pemilu anggota legislatif tahun yang sama, baik itu di tingkat kota, provinsi, maupun pusat atau DPR. Pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 68,49% dan suara sah untuk Pemilu anggota DPD Jawa Tengah 83,98% dari tingkat partisipasi tersebut. Adapun sebaran perolehan suara Pemilu anggota DPD Jawa Tengah di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.16 (a)**  
**Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO URUT	N A M A	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. I WAYAN SUDANA	6.488
2	Drs. H. MINTORO HS	5.863
3	BAMBANG EKO PURNOMO, SE	15.112
<b>4</b>	<b>Dra. Hj. NAFSIAH SAHAL</b>	<b>36.726</b>
5	dr. DJOKO SOEDIJARTO, DTM & H, M.Sc	15.198
6	H. SOEROTO, SH	7.134
7	Drs. SANUSI	4.567
8	Ir. RIO IRWAN KARYONO	7.173
9	Dra. Hj. SITI FATIMAH, S.IP	37.977
10	DARAJAT HARAHAP, SH	7.065
11	H. SUWANTO, SE, MM	26.370
12	Drs NAPSUN SETYONO	20.406
13	DR. Drs. TUKIMAN TARUNO SAYOGA, MS	14.243
14	H. WISNU SUHARDONO, SE	7.498
<b>15</b>	<b>KH. ACHMAD CHALWANI</b>	<b>13.143</b>
16	SUTRISNO	14.596
17	H. SOETJIPTO, SH	14.101
18	MAWAHIB, SE	22.468
19	ABU SALIM, S.Ag	4.730
20	P. SARIJO	8.146

**Tabel 4.16 (b)**  
**Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO URUT	N A M A	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
21	H. SOEWARDI	21.571
22		
23	SUMARTINI, BBA	8.744
24	SRI PADUKA MANGKUNEGORO IX	17.583
25	Drs. RM. SUBIYAKTO TJAKRAWERDAYA	9.149
26	ABDUL GOFUR, S.Ag	12.500
27	H. PRAWASONO, SH	5.417
28	Drs. H. SUYATNO ZA, MS	3.133
29	Ir. KECUK HENDARYADI	8.235
30	H. MANITO AMIN	2.366
31	M. ARIEF ZAENAL ARIFIN	1.556
32	Drs. H. SOEROTO HARYOSAPUTRO, M.Si	3.494
33	TASLIM SYAHLAN, S.Ag	1.969
34	MISBAH SUKAMDI	1.254
35	Ir. LUHUR PAMBUDI MULYONO, MM	1.446
36	TEGUH RAHARJO, SH, MM	3.411
37	Drs. H. DAHLAN RAIS, M.Hum	19.627
38	HERMAWAN TRIONO, SE	2.031
39	Ir. HYGINUS WIDYANTO BUDI SANTOSO	3.495
<b>40</b>	<b>Drs. H. SUDHARTO, MA</b>	<b>18.266</b>
41	YAHYA NURHADI, SP	1.546
42	TARUNO A, Ma.Pd	719
43	Drs GIRI ISKANDAR	533
44	MOHAMMAD BISRI, SE	877
45	Drs. H. DJAWAHIR MUHAMMAD	3.456
46	H. AHMAD TOHARI	3.768
<b>47</b>	<b>Ir. BUDI SANTOSO</b>	<b>219.131</b>
48	Ir. ZAINUDIN ACHMAD	1.897
49	H. ACHMAD SULCHAN, SH	2.614
50	HM. RUSDI RAHAYU	2.623
51	Drs. RUKANI, S.Pd	909
52	HM. SYARIEF DHARMAWAN S, SE	6.693

**Tabel 4.16 (c)**  
**Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO URUT	N A M A	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
53	Drs. ROESTAM SANTIKO	4.280
54	H. FATCHUDIN ROSYIDI	852
55	H. HASAN TOHA PUTRA, MBA	22.540
		<b>706.383</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Calon anggota DPD Jawa Tengah dengan nomor urut 22 mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Pemilu. Hasil akhir Pemilu anggota DPD Jawa Tengah menetapkan empat orang sebagai wakil Jawa Tengah, yaitu: (1) Dra. Hj. Nafsiah Sahal; (2) Ir. Budi Santoso (3) Drs. H. Sudharto, MA; dan (4) KH Achmad Chalwani. Pemenang urutan keempat merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya mengajukan gugatan atas penghitungan suara. Adapun untuk perolehan suara di Kota Semarang, empat urutan teratas yang memperoleh suara terbanyak adalah: (1) Ir. Budi Santoso; (2) Dra. Hj. Siti Fatimah, S.IP; (3) Dra. Hj. Nafsiah Sahal; dan (4) H. Suwanto, SE, MM.

Hal tersebut berarti bahwa hanya dua kandidat, yaitu Budi Santoso dan Nafsiah Sahal yang menang di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Budi Santoso merupakan pimpinan umum sebuah koran lokal Jawa Tengah dan Nafsiah Sahal merupakan tokoh organisasi Islam yang memiliki banyak simpatisan.

## **E. Pemilu Presiden / Wakil Presiden di Kota Semarang**

Setelah pelaksanaan Pemilu anggota legislatif maupun anggota DPD dilanjutkan dengan Pemilu Presiden / Wakil Presiden. Untuk per kalinya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, rakyat memilih langsung Presiden / Wakil Presidennya. Pelaksanaannya juga melalui tahapan pendaftaran pemilih sebagaimana Pemilu sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbaikan data pemilih sehingga jumlah pemilih terdaftar dapat bertambah / berkurang sesuai dengan laporan dari masyarakat. KPU melalui perangkat-perangkat di bawahnya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum terdaftar pada Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu anggota DPD untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Setelah batas waktu pendaftaran pemilih selesai, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam DPT tersebut, berhak untuk memberikan suaranya pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden.

Adapun jumlah pemilih pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran I adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Semarang Barat	55.143	60.272	115.415
2	Semarang Selatan	29.241	32.712	61.953
3	Semarang Timur	29.505	32.941	62.446
4	Semarang Utara	43.841	46.978	90.819
5	Semarang Tengah	25.153	28.928	54.081
6	Gayamsari	25.634	26.367	52.001
7	Pedurungan	54.328	57.057	111.385
8	Genuk	26.115	26.322	52.437
9	Tembalang	46.623	48.243	94.866
10	Candisari	28.495	30.954	59.449
11	Gunungpati	25.954	27.427	53.381
12	Banyumanik	42.747	46.446	89.193
13	Gajahmungkur	22.137	23.853	45.990
14	Mijen	16.079	16.067	32.146
15	Ngaliyan	39.238	39.865	79.389
16	Tugu	10.238	10.429	21.167
JUMLAH		520.757	555.361	1.076.118

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 44.726 orang, dari yang semula 1.031.392 menjadi 1.076.118. Dengan melihat tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Kecamatan Semarang Barat tercatat sebagai wilayah yang DPT-nya bertambah paling banyak, yaitu sebesar 5.727 sedangkan Kecamatan Tugu hanya bertambah 875 pemilih.

Adapun jumlah TPS dalam Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran I ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu**  
**Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	TPS		
		RIIL	KHUSUS	JUMLAH
1	Semarang Barat	414	2	416
2	Semarang Selatan	230	6	236
3	Semarang Timur	244	2	246
4	Semarang Utara	330	-	330
5	Semarang Tengah	189	4	193
6	Gayamsari	186	1	187
7	Pedurungan	419	-	419
8	Genuk	201	3	204
9	Tembalang	328	2	330
10	Candisari	200	1	201
11	Gunungpati	205	-	205
12	Banyumanik	315	2	317
13	Gajahmungkur	161	1	162
14	Mijen	117	-	117
15	Ngaliyan	292	4	296
16	Tugu	79	-	79
	JUMLAH	3.910	28	3.938

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Jumlah TPS pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden juga mengalami penambahan sebanyak 19 TPS. Kecamatan Tembalang merupakan wilayah yang bertambah paling banyak, yaitu 8 TPS. Kecamatan Semarang Barat bertambah 1 TPS, Kecamatan Gunungpati bertambah 4 TPS, dan Kecamatan Ngaliyan bertambah 6 TPS. Sedangkan kecamatan lain tidak ada penambahan atau tetap jumlahnya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat tabel 4.7

Partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran pertama juga mengalami fluktuasi. Adapun jumlah pemilih yang menggunakan suaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2004 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	846.966	78,71%	Sah	828.209	97,79%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	229.152	21,29%	Tidak Sah	18.757	2,21%
Jumlah pemilih	1.076.118	100%	Jumlah	846.966	100%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran pertama lebih baik daripada Pemilu anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Jawa Tengah dan Pemilu anggota DPD namun kurang dari partisipasi ketika Pemilu anggota DPRD Kota Semarang. Namun jumlah suara sah paling banyak dibandingkan dengan Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu anggota DPD.<sup>2</sup>

Adapun jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden / Wakil Presiden putaran pertama adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Lihat tabel 4.8, tabel 4.10, tabel 4.12, dan tabel 4.15

**Tabel 4.20 (a)**  
**Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil**  
**Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN				
		WIRANTO - SALAHUDDIN WAHID	MEGA - HASYIM	AMIEN - SISWONO	SBY - JK	HAMZAH - AGUM
1	Semarang Barat	10.446	<b>33.472</b>	13.585	30.800	929
2	Semarang Selatan	5.247	<b>16.333</b>	8.459	14.979	418
3	Semarang Timur	5.044	<b>22.087</b>	6.879	14.089	597
4	Semarang Utara	7.287	<b>29.035</b>	10.218	23.201	971
5	Semarang Tengah	4.432	<b>19.346</b>	5.768	10.563	505
6	Gayamsari	4.955	<b>14.655</b>	6.274	13.159	575
7	Pedurungan	13.025	25.112	15.401	<b>31.529</b>	1.707
8	Genuk	8.154	11.488	5.587	<b>15.222</b>	1.587
9	Tembalang	11.831	20.100	12.970	<b>26.145</b>	1.421
10	Candisari	6.544	16.326	7.040	<b>16.854</b>	483
11	Gunungpati	9.893	9.657	4.740	<b>12.673</b>	2.617
12	Banyumanik	9.894	19.052	13.073	<b>25.851</b>	870
13	Gajahmungkur	4.903	10.128	6.133	<b>12.270</b>	405
14	Mijen	5.701	7.530	2.890	<b>8.789</b>	971
15	Ngaliyan	11.462	14.204	11.083	<b>23.222</b>	1.499
16	Tugu	4.578	3.121	2.226	<b>5.245</b>	695
JUMLAH		123.396	<b>271.646</b>	132.326	<b>284.591</b>	16.250

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak satu pun kecamatan yang dimenangkan oleh pasangan Wiranto - Wahid, Amien Siswono, dan Hamzah - Agum. Pasangan Mega - Hasyim memenangkan perolehan suara di 6 kecamatan dan pasangan SBY - JK memenangkan perolehan suara di 10 kecamatan.

Adapun rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.20 (b)**  
**Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil**  
**Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO URUT	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	SUARA		PERINGKAT
		JUMLAH	PERSENTASE	
1	WIRANTO - SALAHUDDIN WAHID	123.396	14,90 %	IV
2	MEGAWATI SOEKARNOPUTRI - A. HASYIM MUZADI	<b>271.646</b>	<b>32,80 %</b>	II
3	AMIEN RAIS - SISWONO YUDOHUSODO	132.326	15,98 %	III
4	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - MUHAMMAD JUSUF KALLA	<b>284.591</b>	<b>34,36 %</b>	I
5	HAMZAH HAZ - AGUM GUMELAR	16.250	1,96 %	V
JUMLAH		<b>828.209</b>	100 %	

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pasangan SBY - JK bersaing cukup ketat dengan pasangan Mega - Hasyim dengan selisih perolehan suara hanya 1,56% di Kota Semarang. Selanjutnya kedua pasangan calon tersebut maju ke Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran kedua.

Untuk DPT Pemilu putaran kedua ini juga mengalami perubahan sebagaimana putaran pertama. Hal tersebut dimungkinkan terjadi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Adapun jumlah pemilih pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.21**  
**Jumlah Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Semarang Barat	53.968	57.986	111.954
2	Semarang Selatan	27.635	30.541	58.176
3	Semarang Timur	29.070	32.199	61.269
4	Semarang Utara	43.130	46.276	89.406
5	Semarang Tengah	25.514	27.257	52.771
6	Gayamsari	24.824	26.408	51.232
7	Pedurungan	53.014	56.278	109.292
8	Genuk	25.107	25.680	50.787
9	Tembalang	46.780	47.393	94.173
10	Candisari	28.239	30.328	58.567
11	Gunungpati	25.930	27.449	53.379
12	Banyumanik	41.535	44.146	85.681
13	Gajahmungkur	20.873	23.159	44.032
14	Mijen	15.410	15.447	30.857
15	Ngaliyan	38.724	40.891	79.615
16	Tugu	9.144	11.712	20.856
JUMLAH		508.897	543.150	1.052.047

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pengurangan DPT terbanyak terjadi di Kecamatan Semarang Selatan, yaitu 3.777 pemilih sedangkan yang paling sedikit terjadi di Kecamatan Gunungpati, yaitu hanya 2 orang. Berbeda dengan 15 kecamatan lain yang berkurang jumlah pemilih dalam DPT-nya, Kecamatan Ngaliyan pada DPT putaran kedua ini bertambah 226 orang.

Adapun jumlah TPS pada putaran kedua juga mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.22**  
**Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu**  
**Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO	KECAMATAN	TPS		
		RIIL	KHUSUS	JUMLAH
1	Semarang Barat	414	2	416
2	Semarang Selatan	230	6	236
3	Semarang Timur	244	2	246
4	Semarang Utara	330	-	330
5	Semarang Tengah	189	4	193
6	Gayamsari	186	1	187
7	Pedurungan	419	-	419
8	Genuk	201	3	204
9	Tembalang	328	2	330
10	Candisari	200	2	202
11	Gunungpati	202	-	202
12	Banyumanik	315	2	317
13	Gajahmungkur	161	1	162
14	Mijen	117	-	117
15	Ngaliyan	290	4	293
16	Tugu	79	-	79
	JUMLAH	3.904	28	3.933

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 3 (tiga) kecamatan yang mengalami perubahan jumlah TPS, yaitu Kecamatan Candisari, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Ngaliyan. Kecamatan Candisari mengalami penambahan 1 (satu) TPS sedangkan Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Ngaliyan masing-masing berkurang 3 (tiga) TPS. Kecamatan Ngaliyan bertambah jumlah DPT-nya namun berkurang jumlah TPS-nya. Hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah karena bila dirata-rata jumlah pemilih di tiap TPS-nya masih di bawah 300 pemilih, yaitu  $\pm 272$  orang.

Secara umum partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden / Wakil Presiden putaran kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Pilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2004 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	827.584	78,66%	Sah	803.209	97,05%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	224.463	21,34%	Tidak Sah	24.375	2,95%
Jumlah pemilih	1.052.047	100%	Jumlah	827.584	100%

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih. Pada putaran pertama sebanyak 846.966 orang menggunakan hak pilihnya dan pada putaran kedua berkurang menjadi 827.584 orang, terdapat selisih 19.382 orang. Namun, persentasenya hanya berkurang sedikit, dari 78,71% pada putaran pertama menjadi 78,66% pada putaran kedua. Total pemilih dalam DPT pada putaran kedua berkurang 24.071 orang sehingga menjadi 1.052.047 orang.

Persaingan kedua pasangan calon Presiden / Wakil Presiden pada putaran terakhir untuk memperebutkan suara di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.24**  
**Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil**  
**Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II**  
**Tahun 2004 di Kota Semarang**

NO URUT	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	SUARA		PERINGKAT
		JUMLAH	PERSENTASE	
2	MEGAWATI SOEKARNOPUTRI - A. HASYIM MUZADI	358.662	44,65 %	II
4	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO - MUHAMMAD JUSUF KALLA	444.547	55,35 %	I
JUMLAH		<b>803.209</b>	100 %	

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2004)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pasangan SBY - JK memenangkan perolehan suara di Kota Semarang sebagaimana hasil di tingkat nasional. Dari 803.209 suara sah yang masuk, pasangan SBY - JK mampu mendapatkan 55,35% suara dan pasangan Mega - Hasyim memperoleh 44,65% suara.

#### **4.1.3 Pemilihan Walikota / Wakil Walikota Semarang Tahun 2005**

Pemilihan Walikota / Wakil Walikota Semarang secara langsung untuk yang pertama kalinya diselenggarakan kurang lebih satu tahun pasca Pemilu anggota legislatif, Pemilu anggota DPD dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004. Gambaran umum perilaku pemilih dalam Pemilihan Walikota / Wakil Walikota Semarang tahun 2005 dapat dilihat dari rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, partisipasi pemilih, dan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

**Tabel 4.25**  
**Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, PPK, PPS dan TPS Pemilihan**  
**Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2005**  
**(dirinci per Kecamatan di Kota Semarang)**

NO	PPK	PPS	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS		
			L	P	JML	BIASA	KHU-SUS	JML
1	Pedurungan	12	51.052	53.442	104.474	404	-	404
2	Semarang Barat	16	52.374	56.228	108.602	271	2	273
3	Mijen	14	15.177	15.364	30.541	99	-	99
4	Gunungpati	16	23.658	23.839	47.497	171	-	171
5	Tugu	7	9.408	9.717	19.125	77	-	77
6	Semarang Utara	9	41.853	45.479	87.332	311	-	311
7	Semarang Tengah	15	22.917	26.069	48.986	153	2	155
8	Candisari	7	27.008	29.215	56.223	188	1	189
9	Ngaliyan	10	36.368	37.772	74.140	229	2	231
10	Gajah Mungkur	8	19.188	20.567	39.755	107	1	108
11	Semarang Selatan	10	25.329	28.241	53.570	181	4	185
12	Banyumanik	11	39.073	42.223	81.296	267	2	269
13	Genuk	13	25.065	25.508	50.573	193	2	195
14	Semarang Timur	10	27.709	30.827	58.536	151	2	153
15	Gayamsari	7	23.180	24.022	47.202	185	1	186
16	Tembalang	12	43.744	45.604	89.348	271	2	273
	<b>JUMLAH</b>	<b>177</b>	<b>483.103</b>	<b>514.097</b>	<b>997.200</b>	<b>3.258</b>	<b>21</b>	<b>3.297</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2005)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemilih dibanding Pemilu Presiden / Wakil Presiden (putaran kedua) berkurang menjadi 997.200 orang dengan jumlah TPS yang juga lebih sedikit, yaitu 3.297 tempat. Perbedaan jumlah pemilih terdaftar tersebut terjadi di semua kecamatan dengan selisih terbesar 5.882 orang di Kecamatan Gunungpati dan yang terkecil, yaitu 214 orang di Kecamatan Genuk.

Adapun partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota / Wakil Walikota (Pilwakot) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak**  
**Pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang**  
**Tahun 2005**

HAK PILIH			TOTAL SUARA		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	664.897	66,68%	Sah	631.208	94,93%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	332.303	33,32%	Tidak Sah	33.689	5,07%
Jumlah pemilih	997.200	100%	Jumlah	664.897	100%

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2005)

Tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang menurun cukup banyak. Pada Pilpres 2004, tingkat partisipasi pemilih masih berada di angka 78,66% namun kurang lebih setahun kemudian dalam Pilwakot tingkat partisipasi hanya 66,68%. Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih / golput) pada Pilwakot 2005 sebesar 33,32% dan suara rusak / tidak sah sebanyak 33.689 surat suara.

Angka golput pada Pilwakot juga ternyata lebih besar dibandingkan Pemilu anggota DPD tahun 2004 (31,51%). Namun demikian jumlah surat suara tidak sah Pilwakot 2005 masih lebih baik dibanding Pemilu anggota DPD tersebut yang mencapai angka 16,02% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pilwakot 2005 diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Sukawi - Mahfudz, Soediro - Musyafir, Soendoro - Yuwanto, dan Bambang - Siti. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
**Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon**  
**Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2005**  
**(dirinci per Kecamatan di Kota Semarang)**

NO	KECAMATAN	PASANGAN CALON				JUMLAH
		1	2	3	4	
		SUKAWI - MAHFUDZ	SOEDIRO - MUSYAFIR	SOENDORO - YUWANTO	BAMBANG - SITI	
1	Pedurungan	49.416	9.502	2.545	4.370	65.833
2	Semarang Barat	47.967	9.984	2.197	5.119	65.267
3	Mijen	14.422	2.945	2.573	2.161	22.101
4	Gunungpati	25.294	4.438	1.115	3.664	34.511
5	Tugu	9.677	1.914	332	1.012	12.935
6	Semarang Utara	41.149	8.805	1.473	5.259	56.686
7	Semarang Tengah	20.811	4.462	774	1.745	27.792
8	Candisari	26.723	6.032	943	2.501	36.199
9	Ngaliyan	37.046	7.123	1.313	2.567	48.049
10	Gajahmungkur	17.446	3.848	757	1.886	23.937
11	Semarang Selatan	23.407	5.047	1.460	1.955	31.869
12	Banyumanik	37.067	7.288	2.042	4.348	50.745
13	Genuk	27.205	4.216	967	1.839	34.227
14	Semarang Timur	26.387	5.368	1.351	2.481	35.587
15	Gayamsari	23.767	3.851	1.239	1.685	30.542
16	Tembalang	40.219	9.303	1.524	3.882	54.928
	<b>JUMLAH</b>	<b>468.003</b>	<b>94.126</b>	<b>22.605</b>	<b>46.474</b>	<b>631.208</b>

Sumber : Sekretariat KPU Kota Semarang (2005)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pasangan Sukawi - Mahfudz memenangi perolehan suara di semua kecamatan. Sukawi merupakan calon walikota yang juga *incumbent* sedangkan calon wakil walikota Mahfudz bukan *incumbent*. Perolehan suara ketiga pasangan calon lainnya tidak satupun yang bersaing ketat dengan pasangan Sukawi - Mahfudz.

Adapun rekapitulasi perolehan suara keseluruhan masing-masing pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.28**  
**Rekapitulasi Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon**  
**Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2005**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	H. Sukawi Sutarip, SH, SE dan H. Mahfudz Ali, SH, M.Si	468.003	74,14%
2	H. Soediro Atmo Prawiro, BA dan Drs. H. Ahmad Musyafir	94.126	14,91%
3	H. Soedoro dan R Yuwanto	22.605	3,58%
4	H. Bambang Raya Saputra dan Hj. Siti Chomsiyati Soetrisno Soeharto	46.474	7,36%
	Jumlah	631.208	100,00%

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2005)

Pada tabel di atas terlihat bahwa pasangan Sukawi - Mahfudz menang mutlak atas perolehan suara pasangan calon lainnya. Sebanyak 74,14% pemilih yang berpartisipasi atau 468.003 warga Kota Semarang mempercayakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Semarang periode 2005 - 2010 kepada Sukawi - Mahfudz.

#### **4.1.4 Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008**

Gambaran partisipasi pemilih dan perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur perlu penulis deskripsikan sebagai dasar analisa data berikutnya. Adapun partisipasi pemilih Kota Semarang dalam Pilgub Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Jumlah Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak**  
**Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah**  
**Tahun 2008 di Kota Semarang**

HAK PILIH			TOTAL SUARA		
Uraian	Jumlah	Persentase	Uraian	Jumlah	Persentase
Pemilih yang menggunakan hak pilih	681.730	67,71%	Sah	602.803	88,42%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	405.347	37,29%	Tidak Sah	78.927	11,58%
Jumlah pemilih	1.087.077	100%	Jumlah	681.730	100%

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2008)

Meski berselang kurang lebih 3 (tiga) tahun dari Pilwakot tahun 2005 namun terlihat pada tabel di atas bahwa partisipasi pemilih tidak jauh berbeda. Jika pada Pilwakot pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 66,68%, maka pada Pilgub ini angka tersebut bergeser sedikit menjadi 67,71%. Tetapi, bila dilihat jumlah suara sah, pada Pilgub ini jumlahnya mengalami penurunan. Suara sah pada Pilgub berjumlah 602.803 sedangkan pada Pilwakot berjumlah 631.208.

Pada Pilgub ini, Sukawi yang masih menjabat sebagai Walikota Semarang turut berpartisipasi dengan mencalonkan diri berpasangan dengan Sudharto. Bila pada tahun 2005, Sukawi berhasil menang telak mendapatkan suara dari warga Kota Semarang, maka dalam Pilgub ini Sukawi tidak banyak memperoleh suara. Hal tersebut dapat diketahui bila membandingkan perolehan suara masing-masing pasangan calon gubernur pada tabel berikut dengan perolehan suara pada Pilwakot 2005.

**Tabel 4.30**  
**Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan**  
**Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang**  
**(dirinci per kecamatan)**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
		BAMBANG- ADNAN	AGUS- KHOLIQ	SUKAWI -SUDHARTO	BIBIT -RUSTRI	TAMZIL- ROZAQ	
1	Semarang Barat	11.626	3.122	19.975	23.374	4.981	63.068
2	Semarang Selatan	4.837	1.648	9.222	11.747	2.636	30.090
3	Semarang Timur	4.786	1.570	10.474	12.888	2.617	32.335
4	Semarang Utara	8.575	2.446	18.321	18.063	4.097	51.502
5	Semarang Tengah	3.379	1.279	7.807	12.054	2.081	26.600
6	Gayamsari	4.679	1.300	9.646	10.034	2.771	28.430
7	Pedurungan	11.148	3.915	22.304	19.668	7.043	64.078
8	Genuk	4.670	1.723	13.399	7.584	3.135	30.511
9	Tembalang	8.890	2.838	21.181	16.012	5.790	54.711
10	Candisari	5.627	1.929	10.301	12.606	3.052	33.515
11	Gunungpati	6.167	1.303	13.106	7.684	4.045	32.305
12	Banyumanik	8.285	3.140	15.789	17.926	5.150	50.290
13	Gajahmungkur	4.356	1.301	7.086	8.459	2.412	23.614
14	Mijen	4.377	950	9.105	5.435	1.673	21.540
15	Ngaliyan	9.477	2.757	17.570	13.358	5.263	48.425
16	Tugu	2.446	820	4.058	3.125	1.340	11.789
	<b>JUMLAH</b>	<b>103.325</b>	<b>32.031</b>	<b>209.344</b>	<b>200.017</b>	<b>58.086</b>	<b>602.803</b>

Sumber: Sekretariat KPU Kota Semarang (2008)

Tabel di atas bila dibandingkan dengan perolehan suara Sukawi pada Pilwakot 2005 terlihat bahwa selisih terbesar terjadi pada Kecamatan Semarang Barat, dimana pada Pilwakot pasangan Sukawi - Mahfudz memperoleh 47.967 suara sedangkan pada Pilgub pasangan Sukawi - Sudharto hanya memperoleh 19.975 suara.

## 4.2 Analisis Deskriptif

### 4.2.1 Gambaran Umum Responden

#### a. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden yang dijadikan sampel, baik laki-laki maupun perempuan, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.31**  
**Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Perbandingan			
		Sampel		BPS*	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	190	50,00%	576.193	49,31%
2	Perempuan	190	50,00%	592.374	50,69%
		380	100,00%	1.168.603	100,00%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 380 orang yang terdiri dari 190 orang laki-laki dan 190 orang perempuan dengan persentase masing-masing 50%. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data BPS tahun 2008, persentase penduduk laki-laki yang berusia lebih dari 14 tahun sebesar 49,31% dan 50,69% berjenis kelamin perempuan.

#### b. Responden berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok usia menurut BPS menggunakan *range* 4 tahun dimulai dari usia 0 - 4 tahun, 5 - 9 tahun, 10 - 14 tahun, 15 - 19 tahun, dan seterusnya hingga kelompok usia lebih dari 64 tahun. Adapun pada penelitian ini penulis membagi responden dalam beberapa kelompok usia

\*Penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun pada tahun 2007 (BPS, 2008)

dengan *range* usia yang dimodifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.32**  
**Responden berdasarkan Kelompok Usia**

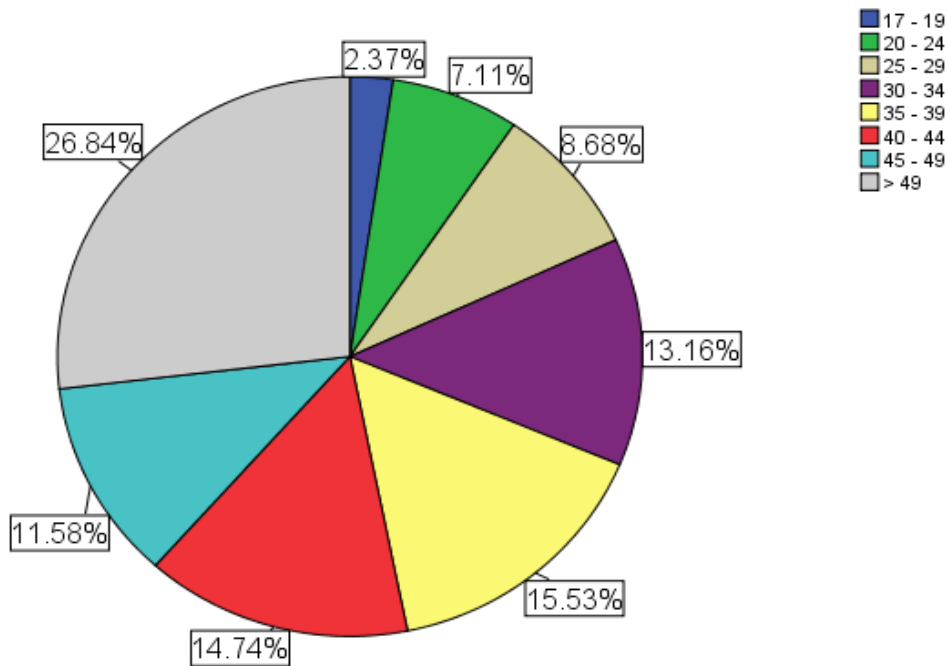
No	Kelompok Usia	Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	17 - 19 tahun	9	2,37%
2	20 - 24 tahun	27	7,11%
3	25 - 29 tahun	33	8,68%
4	30 - 34 tahun	50	13,16%
5	35 - 39 tahun	59	15,53%
6	40 - 44 tahun	56	14,74%
7	45 - 49 tahun	44	11,58%
8	> 49 tahun	102	26,84%
		380	100,00%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden terbesar berasal dari kelompok usia di atas 49 tahun, yaitu sebanyak 26,84%. Responden dalam penelitian ini adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2008. Konsekuensi logis dalam pengumpulan data di lapangan, bila menemui responden yang telah diacak sebelumnya tetapi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya, maka peneliti *me-random* kembali untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun tabel kelompok usia responden dapat digambarkan dalam *pie chart* sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Pie Chart Responden berdasarkan Kelompok Usia**



**c. Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan *interviewer* sehingga responden tidak memerlukan kemampuan khusus, seperti membaca. Hal tersebut berdasarkan data dari BPS yang menyatakan bahwa sebagian kecil penduduk Kota Semarang tidak sekolah dan tidak tamat SD. Adapun responden dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa tingkat pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.33**  
**Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

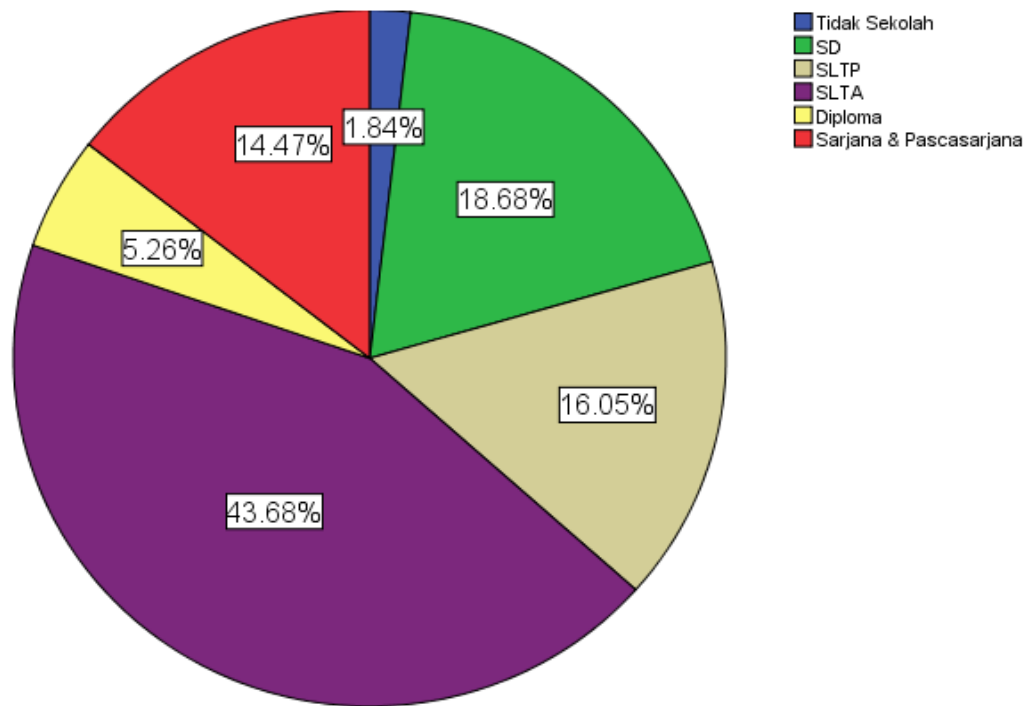
No	Pendidikan	Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD	7	1,84%
2	S D	71	18,68%
3	S L T P	61	16,05%
4	S L T A	166	43,68%
5	Diploma (D1/D2/D3)	20	5,26%
6	Sarjana / Pascasarjana	55	14,47%
		380	100,00%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas didapat sebanyak 1,84% responden yang tidak sekolah / tidak tamat SD. Responden terbesar berpendidikan setingkat SLTA, yaitu 43,68%. Data BPS menyebutkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan tamat akademi maupun universitas tidak sebesar sampel penelitian ini, namun teknik *sampling* penelitian menggunakan *random* sehingga sampel yang didapat apa adanya seperti tabel tersebut di atas.

Adapun tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini sebagaimana tabel di atas, dapat digambarkan dalam *pie chart* sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Pie Chart Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**



#### **d. Responden berdasarkan Agama**

Pengelompokan responden berdasarkan agama tidak dimaksudkan untuk membatasi atau “mengkotak-kotakkan” secara kaku. Untuk itu, penulis menambahkan agama Khonghucu yang telah diakui negara dan kemungkinan agama / kepercayaan lain bila menemui responden yang tidak memeluk 5 (lima) agama yang sebelumnya telah diakui negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Hindu.

Adapun responden penelitian ini berdasarkan agama yang dipeluknya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.34**  
**Responden berdasarkan Agama**

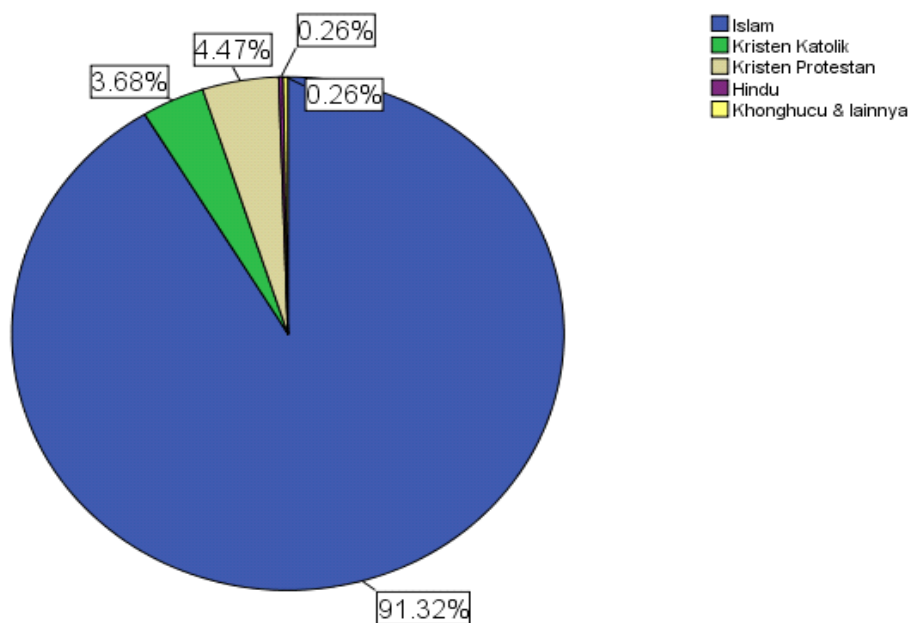
No	Pendidikan	Sampel	
		Jumlah	Persentase
1	Islam	347	91,32%
2	Kristen Katolik	14	3,68%
3	Kristen Protestan	17	4,47%
4	Buddha	0	0%
5	Hindu	1	0,26%
6	Khonghucu, dan lainnya	1	0,26%
		380	100,00%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden beragama Islam (91,32%) dan tidak seorang pun responden yang berhasil ditemui beragama Buddha. Satu orang responden yang ada di baris nomor 6 beragama Khonghucu.

Gambar *pie chart* responden berdasarkan agama dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.3**  
**Pie Chart Responden berdasarkan Agama**



## 4.2.2 Analisis Tabulasi Silang

### A. Hubungan antara Pilihan dalam Pilgub dan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah hasil tabulasi silang dengan menggunakan program SPSS antara pilihan dalam Pilgub dan jenis kelamin pemilih.

**Tabel 4.35**  
**Tabulasi Silang Pilihan dan Jenis Kelamin**

**PILIHAN \* Jenis\_Kelamin Crosstabulation**

			Jenis_Kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Total
PILIHAN	Bambang - Adnan	Count	28	23	51
		Expected Count	25.5	25.5	51.0
		% within PILIHAN	54.9%	45.1%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	14.7%	12.1%	13.4%
		% of Total	7.4%	6.1%	13.4%
	Agus - Kholiq	Count	6	7	13
		Expected Count	6.5	6.5	13.0
		% within PILIHAN	46.2%	53.8%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	3.2%	3.7%	3.4%
		% of Total	1.6%	1.8%	3.4%
	Sukawi - Sudharto	Count	45	55	100
		Expected Count	50.0	50.0	100.0
		% within PILIHAN	45.0%	55.0%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	23.7%	28.9%	26.3%
		% of Total	11.8%	14.5%	26.3%
	Bibit - Rustri	Count	100	89	189
		Expected Count	94.5	94.5	189.0
		% within PILIHAN	52.9%	47.1%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	52.6%	46.8%	49.7%
		% of Total	26.3%	23.4%	49.7%
	Tamzil - Rozaq	Count	11	16	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within PILIHAN	40.7%	59.3%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	5.8%	8.4%	7.1%
		% of Total	2.9%	4.2%	7.1%
Total		Count	190	190	380
		Expected Count	190.0	190.0	380.0
		% within PILIHAN	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Jenis_Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

pada baris (*row*) merupakan variabel PILIHAN (pilihan dalam Pilgub) yang terdiri dari 5 (lima) pasangan calon, sedangkan pada kolom (*coloumn*) adalah variabel jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Untuk responden yang memilih pasangan Bambang - Adnan berjumlah 51 orang, terdiri dari 28 laki-laki (54,9%) dan 23 perempuan (45,1%). Jumlah responden laki-laki tersebut merupakan 14,7% dari keseluruhan responden laki-laki dan 7,4% dari keseluruhan responden baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jumlah responden perempuan yang memilih pasangan Bambang - Adnan merupakan 12,1% dari keseluruhan responden perempuan dan 6,1% dari keseluruhan responden baik laki-laki maupun perempuan.

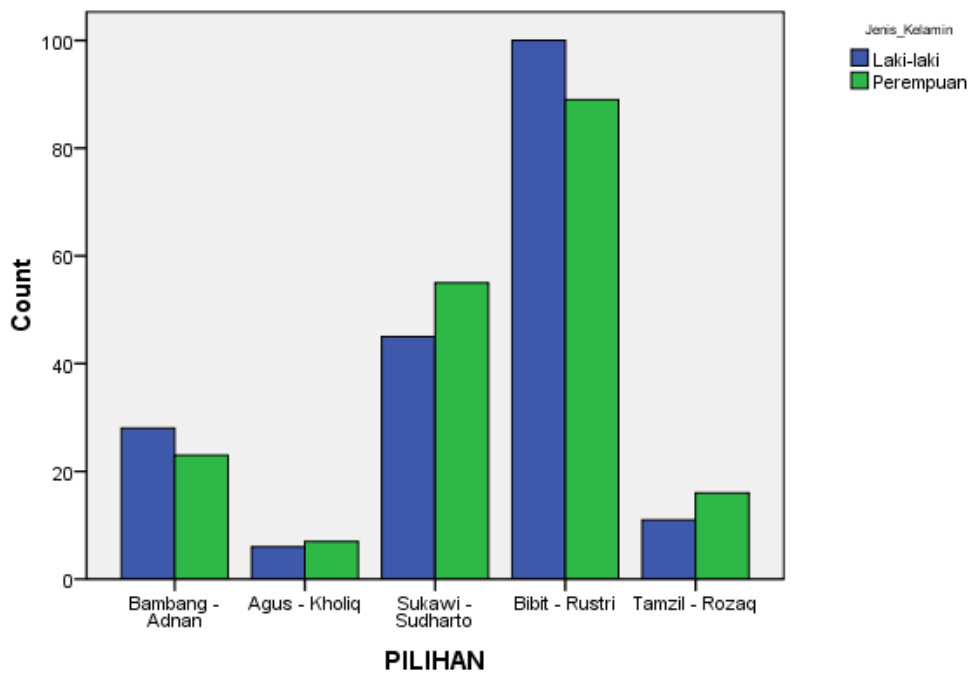
Untuk responden yang memilih pasangan lain, juga dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama namun dengan angka / persentase berbeda sesuai dengan tabel. Responden penelitian ini 380 orang. Sebanyak 189 responden, baik laki-laki maupun perempuan, memilih pasangan Bibit - Rustri, 100 responden memilih pasangan Sukawi - Sudharto, 51 responden memilih pasangan Bambang - Adnan, 27 responden pendukung pasangan Tamzil - Rozaq, dan hanya 13 responden yang memilih pasangan Agus - Kholiq.

Catatan khusus untuk sampel penelitian dibandingkan dengan populasinya, yaitu sebagian besar sampel memilih pasangan Bibit - Rustri padahal hasil penghitungan suara pasangan Sukawi - Sudharto menang tipis atas pasangan kandidat tersebut. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah: (1) responden tidak memberikan

informasi yang sebenarnya; (2) responden malu mengakui bahwa mereka memilih pasangan kandidat yang kalah (*bandwagon effects*); dan (3) random sampling membuat interviewer tidak dapat memilih sendiri responden sesuai pilihannya.

Adapun *bar chart* yang memperlihatkan pilihan responden dan jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Bar Chart antara Pilihan dengan Jenis Kelamin**



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa responden yang memilih pasangan Bibit - Rustri dan Bambang - Adnan lebih banyak yang laki-laki, sedangkan 3 (tiga) pasangan lain lebih banyak didukung oleh pemilih perempuan. Satu-satunya calon perempuan adalah Rustriningsih sebagai calon wakil gubernur dari calon gubernur Bibit Waluyo. Dalam kampanye maupun pernyataan politiknya, pasangan calon ini selalu

mengunggulkan dukungan suara perempuan.

Untuk menguji apakah ada hubungan antara pilihan dengan jenis kelamin digunakan *Chi-square tests*. Adapun hasil uji tersebut dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.36**  
**Hubungan antara Pilihan dan Jenis Kelamin**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.133 <sup>a</sup>	4	.536
Likelihood Ratio	3.142	4	.534
Linear-by-Linear Association	.136	1	.713
N of Valid Cases	380		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.50.  
Sumber: data primer yang diolah (2008)

Hasil *Chi-square* menunjukkan nilai sebesar 3,133 dengan probabilitas signifikansinya 0,536. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara pilihan dengan jenis kelamin karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05.

## **B. Hubungan antara Pilihan dalam Pilgub dan Usia**

Hubungan antara pilihan responden dengan usia juga akan dijelaskan menggunakan tabulasi silang, *bar chart*, dan uji *Chi-square*. Pasangan calon yang menggunakan *issue* atau citra yang terkait dengan usia adalah pasangan calon Tamzil - Rozaq.

Berikut ini adalah hasil tabulasi silang dengan menggunakan program SPSS antara pilihan dalam Pilgub dan usia pemilih.

**Tabel 4.37**  
**Tabulasi Silang Pilihan dan Kelompok Usia**

PILIHAN \* Usia Crosstabulation

		Usia								
		17 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	> 49	Total
PILIHAN - Adnan	Count	2	5	4	6	9	6	3	16	51
	Expected Count	1.2	3.6	4.4	6.7	7.9	7.5	5.9	13.7	51.0
	% within PILIHAN	3.9%	9.8%	7.8%	11.8%	17.6%	11.8%	5.9%	31.4%	100.0%
	% within Usia	22.2%	18.5%	12.1%	12.0%	15.3%	10.7%	6.8%	15.7%	13.4%
	% of Total	.5%	1.3%	1.1%	1.6%	2.4%	1.6%	.8%	4.2%	13.4%
Agus - Kholiq	Count	0	0	0	3	1	2	2	5	13
	Expected Count	.3	.9	1.1	1.7	2.0	1.9	1.5	3.5	13.0
	% within PILIHAN	.0%	.0%	.0%	23.1%	7.7%	15.4%	15.4%	38.5%	100.0%
	% within Usia	.0%	.0%	.0%	6.0%	1.7%	3.6%	4.5%	4.9%	3.4%
	% of Total	.0%	.0%	.0%	.8%	.3%	.5%	.5%	1.3%	3.4%
Sukawi - Sudharto	Count	3	9	8	11	15	13	13	28	100
	Expected Count	2.4	7.1	8.7	13.2	15.5	14.7	11.6	26.8	100.0
	% within PILIHAN	3.0%	9.0%	8.0%	11.0%	15.0%	13.0%	13.0%	28.0%	100.0%
	% within Usia	33.3%	33.3%	24.2%	22.0%	25.4%	23.2%	29.5%	27.5%	26.3%
	% of Total	.8%	2.4%	2.1%	2.9%	3.9%	3.4%	3.4%	7.4%	26.3%
Bibit - Rustri	Count	4	12	21	24	28	29	26	45	189
	Expected Count	4.5	13.4	16.4	24.9	29.3	27.9	21.9	50.7	189.0
	% within PILIHAN	2.1%	6.3%	11.1%	12.7%	14.8%	15.3%	13.8%	23.8%	100.0%
	% within Usia	44.4%	44.4%	63.6%	48.0%	47.5%	51.8%	59.1%	44.1%	49.7%
	% of Total	1.1%	3.2%	5.5%	6.3%	7.4%	7.6%	6.8%	11.8%	49.7%
Tamzil - Rozaq	Count	0	1	0	6	6	6	0	8	27
	Expected Count	.6	1.9	2.3	3.6	4.2	4.0	3.1	7.2	27.0
	% within PILIHAN	.0%	3.7%	.0%	22.2%	22.2%	22.2%	.0%	29.6%	100.0%
	% within Usia	.0%	3.7%	.0%	12.0%	10.2%	10.7%	.0%	7.8%	7.1%
	% of Total	.0%	.3%	.0%	1.6%	1.6%	1.6%	.0%	2.1%	7.1%
Total	Count	9	27	33	50	59	56	44	102	380
	Expected Count	9.0	27.0	33.0	50.0	59.0	56.0	44.0	102.0	380.0
	% within PILIHAN	2.4%	7.1%	8.7%	13.2%	15.5%	14.7%	11.6%	26.8%	100.0%
	% within Usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	2.4%	7.1%	8.7%	13.2%	15.5%	14.7%	11.6%	26.8%	100.0%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

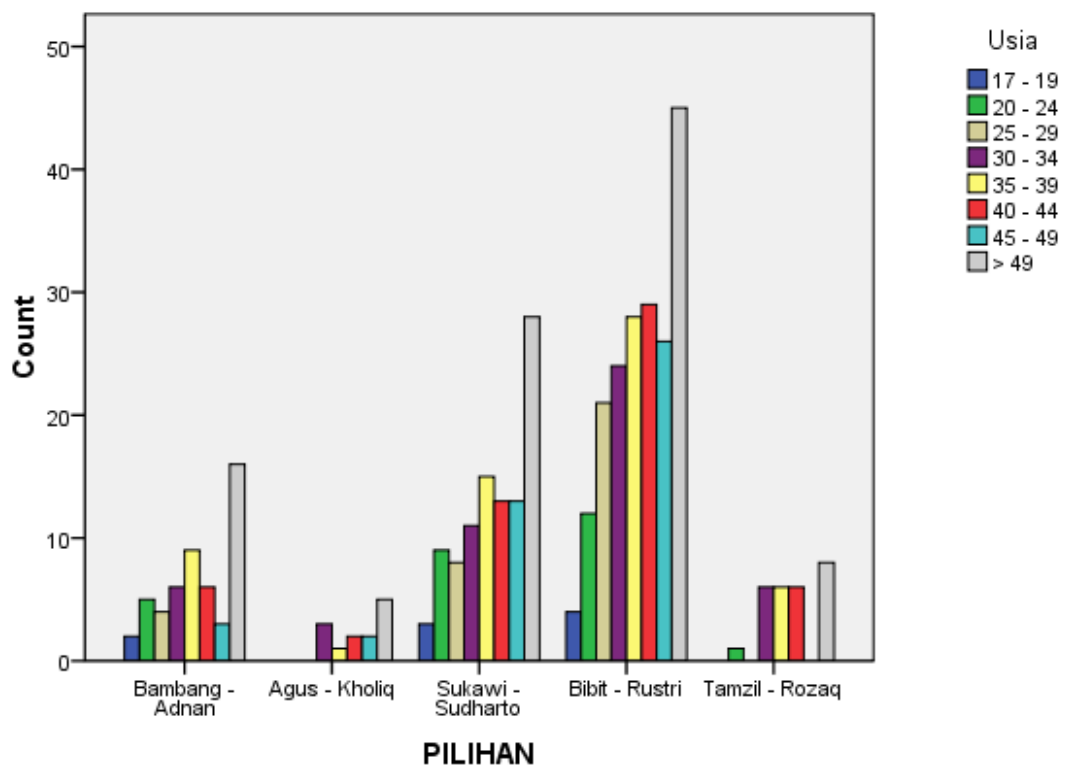
pada baris (*row*) merupakan variabel PILIHAN (pilihan dalam Pilgub) yang terdiri dari 5 (lima) pasangan calon, sedangkan pada kolom (*coloumn*) adalah variabel kelompok usia, yaitu 17 - 19 tahun, 20 - 24 tahun, 25 - 29 tahun, 30 - 34 tahun, 35 - 39 tahun, 40 - 44 tahun, 45 - 49 tahun dan > 49

tahun.

Sebagai sampel akan dijelaskan untuk responden yang memilih pasangan Tamzil - Rozaq yang berjumlah 27 orang, terdiri dari 1 orang berusia 20 - 24 tahun (3,7%), 6 orang berusia 30 - 34 tahun (22,2%), 6 orang berusia 35-39 tahun (22,2%), 6 orang berusia 40 - 44 orang (22,2%), dan 8 orang berusia lebih dari 49 tahun (29,6%).

Adapun *bar chart* yang memperlihatkan pilihan responden dan kelompok usia adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.5**  
**Bar Chart** antara Pilihan dengan Kelompok Usia



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa semua pasangan calon, pendukung terbanyaknya berusia lebih dari 49 tahun. Meski tidak

menggunakan *issue* kelompok usia yang ditarget menjadi pendukungnya, pasangan Bibit - Rustri justru masih yang terbanyak mendapat dukungan kaum muda.

Untuk menguji apakah ada hubungan antara pilihan dengan kelompok usia digunakan *Chi-square tests*. Adapun hasil uji tersebut dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.38**  
**Hubungan antara Pilihan dan Kelompok Usia**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	22.793 <sup>a</sup>	28	.743
Likelihood Ratio	30.707	28	.330
Linear-by-Linear Association	.004	1	.948
N of Valid Cases	380		

a. 20 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .31.  
Sumber: data primer yang diolah (2008)

Hasil *Chi-square* menunjukkan nilai sebesar 22,793 dengan probabilitas signifikansinya 0,743. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara pilihan dengan usia karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05.

### C. Hubungan antara Pilihan dalam Pilgub dan Tingkat Pendidikan

Adapun analisa selanjutnya akan dijelaskan mengenai hubungan antara pilihan dan tingkat pendidikan. Hasil tabulasi silang untuk dua variabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.39**  
**Tabulasi Silang Pilihan dan Tingkat Pendidikan**

PILIHAN \* Pendidikan Crosstabulation

		Pendidikan						Total
		Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana & Pasca	
PILIHAN Bambang - Adnan	Count	1	5	10	21	1	13	51
	Expected Count	.9	9.5	8.2	22.3	2.7	7.4	51.0
	% within PILIHAN	2.0%	9.8%	19.6%	41.2%	2.0%	25.5%	100.0%
	% within Pendidikan	14.3%	7.0%	16.4%	12.7%	5.0%	23.6%	13.4%
	% of Total	.3%	1.3%	2.6%	5.5%	.3%	3.4%	13.4%
Agus - Kholiq	Count	0	2	1	7	2	1	13
	Expected Count	.2	2.4	2.1	5.7	.7	1.9	13.0
	% within PILIHAN	.0%	15.4%	7.7%	53.8%	15.4%	7.7%	100.0%
	% within Pendidikan	.0%	2.8%	1.6%	4.2%	10.0%	1.8%	3.4%
	% of Total	.0%	.5%	.3%	1.8%	.5%	.3%	3.4%
Sukawi - Sudharto	Count	1	27	12	42	8	10	100
	Expected Count	1.8	18.7	16.1	43.7	5.3	14.5	100.0
	% within PILIHAN	1.0%	27.0%	12.0%	42.0%	8.0%	10.0%	100.0%
	% within Pendidikan	14.3%	38.0%	19.7%	25.3%	40.0%	18.2%	26.3%
	% of Total	.3%	7.1%	3.2%	11.1%	2.1%	2.6%	26.3%
Bibit - Rustri	Count	5	33	31	87	7	26	189
	Expected Count	3.5	35.3	30.3	82.6	9.9	27.4	189.0
	% within PILIHAN	2.6%	17.5%	16.4%	46.0%	3.7%	13.8%	100.0%
	% within Pendidikan	71.4%	46.5%	50.8%	52.4%	35.0%	47.3%	49.7%
	% of Total	1.3%	8.7%	8.2%	22.9%	1.8%	6.8%	49.7%
Tamzil - Rozaq	Count	0	4	7	9	2	5	27
	Expected Count	.5	5.0	4.3	11.8	1.4	3.9	27.0
	% within PILIHAN	.0%	14.8%	25.9%	33.3%	7.4%	18.5%	100.0%
	% within Pendidikan	.0%	5.6%	11.5%	5.4%	10.0%	9.1%	7.1%
	% of Total	.0%	1.1%	1.8%	2.4%	.5%	1.3%	7.1%
Total	Count	7	71	61	166	20	55	380
	Expected Count	7.0	71.0	61.0	166.0	20.0	55.0	380.0
	% within PILIHAN	1.8%	18.7%	16.1%	43.7%	5.3%	14.5%	100.0%
	% within Pendidikan	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	1.8%	18.7%	16.1%	43.7%	5.3%	14.5%	100.0%

Sumber: data primer yang diolah (2008)

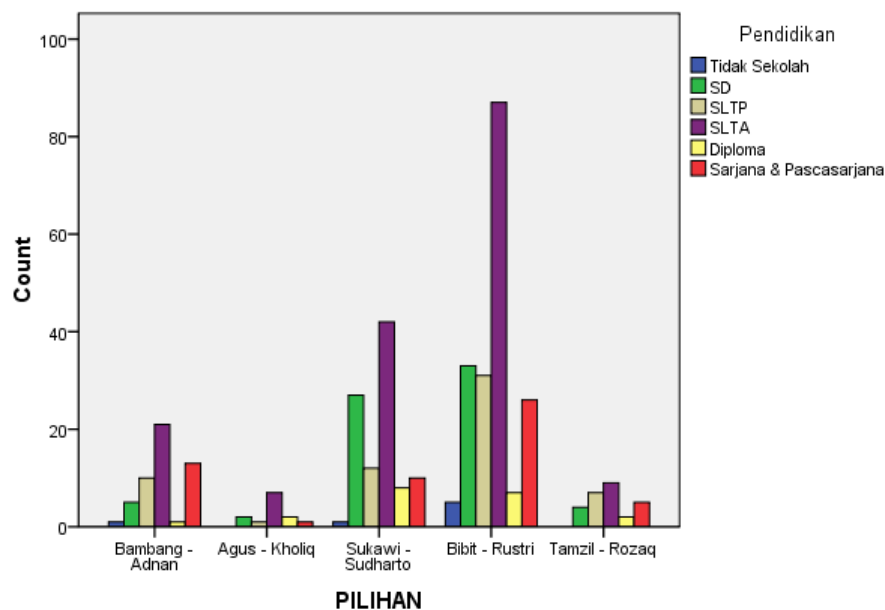
Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: pada baris (*row*) merupakan variabel PILIHAN (pilihan dalam Pilgub) yang terdiri dari 5 (lima) pasangan calon, sedangkan pada kolom (*coloumn*) adalah variabel tingkat pendidikan, yaitu tidak sekolah, setingkat SD, setingkat SLTP, setingkat SLTA, setingkat Diploma, dan setingkat Sarjana

/ Pascasarjana.

Sebagai sampel akan dijelaskan untuk responden yang memilih pasangan Sukawi - Sudharto yang berjumlah 100 orang, terdiri dari 1 orang tidak sekolah (1%), 27 orang berpendidikan setingkat SD (27%), 12 orang berpendidikan setingkat SLTP (12%), 42 orang berpendidikan setingkat SLTA (42%), 8 orang berpendidikan setingkat Diploma (8%), dan 10 orang berpendidikan setingkat Sarjana / Pascasarjana (10%).

Adapun *bar chart* yang memperlihatkan pilihan responden dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.6**  
**Bar Chart** antara Pilihan dengan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa semua pasangan calon, pendukung terbanyaknya memiliki pendidikan setingkat SLTA. Meskipun demikian, masing-masing calon berpendidikan setingkat Sarjana / Pascasarjana hanya Bibit Waluyo dan Agus Soeyitno yang berasal dari Akademi Militer.

Untuk menguji apakah ada hubungan antara pilihan dengan tingkat pendidikan digunakan *Chi-square tests*. Adapun hasil uji tersebut dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.40**  
**Hubungan antara Pilihan dan Tingkat Pendidikan**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	25.640 <sup>a</sup>	20	.178
Likelihood Ratio	25.165	20	.195
Linear-by-Linear Association	1.519	1	.218
N of Valid Cases	380		

a. 13 cells (43.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .24.

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Hasil *Chi-square* menunjukkan nilai sebesar 25,640 dengan probabilitas signifikansinya 0,178. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara pilihan dengan tingkat pendidikan karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05.

#### **D. Hubungan antara Agama dan Pilihan dalam Pilgub**

Selanjutnya tabulasi silang antara pilihan dan agama yang dianut responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.41**  
**Tabulasi Silang Pilihan dan Agama**

**PILIHAN \* Agama Crosstabulation**

		Agama					
		Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Hindu	Khonghucu & lainnya	Total
PILIHAN - Adnan	Count	45	4	2	0	0	51
	Expected Count	46.6	1.9	2.3	.1	.1	51.0
	% within PILIHAN	88.2%	7.8%	3.9%	.0%	.0%	100.0%
	% within Agama	13.0%	28.6%	11.8%	.0%	.0%	13.4%
	% of Total	11.8%	1.1%	.5%	.0%	.0%	13.4%
Agus - Kholiq	Count	12	0	1	0	0	13
	Expected Count	11.9	.5	.6	.0	.0	13.0
	% within PILIHAN	92.3%	.0%	7.7%	.0%	.0%	100.0%
	% within Agama	3.5%	.0%	5.9%	.0%	.0%	3.4%
	% of Total	3.2%	.0%	.3%	.0%	.0%	3.4%
Sukawi - Sudharto	Count	91	4	4	0	1	100
	Expected Count	91.3	3.7	4.5	.3	.3	100.0
	% within PILIHAN	91.0%	4.0%	4.0%	.0%	1.0%	100.0%
	% within Agama	26.2%	28.6%	23.5%	.0%	100.0%	26.3%
	% of Total	23.9%	1.1%	1.1%	.0%	.3%	26.3%
Bibit - Rustri	Count	172	6	10	1	0	189
	Expected Count	172.6	7.0	8.5	.5	.5	189.0
	% within PILIHAN	91.0%	3.2%	5.3%	.5%	.0%	100.0%
	% within Agama	49.6%	42.9%	58.8%	100.0%	.0%	49.7%
	% of Total	45.3%	1.6%	2.6%	.3%	.0%	49.7%
Tamzil - Rozaq	Count	27	0	0	0	0	27
	Expected Count	24.7	1.0	1.2	.1	.1	27.0
	% within PILIHAN	100.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	% within Agama	7.8%	.0%	.0%	.0%	.0%	7.1%
	% of Total	7.1%	.0%	.0%	.0%	.0%	7.1%
Total	Count	347	14	17	1	1	380
	Expected Count	347.0	14.0	17.0	1.0	1.0	380.0
	% within PILIHAN	91.3%	3.7%	4.5%	.3%	.3%	100.0%
	% within Agama	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	91.3%	3.7%	4.5%	.3%	.3%	100.0%

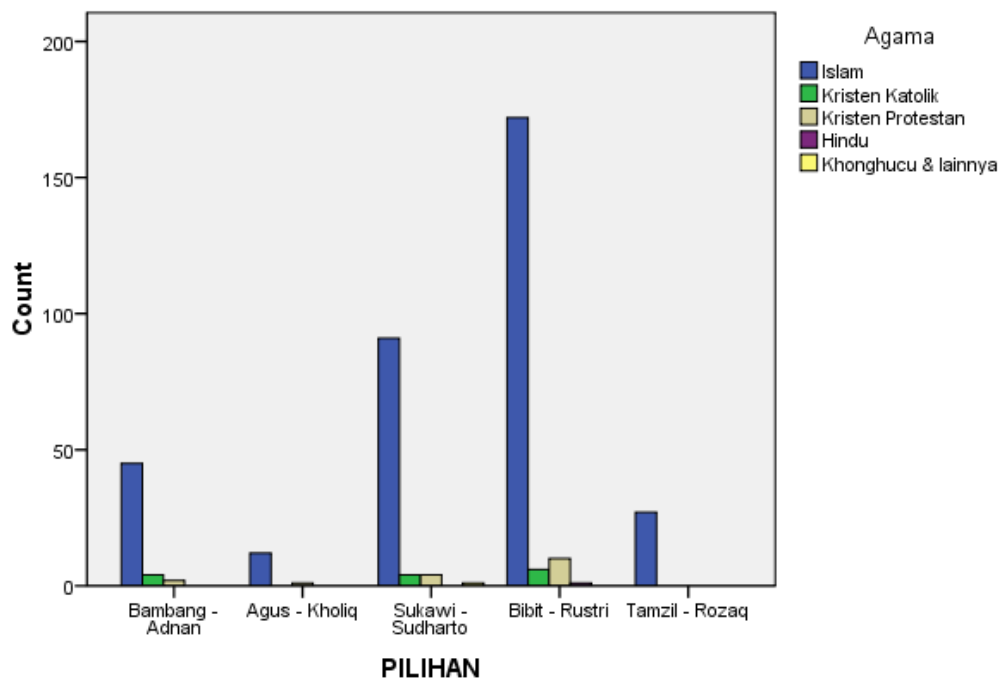
Sumber: data primer yang diolah (2008)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: pada baris (*row*) merupakan variabel PILIHAN (pilihan dalam Pilgub) yang terdiri dari 5 (lima) pasangan calon, sedangkan pada kolom (*coloumn*) adalah variabel agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Khonghucu. Mayoritas responden dalam penelitian ini maupun mayoritas pemilih di Kota Semarang beragama Islam.

Sebagai sampel akan dijelaskan untuk responden yang memilih pasangan Bibit - Rustri yang berjumlah 189 orang, terdiri dari 172 orang beragama Islam (91%), 6 orang beragama Kristen Katolik (3,2%), 10 orang beragama Kristen Protestan (5,3%), dan 1 orang beragama Hindu (0,5%).

Adapun *bar chart* yang memperlihatkan pilihan responden dan agama yang dianutnya adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.7**  
**Bar Chart antara Pilihan dengan Agama yang Dianut**



Berdasarkan *bar chart* di atas, dapat diketahui bahwa pasangan Sukawi - Sudharto dan pasangan Bibit - Rustri didukung oleh 4 (empat) agama yang dianut oleh responden. Hanya pasangan Tamzil - Rozaq yang didukung oleh responden yang beragama Islam saja, tidak satupun pemeluk agama selain Islam yang memilihnya.

Untuk menguji apakah ada hubungan antara pilihan dengan agama yang dianut digunakan *Chi-square tests*. Adapun hasil uji tersebut dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.42**  
**Hubungan antara Pilihan dan Agama**

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.995 <sup>a</sup>	16	.867
Likelihood Ratio	12.275	16	.725
Linear-by-Linear Association	.365	1	.546
N of Valid Cases	380		

a. 18 cells (72.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Hasil *Chi-square* menunjukkan nilai sebesar 9,995 dengan probabilitas signifikansinya 0,867. Hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara pilihan dengan agama yang dianut karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05.

### 4.3 Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan pada beberapa responden sebelum disebarkan ke seluruh sampel penelitian untuk mengetahui sah atau

validnya kuesioner maupun kehandalannya. Dengan kata lain, pengujian instrumen dilakukan untuk mendapatkan ketepatan pengukuran variabel yang digunakan dengan beberapa indikator sebagai penyusunnya. Pengujian ini dilakukan untuk menghilangkan bias penelitian yang muncul dari kesalahan pengukuran masing-masing konstruk variabel.

#### 4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala / kejadian yang diukur. Validitas dari seluruh konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.43**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Indikator	Pearson Corelation	Probabilitas	Keterangan
1	Citra kandidat			
	- Item 1	0,828	0,000	valid
	- Item 2	0,648	0,000	valid
	- Item 3	0,874	0,000	valid
	- Item 4	0,735	0,000	valid
	- Item 5	0,851	0,000	valid
	- Item 6	0,892	0,000	valid
2	Efektivitas kampanye			
	- Item 1	0,494	0,010	valid
	- Item 2	0,437	0,025	valid
	- Item 3	0,752	0,000	valid
	- Item 4	0,680	0,000	valid
	- Item 5	0,733	0,000	valid
	- Item 6	0,710	0,000	valid

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 ( $p < 0,05$ ). Oleh karena korelasi antara item indikator dan konstruk signifikan

pada hasil pengujian dua sisi (*two tailed*) maka dapat dinyatakan bahwa seluruh alat ukur yang diuji tersebut adalah valid.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat ukur untuk dapat digunakan lagi dalam penelitian yang sama. Pengujian ini menggunakan *cronbach's alpha* yang didapat dari masing-masing konstruk. Adapun hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 4.44**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Citra Kandidat**

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.892	6

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel citra kandidat adalah 0,89. *N of Items* dalam tabel tersebut merupakan banyaknya indikator yang digunakan pada variabel ini.

**Tabel 4.45**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas Kampanye**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.670	.709	6

Sumber: data primer yang diolah (2008)

Nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel efektivitas kampanye adalah 0,67. *N of Items* dalam tabel tersebut merupakan banyaknya indikator yang digunakan pada variabel ini.

Kedua data di atas menunjukkan bahwa masing-masing alat ukur yang digunakan reliabel karena memiliki *cronbach alpha* lebih dari 0,6. Sedangkan menurut Budi (2006), nilai *cronbach alpha* yang diperoleh termasuk dalam kategori reliabel (antara 0,60 - 0,80) dan sangat reliabel (antara 0,80 - 1,00).

#### **4.4 Uji Hipotesis**

Dalam penelitian ini dilakukan analisis diskriminan dengan menggunakan lima grup pada variabel dependennya. Tujuan analisis ini adalah menentukan hubungan antara pilihan dalam Pilgub dengan citra kandidat, tingkat identifikasi partai dan efektivitas kampanye.

Adapun sebelum dilakukan analisis tersebut, asumsi normalitas data harus terpenuhi terlebih dahulu. Hasil uji normalitas atas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.46**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PILIHAN	Citra_ Kandidat	Identifikasi_ Partai	Efektivitas_ Kampanye
N		380	380	380	380
Normal	Mean	3.33	21.40	3.36	20.83
Parameters <sup>a</sup>	Std. Deviation	1.121	3.768	4.680	3.260
Most	Absolute				
Extreme		.293	.180	.335	.135
Differences	Positive	.204	.180	.335	.112
	Negative	-.293	-.152	-.236	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		5.710	3.500	6.528	2.634
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data primer yang diolah (2009)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua data, baik variabel dependen maupun variabel independennya tidak satupun yang memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut terlihat dari nilai Kolmogorov-Smirnov jauh di bawah 0,05. Dengan demikian MDA tidak dapat digunakan sehingga selanjutnya menggunakan analisis *multinomial logistic regression*.

Berikut adalah hasil analisis regresi logistiknya berdasarkan pengolahan SPSS.

**Tabel 4.47**  
**Model Fitting Information**

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	degrees of freedom	significance
Intercept Only	706.539			
Final	696.624	9.915	12	.623

Sumber: data primer yang diolah (2009)

Tabel di atas menunjukkan bahwa model secara keseluruhan, variabel independennya tidak dapat memprediksi variasi dari variabel dependennya. Terlihat bahwa signifikansinya jauh di atas 0,05 yaitu sebesar 0,623.

Selanjutnya dapat dilihat hasil analisis yang menunjukkan kontribusi dari masing-masing variabel independennya.

**Tabel 4.48**  
**Likelihood Ratio Tests**

Effect	-2 Log Likelihood Reduced	Chi-Square	degrees of freedom	significance
Intercept	703.188	6.564	4	.161
CITRA_KANDIDAT	701.597	4.973	4	.290
IDENTIFIKASI_PARTAI	699.835	3.212	4	.523
EFEKTIVITAS_KAMPANYE	698.867	2.243	4	.691

Sumber: data primer yang diolah (2009)

Pada tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa nilai signifikansi variabel citra kandidat 0,290, identifikasi partai 0,523, dan efektivitas kampanye 0,691. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel independennya jauh di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak satupun variabel independent dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap variabel dependennya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan masalah penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I bahwa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “bagaimana meningkatkan perolehan suara di daerah pemilihan Kota Semarang”. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikembangkan beberapa pernyataan yang didukung bukti empirik sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama, yaitu “*Citra kandidat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih*”.
- 2) Hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua, yaitu “*Tingkat identifikasi partai berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih*”.
- 3) Hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga, yaitu “*Efektivitas kampanye berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih*”.
- 4) Hasil penelitian ini juga menolak hipotesis keempat, yaitu “*Citra kandidat, tingkat identifikasi partai, dan efektivitas kampanye secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih*”.

Hasil analisis dari penelitian ini didapat beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara jenis kelamin dengan perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa baik pemilih laki-laki maupun perempuan tidak memiliki kecenderungan untuk memilih salah satu pasangan calon. Sebagai contoh, pemilih perempuan tidak memilih pasangan calon Bibit - Rustri saja, meskipun hanya pasangan calon tersebut yang mengusung wakil gubernur dari perempuan.
- 2) Tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara usia dengan perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa kelompok pemilih muda maupun tua juga tidak cenderung memilih satu pasangan calon.
- 3) Tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa baik pemilih yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi juga tidak memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan calon tertentu.
- 4) Tidak terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara agama yang dianut dengan perilaku pemilih. Hal tersebut berarti bahwa baik pemilih yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun Khonghucu tidak cenderung memilih satu pasangan calon.

## 5.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa implikasi kebijakan, sesuai prioritas, yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi informasi kampanye tidak berjalan sebagaimana mestinya. Presentasi-presentasi media kampanye hanya mampu menggugah *awareness* pemilih, belum menuju pada tataran mempengaruhi keputusan memilih. Penyampaian kampanye harus lebih menarik karena sebuah pesan sulit menghasilkan perubahan apabila tidak menarik, dan sebaliknya bila isi pesan itu sendiri kurang menarik akan tetapi disampaikan dengan minat dan selera massa, ada kemungkinan bahwa pesan tersebut menghasilkan perubahan yang diinginkan. Bagi sebagian besar masyarakat kita model kampanye seperti 'hura-hura' mengumpulkan massa di tempat terbuka disertai iring-iringan kendaraan masih belum bisa ditinggalkan namun perubahan ke arah model kampanye yang lebih dialogis tetap dilakukan untuk menjaring pemilih di segmen menengah ke atas. Selain itu, metode kampanye lain seperti *door to door*, layak untuk dicoba dan dievaluasi efektivitasnya; pemberdayaan figur-figur yang populer dalam masyarakat juga harus dioptimalkan dengan pemberian informasi yang memadai; dan kampanye melalui komunitas-komunitas formal maupun non formal dimana pemilih merasa nyaman melakukan sebagian aktivitas sosialnya juga perlu dilakukan. Alasan menempatkan kampanye sebagai prioritas pertama adalah menyangkut besarnya dana yang dikeluarkan oleh

masing-masing pasangan calon.

- 2) Citra kandidat (*candidate personality*), yaitu mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat. Peran kehumasan sangat penting dalam pencitraan ini. Kandidat politik dan tim pemenangannya hendaknya dapat menciptakan citra positif yang diharapkan dan kemudian diterima oleh pemilih. Pencitraan merupakan suatu kegiatan yang berlangsung relatif lama dan berkelanjutan. Hal itu disebabkan oleh lamanya proses penerimaan citra itu di benak para pemilih. Untuk memenangi adu siasat di kancah pilkada, ide memaksimalkan peran kehumasan yang integral dengan tim sukses menjadi terobosan yang harus dipertimbangkan oleh kandidat. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa tiap-tiap kandidat, terlepas dari berbagai isu yang melingkunginya, sangat memerlukan *image* baik di mata pemilihnya. Namun, tentu kita berharap gagasan tentang target *image* ini tak kemudian disalah gunakan oleh para kandidat yang sekadar berkepentingan membersihkan namanya demi memenangi pilkada.
- 3) Identifikasi kepartaian adalah ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu secara terus menerus tanpa perlu pengakuan legal atau bukti-bukti formal. Bahkan, tanpa diperlukan suatu catatan bahwa orang-orang tersebut secara konsisten mendukung partai tertentu. Identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu memerlukan waktu yang lama melalui proses sosialisasi politik berupa transformasi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang

berlangsung secara terus menerus. Identifikasi partai yang semakin hilang pada dimensi emosional pemilih merupakan salah satu bukti kegagalan partai sebagai pengintegrasian dan mobilisasi warga negara. Partai juga banyak dinilai pemilih gagal melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan. Banyaknya partai yang datang silih berganti dan banyaknya pemilihan umum (termasuk Pilkada) membuat pemilih cenderung bosan karena tidak mendapatkan perubahan yang dijanjikan. Penyederhanaan sistem kepartaian perlu dilakukan dengan tidak menyumbat saluran aspirasi rakyat sebagaimana di masa orde baru. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pemilih mengidentifikasikan dirinya dengan partai mana mereka akan berafiliasi. Selanjutnya partai yang ada fokus pada fungsinya untuk mengembangkan diri, bukan lagi berebut suara agar tetap bertahan di Pemilu berikutnya. Namun, untuk saat ini yang diperlukan adalah optimalisasi performa mesin partai.

- 4) Pengelompokkan pemilih berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan agama yang dianut terbukti tidak memiliki hubungan dengan perilaku pemilih sehingga penawaran *issue* hendaknya tidak mewakili suatu kelompok tersebut. Perilaku pemilih tidak konstan / tetap dari waktu ke waktu. *Swing voters* merupakan suatu peluang maupun tantangan dalam perebutan suara yang harus dikelola dengan baik.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Responden kurang serius dalam menjawab pertanyaan kuesioner. Dari hasil pengumpulan data, sebagian responden menjawab “lupa” atas pilihannya. *Interviewer* harus sedikit bekerja lebih keras hingga responden tersebut mengingat kembali pasangan calon yang dipilihnya.
2. Sebagian responden memiliki keterbatasan pemahaman atas pertanyaan yang dimaksud dalam kuesioner. Penulis mengetahui hal tersebut dari para *interviewer* yang bertugas mengumpulkan data, dimana yang bersangkutan harus menanyakan kembali pertanyaan yang sama dengan bahasa yang sedikit berbeda.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Semarang, yang pengumpulan data primernya disebarkan kepada responden yang dituju dengan didampingi *interviewer* (pewawancara). Penulis memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga hanya mampu mengumpulkan data di satu kota saja.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Beberapa agenda penelitian mendatang yang dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian mendatang hendaknya lebih banyak menggunakan survei-survei pendahuluan yang menggambarkan perilaku pemilih baik dalam waktu tertentu maupun secara berkala. Sebagai contoh,

penelitian mengenai efektivitas kampanye dapat dilakukan sebelum masa kampanye, ketika masa kampanye, dan setelah masa kampanye selesai.

2. Penelitian mendatang hendaknya mampu menguji variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih, seperti: *issues and policy, current events, personal events, social imagery* maupun faktor-faktor epistemik.
3. Untuk mendapatkan hasil data primer yang optimal, hendaknya setiap kuesioner yang disebarakan didampingi oleh *interviewer* yang telah diberikan pembekalan yang cukup, baik mengenai variabel yang diteliti maupun metodologinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir perbedaan pemahaman, ketidakseriusan reponden, dan permasalahan lainnya.
4. Agar penelitian mendatang lebih optimal, hendaknya membandingkan dengan perilaku pemilih di beberapa daerah sekaligus namun tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan.
5. Structural Equation Modeling (SEM) agar digunakan dalam penelitian berikutnya guna menjaring lebih banyak variabel dan supaya dapat menjelaskan fenomena perilaku pemilih sebaiknya menggabungkan metode kuantitatif tersebut dengan metode kualitatif

## **5.5 Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

### **5.5.1 Faktor Demografi**

Hasil penelitian dari Lingkaran Survei Indonesia (2008) menunjukkan bahwa dari ketiga kasus Pilkada (Kota Ambon, Kota Manado, dan Kabupaten Bolaang Mongondow) tampak adanya pola dan peran yang berbeda. Di Kota Ambon, agama tampak tidak memainkan peran dalam preferensi pemilih. Dalam arti pemilih yang beragama Islam tidak lantas lebih condong untuk memilih kandidat yang beragama Islam, dan demikian juga sebaliknya. Sementara di Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow, latar belakang agama kandidat tampak mempengaruhi preferensi pemilih. Di kalangan pemilih Islam misalnya, lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Islam. Kasus ini terjadi dalam Pilkada Kota Manado. Atau sebaliknya, di kalangan pemilih Kristen lebih cenderung memilih pasangan kandidat dimana terdapat calon yang beragama Kristen. Kasus ini terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah, kelima pasangan calon beragama Islam sehingga pemilih di Kota Semarang tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan agama yang dianutnya. Hal tersebut dapat berarti bahwa faktor agama memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mempengaruhi preferensi pemilih dalam Pilkada.

Selanjutnya penelitian Rosyadi (2005) juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan kesimpulan yang didapat penulis, yaitu faktor yang

sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di Kelurahan Pejuang (Bekasi) adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan identifikasi partai yang dilandasi sentimen keagamaan dan kharisma kandidat serta relatif tetap atau tidak berubah dalam memilih salah satu partai politik.

Dan

pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang mengedepankan isu-isu yang sesuai dengan harapan mereka, melihat kemampuan dan moralitas kandidat.

Meski penelitian Rosyadi (2005) adalah perilaku pemilih pada level pemilihan partai, namun yang perlu mendapat perhatian terkait dengan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan perilaku pemilih. Adapun penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada daerah yang berbeda untuk mengetahui perilaku pemilih terkait dengan jenis kelamin dan kelompok usia.

### **5.5.2 Kandidat**

Gama dan Widarwati (2008) melakukan penelitian pada pemilih perempuan, yaitu ibu-ibu rumah tangga dengan temuan bahwa terdapat hubungan antara perilaku pemilih dengan isu dan kebijakan politik; perasaan emosional; citra kandidat; dan faktor epistemik kandidat.

Mengutip pendapat Lau dan Sears (1986), pemilih bukanlah orang yang banyak meluangkan waktu dan mendayagunakan sumber-sumber

daya signifikan yang dimilikinya untuk mengevaluasi kandidat. Penilaian terhadap citra kandidat membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu, pemilih di Kota Semarang tidak menjadikan faktor citra sebagai dasar preferensinya, berbeda dengan hasil penelitian Gama dan Widarwati (2008) dimana respondennya cenderung memiliki banyak “waktu”.

Variabel citra kandidat merupakan salah satu variabel yang diambil oleh penulis dari jurnal yang ditulis oleh Newman dan Sheth (1985), dimana di dalamnya masih ada enam faktor lain yang mempengaruhi preferensi pemilih pada kandidat tertentu, yaitu isu dan kebijakan, citra sosial, perasaan emosional, peristiwa mutakhir, peristiwa personal, dan faktor-faktor epistemik. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan keenam variabel tersebut perlu dilakukan, mengingat tiga variabel di antaranya telah terbukti memiliki hubungan dengan perilaku pemilih di daerah lain.

### **5.5.3 Partai**

Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (2008) didapat beberapa temuan di level nasional, di antaranya adalah: (1) sumber utama dari *swing voter* adalah lemahnya ikatan psikologis atau identifikasi diri pemilih dengan partai politik tertentu. Secara umum, hanya 15% dari pemilih Indonesia yang merasa sebagai orang partai tertentu. Selebihnya mengambang. Tidak punya identitas partai atau identitas politik; (2) sumber dari tidak adanya identitas partai terkait dengan pandangan publik tentang partai secara umum. Hampir sebagian dari pemilih (44%) tidak melihat satupun partai secara positif: tidak korup, punya program yang

bagus untuk rakyat, peduli pada rakyat, dan punya pemimpin yang kompeten. Secara lebih khusus, mayoritas pemilih menilai tidak ada partai yang tidak korup. Semuanya korup!; dan (3) pemilih di Provinsi Jawa Tengah dan DIY dalam survei tersebut memiliki tingkat *swing voter* 23% pada tiga partai, yaitu Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Pada Pilkada masyarakat memilih pasangan kandidat bukan partai. Hal tersebut dapat dilihat dari temuan Eriyanto, dkk (2008) bahwa ada beberapa penjelasan mengapa kemenangan dalam Pemilu Legislatif tidak selalu diikuti dengan kemenangan calon yang diusung dalam Pilkada. Pertama, pemilihan kepala daerah pada dasarnya pertarungan orang dan bukan partai. Pemilih lebih memilih orang dibandingkan dengan partai. Calon yang diusung oleh partai pemenang Pemilu Legislatif jika kurang “menjual” sulit untuk dipilih oleh pemilih. Kedua, keberhasilan dalam mengusung calon ditentukan oleh apakah mesin politik bisa didayagunakan dengan baik atau tidak oleh partai. Mesin politik ini bukan hanya struktur dan jaringan partai sampai ke akar rumput, tetapi juga loyalitas pemilih. Dukungan partai yang terpecah-pecah, misalnya ada beberapa kandidat dari partai yang ikut maju dalam pertarungan (seperti kasus Golkar dalam Pilkada Sumatera Utara) bisa mengurangi loyalitas dan dukungan penuh dari pemilih. Pemilih tidak bisa diharapkan secara penuh mendukung calon yang diusung partai ketika banyak kader dari partai yang ikut bertarung dalam pemilihan.

Di Kota Semarang, PDIP merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 namun ketika

pemilihan Walikota / Wakil Walikota justru calon yang diusung oleh PDIP tidak mampu berbicara banyak. Kandidat yang diusung Partai Demokrat dan PKS menang telak 74,14%. Kemudian pada Pilgub 2008, kandidat yang diusung PDIP mendapat perolehan suara sebesar 33,18% yang hampir berimbang dengan perolehan suara kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS sebanyak 34,73%. Pada Pemilu 2004 PDIP memperoleh 208.254 suara atau 26,69%; sedangkan jumlah suara Partai Demokrat dan PKS adalah 187.170 suara atau 23,98% dengan perolehan suara masing-masing partai PD 130.845 suara dan PKS 56.325 suara.

#### **5.5.4 Kampanye**

*Swing voters* dan kekuatan media merupakan alasan mengapa kandidat atau partai politik perlu terus melakukan kampanye. Hasil penelitian ini hanyalah pengukuran pada pasca kampanye, belum dibandingkan dengan preferensi pemilih masa sebelum kampanye dan ketika kampanye berlangsung. Sebagaimana diketahui bahwa pada masa sebelum kampanye, popularitas salah satu pasangan calon cukup tinggi namun pasca masa kampanye pasangan calon tersebut jauh ditinggalkan pemilih. Temuan Lembaga Survei Indonesia (2008) mengenai banyaknya *swing voters* menjadikan kegiatan kampanye sebagai hal yang penting. Mengapa? *Swing voters* merupakan pemilih yang memiliki kemungkinan lebih besar dibanding pemilih loyal untuk dapat diarahkan suaranya kepada kandidat tertentu.

Temuan berikutnya dari Lembaga Survei Indonesia (2008) adalah

adanya *silent revolution* dengan sifat-sifat sebagai berikut:

- media massa, terutama televisi, menggantikan fungsi organisasi partai politik untuk menjangkau calon pemilih. Inilah "*silent revolution*" yang sedang terjadi dalam kompetisi antar partai di Indonesia, yang dicerminkan oleh munculnya televisi sebagai medium utama penyebaran informasi politik dan sebagai medium persuasi paling massif.
- namun kekuatan media massa ini tidak secara merata mampu diakses oleh partai politik. Akibatnya, hanya partai yang mampu dan secara sistematis menggunakan media massa untuk menginformasikan dirinya ke publik yang mampu menggeser peta kekuatan partai.

Hal yang sama terjadi pada calon-calon kandidat Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008, dimana keterbatasan akses mereka ke media televisi nasional yang lebih banyak dinikmati khalayak, membuat kampanye mereka tidak efektif mempengaruhi perilaku pemilih. Kampanye masing-masing pasangan calon lebih banyak dilakukan dengan alat sosialisasi non-media (spanduk, poster, dan lain-lain), pertemuan dengan pemilih, dan melalui media cetak. Padahal hasil temuan Lembaga Survei Indonesia (2008) juga menyebutkan bahwa memori pemilih secara umum dibentuk oleh iklan televisi ketimbang oleh iklan radio dan surat kabar. Secara berurutan, iklan televisi jauh lebih berpengaruh pada memori pemilih; diikuti kemudian oleh alat sosialisasi non-media (spanduk, poster, dan lain-lain); baru kemudian oleh surat kabar dan akhirnya radio.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks, Jurnal dan Penelitian

- Alvarez, R. Michael, and Roberts, Reginald, 1996, ***Campaign Advertising and Candidate Strategy***, California Institute of Technology, California
- Amirudin dan Bisri, A. Zaini, 2006, ***Pilkada Langsung: Problem dan Prospek (Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005)***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2002, ***Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek***, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Asfar, Muhammad, 2006, ***Pemilih dan Perilaku Memilih 1955 – 2004***, Pustaka Eureka, Surabaya
- Blais, Andre, et.al, 2001, ***Measuring Party Identification: Britain, Canada, and the United States***, Political Behaviour, Vol.23, No.1
- Blais, Andre, et.al, 2002, ***Does the Local Candidate Matter?***, Universite de Montreal (Department of Political Science), Montreal
- Box-Steffensmeier, Janet M., and Kimball, David, 1999, ***The Timing of Voting Decisions in Presidential Campaigns***, Midwest Political Science Association, Chicago
- Budi, Triton Prawira, 2006, ***SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik***, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Budiarjo, Miriam, 2008, ***Dasar-dasar Ilmu Politik***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eriyanto, dkk, 2007, ***Preferensi dan Peta Dukungan Pemilih pada Partai Politik***, Kajian Bulanan Edisi 06 (Oktober 2007), Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta
- Eriyanto, 2007, ***Partai Politik dan Peta Studi Perilaku Pemilih di Indonesia***, Kajian Bulanan Edisi 06 (Oktober 2007), Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta
- Eriyanto, 2008, ***Faktor Agama dalam Pilkada***, Kajian Bulanan Edisi 10 (Februari 2008), Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta

- Firmanzah, 2004, ***Peran Ilmu Marketing dalam Dunia Politik: Menuju Marketing Politik di Indonesia***, Management Usahawan Indonesia (No.01 Th XXXIII), hal. 3 - 11
- Firmanzah, 2007, ***Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas***, Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta
- Gaffar, Afan, 1992, ***Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party***, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Gama, Betty dan Widarwati, Nunun Tri, 2008, ***Hubungan antara Kampanye Kandidat Kepala Daerah dan Perilaku Pemilih Partisipasi Politik Wanita (Studi pada Ibu-Ibu Rumah Tangga dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sukoharjo)***, Jurnal Ilmiah Scriptura, Vol.2, No.1, Januari 2008, hal.63-80
- Ghozali, Imam, 2006, ***Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS***, Badan Penerbit-Undip, Semarang
- Ghozali, Imam, 2006, ***Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS***, Badan Penerbit-Undip, Semarang
- Harrison, Lisa, 2007, ***Metodologi Penelitian Politik***, Kencana, Jakarta
- Hinkle, James R., 2004, ***Causes of Voter Choice: An Analysis of the 2004 Presidential Election and the Choice of American Voters to re-elect George W. Bush to the Office of President***, Denver Strategy Institute, Washington
- Ismanto, dkk, 2004, ***Pemilihan Presiden secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis dan Kritik***, Galang Press, Yogyakarta
- Iyengar, S., and Simon, A., 1999, ***New Perspectives and Evidence on Political Communication and Campaign Effects***
- Johnson, Richard A., and Wichern, Dean W., 2002, ***Applied Multivariate Statistical Analysis 5<sup>th</sup> edition***, Pearson Education International,
- Kamaruddin, 2004, ***Pengaruh Kampanye terhadap Pilihan Politik dan Perilaku Pemilih Birokrasi (Studi Perilaku Pemilih di Lingkungan Birokrasi Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)***, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- King, David C., and Matland, Richard E., 2003, ***Sex And The Grand Old Party (An Experimental Investigation of the Effect of Candidate Sex on Support for a Republican Candidate)***, American Politics Research (Vol.31, No.6, Nov.2003, hal. 595 – 612), Harvard University
- Koirudin, 2004, ***Profil Pemilu 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kotler, Philip, 2006, ***According to Kotler***, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Kristiadi, Josef, 1993, ***Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih: Suatu Studi Kasus tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum 1971 – 1987***, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kushartono, Toto, 2006, ***Perilaku Pemilih di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Perilaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi secara Langsung Tahun 2005 di Kecamatan Pelabuhanratu, Cisaat dan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi)***, Thesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Lau, Richard R., and Redlawsk, David P., 2006, ***How Voters Decide: Information Processing during Election Campaigns***, Cambridge University Press, Cambridge
- \_\_\_\_\_, 2008, ***Kecenderungan Swing Voter Menjelang Pemilu Legislatif 2009***, Lembaga Survei Indonesia, Jakarta.
- Liddle, R.William, and Mujani, Saiful, 2007, ***Leadership, Party And Religion: Explaining Voting Behavior In Indonesia***, Indonesian Survey Institute, Jakarta
- Marbun, BN, 2003, ***Kamus Politik***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marsh, Michael, 1999, ***Candidate Centred but Party Wrapped: Campaigning in Ireland under STV***, Trinity College, Dublin
- Marsh, Michael, 2005, ***Candidate or parties? Objects of electoral choice in Ireland***, Trinity College, Dublin

- Mas'ud, Fuad, 2004, ***Survei Diagnosis Organisasional: Konsep dan Aplikasi***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Newman, Bruce I, and Sheth, Jagdish N, 1985, ***A Model of Primary Voter Behaviour***, The Journal of Consumer Research, Vol.12, September 1985.
- Norris, Pippa, 2005, ***Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Development in Party Communications***, The National Democratic Institute for International Affairs, Washington, DC.
- Nursal, Adman, 2004, ***Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Peterson, David A.M., 1999, ***Campaign Timing and Vote Determinants***, University of Minnesota, Minneapolis
- Prihatmoko, Joko J., 2005, ***Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pradhanawati, Ari, 2007, ***Pemilihan Gubernur: Gerbang Demokrasi Rakyat***, Jalanmata, Semarang
- Riyanto, Bedjo, 2004, ***Iklan Politik, Era Image, dan Kekuasaan Media***, Nirmana Vol.6, No.2, Juli 2004, hal. 143 - 157 (Universitas Kristen Petra)
- Rosyadi, Imron, 2005, ***Perilaku Pemilih pada Pemilu 2004: Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi***, Thesis, Universitas Indonesia, Jakarta
- Santoso, Singgih, 2006, ***Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat***, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Setiyono, Budi, dkk, 2008, ***Iklan dan Politik: Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum***, AdGOAL.com, Galang Press, Buku Kita, Jakarta
- Simamora, Bilson, 2005, ***Analisis Multivariat Pemasaran***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Steinberg, Arnold, 1981, ***Kampanye Politik dalam Praktek***, PT. Intermedia, Jakarta

- Stone, Walter J., et.al, 2006, ***Candidate Quality and Voter Response in U.S. House Elections***, University of California, Davis
- Sugiono, Arif, 2005, ***Faktor yang Mempengaruhi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Perspektif Political Marketing***, Majalah Usahawan, No.5, Th.XXXIV, Mei 2005, Jakarta
- Sugiyono, 2004, ***Metode Penelitian Administrasi***, CV. Alfabeta, Bandung
- Ufen, Andreas, 2006, ***Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinisation'***, GIGA WP 37 / 2006, Hamburg
- Umar, Husein, 2004, ***Metode Riset Ilmu Administrasi***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Winarno, Budi, 2007, ***Sistem Politik Indonesia Era Reformasi***, Media Pressindo, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### C. Artikel, Sumber Internet dan lain-lain

#### Jawa Pos

Sabtu, 22 April 2008, **Berharap Poster di Pohon Dicotot**

Kamis, 12 Juni 2008, **Semua Calon Melakukan Pelanggaran**

Selasa, 17 Juni 2008, **Tiga Unjuk Rasa Goyang Calon**

Rabu, 18 Juni 2008, **Kampanye Anti-Politisi Busuk**

(Radar Semarang), Sabtu, 21 Juni 2008, hal.1, **KPI: Tolak Kandidat Terindikasi Korupsi**

#### Kompas

Rabu, 18 Juni 2008, **Menakar Kekuatan Parpol**

Selasa, 24 Juni 2008, **Komunikasi Antarelite Buruk; Kalla Evaluasi Kekalahan Golkar**

Meteor, Sabtu, 26 April 2008, hal. 3, **Rekam Jejak Cagub Harus Transparan (Sejumlah Cagub-Cawagub Terbelit Kasus Hukum)**

Nugroho, Amar B., 2008, *Evaluasi Kampanye Pilgub Jateng*, Suara Merdeka (Sabtu, 21 Juni 2008), hal. 6

Nuridin, 2008, *Kritik atas "Kampanye" Pilgub*, Suara Merdeka (Rabu, 23 Januari 2008), hal. 6

Pitaloka, Dyah, 2008, *Jitukah Iklan Politik?*, Suara Merdeka (Rabu, 2 Januari 2008), hal. 6

Seputar Indonesia, Senin, 19 Mei 2008, hal. 15, **Seputar Pilgub Jateng, Popularitas Bukan Jaminan**

#### Suara Merdeka

Jumat, 7 Desember 2007, hal. A, **Reklame Cagub Liar Akan Dicabut**

Rabu, 16 Januari 2008, hal. B, **Reklame Pilgub Diduga "Ngemplang", Kinerja Dinas Pertamanan Dipertanyakan**

Kamis, 17 Januari 2008, hal. B, **Sukawi Berurusan dengan Biro Reklame**

Senin, 4 Februari 2008, **Ada "Kampanye" di Harlah NU Jateng**

Kamis, 27 Maret 2008, hal. 16, **56% Pemilih di Jateng Mau Terima Uang**

Rabu, 4 Juni 2008, **Dua Versi PKB Berbeda Dukungan**

Kamis, 12 Juni 2008, **Lagi, Bibit Sasaran Kampanye Hitam**

Rabu, 2 Juli 2008, hal. 16, **Partisipasi Pilgub Mengkhawatirkan**

[www.kr.co.id](http://www.kr.co.id), *download at* Juli 6, 2008, **Kecewa Justru Dukung Tamzil-Rozaq; Mega Tanggapi Serius Sikap 'Naga Merah'**

[www.promojateng-bikk.com](http://www.promojateng-bikk.com), *download at* April 25, 2008, **Mayoritas Pemilih Belum Tentukan Nama Gubernur Jateng**

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *download at* Juli 6, 2008, **PKS Tetap Dukung Sukawi meski Kini Jadi Tersangka**